



SESKOAD

Terbaik, Terhormat dan Disegani

BULETIN VIRAJATI

Media Komunikasi Online Seskoad

Edisi III Desember 2020

TANTANGAN TNI ANGKATAN DARAT

ISSN 2086-9312



9772086931295

PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga kami dapat merilis Buletin Virajati Seskoad Online edisi III bulan Desember 2020. Kami juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada para penulis dan Tim Redaksi yang telah bekerja keras dalam penyusunan buletin ini, serta semua pihak yang telah membantu.

Pada edisi kali ini, Redaksi mengangkat tulisan dengan tema "Tantangan TNI Angkatan Darat". Tema ini sengaja dipilih dalam rangka menghadapi dinamika tuntutan tugas dan sekaligus menjawab tantangan kedepan yang semakin tidak ringan.

Seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, maka peningkatan profesionalitas dan adaptif harus dikedepankan. Kita semua harus meningkatkan kualitas diri dan mengikuti setiap perkembangan yang terjadi, senantiasa berpikir kritis dan bertindak kreatif, seraya mencari solusi dan inovasi guna mencapai keberhasilan setiap embanan tugas.

Akhir kata, semoga buletin ini mampu menambah pengetahuan dan wawasan, serta memberikan inspirasi dan motivasi kepada para pembaca dalam rangka memberikan pengabdian yang terbaik kepada masyarakat, bangsa dan negara. Tak lupa kami juga mengharapkan partisipasi pembaca dengan sumbangan pemikiran berupa tulisan, saran masukan yang membangun, bagi penyempurnaan Buletin Virajati Seskoad pada edisi mendatang. Semoga bermanfaat.

Redaksi

BULETIN VIRAJATI

Pelindung

Mayjen TNI Dr. Anton Nugroho, MMDS, M.A.

Pembina

Brigjen TNI Fulad, S.Sos., M.Si.

Penasihat

Brigjen TNI Marsudi Utomo, S.Sos

Brigjen TNI Drs. Agung Zamani M.Sc.

Pemimpin Redaksi

Kolonel Inf Drs. Paiman

Wakil Pemimpin Redaksi

Kolonel Inf Roy H.J. Sinaga, S.Sos.

Redaktur Pelaksana

Kolonel Chb Muhamad Mukson

Kolonel Inf Singgih Pambudi Arianto, S.I.P., M.M.

Kolonel Czi Dian Hendiana Surachman

Sekretaris Redaksi

Mayor Inf Leo Sugandi, B.A., MMDS.

Staf Redaksi

Mayor Inf Gede Agus Dian Pringgana, S.Sos., MMAS.

Mayor Inf Fauzan Rifai Alifikri, S.E., MMAS.

Mayor Kav Barid Budi Susila, S.Sos.

Reporter

Letda Inf Khairudin

Fotografer

Serma Winarna

Desain Grafis

Sertu Faizal Ridho Ilhami

Pengatur Muda/ III-A Rendra Boyke, S.Pd., M.Pd.

Alamat Redaksi

Seskoad Jl Jend. Gatot Subroto 96 Bdg

Alamat Email

buletinvirajati@gmail.com

Website

<http://www.Seskoad.mil.id>

Facebook

<https://www.facebook.com/Buletinvirajati>

Istagram

<https://www.istagram.com/Buletinvirajati>

Disclaimer :

- Semua hasil karya yang dimuat dalam "Jurnal Virajati" adalah menjadi hak cipta <http://www.seskoad.mil.id>.
- Tulisan dalam "Jurnal Virajati" merupakan buah pemikiran dan menjadi tanggung jawab penulis, serta tidak merepresentasikan pandangan organisasi Seskoad.
- Ide dan gagasan berbentuk tulisan essay dapat disampaikan kepada redaksi melalui email Redaksi



DAFTAR ISI

4

MENYIAPKAN STRATEGI PERANG
INFORMASI MELALUI PENGUATAN
FUNGSI LITBANG TNI AD
BRIGJEN TNI DRs. AGUNG ZAMANI, M.Sc.

32

KEBERHASILAN HJALMAR SCHACHT DALAM
MENGEMBALIKAN PEREKONOMIAN JERMAN
PASCA PERANG DUNIA I?
MAYOR INF F.X RENOTEN YANUARIYANTO, S.A.P

10

ANALISIS PERMENHAN RI NO 31
TAHUN 2018 DIHADAPKAN DENGAN
SATKER ORGANISASI TNI AD
TIM KAJIAN SESKOAD

36

PREDIKSI INTERVENSI MILITER
CHINA DI WILAYAH NATUNA
TIM KAJIAN SESKOAD
BID. STUDI KAWASAN

14

KEPEMIMPINAN KREATIF
KOLONEL INF PAIMAN

43

MASA DEPAN NEGARA REPUBLIK
DEMOKRATIKA TIMOR LESTE
(TINJAUAN DARI SEGI EKONOMI,
POLITIK, DAN KEAMANAN)
MAYOR ARM NICOLAU PAULO DA SILVA

19

UPAYA PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN
KOMPONEN CADANGAN GUNA MENDUKUNG
SISTEM PERTAHANAN DAN KEAMANAN
RAKYAT SEMESTA

KOLONEL INF RADEN IMMANUEL TJANDRA M.S.E., M.SI

49

MODERNISASI MATERIEL SATUAN
TNI AD DALAM MENINGKATKAN
KUALITAS DAN OPERASIONAL SATUAN
LETKOL CPL SYAIFUL BAHRI, S.T.

27

MEMAKSIMALKAN SERBUAN TERITORIAL
DAN POTENSI SATUAN GUNA MENGATASI
PERMASALAHAN SOSIAL PADA MASA
PANDEMI COVID-19

LETKOL INF ZUSNAN HADI HUDAYA, S.I.P

56

METODE LATIHAN CARDIO (LARI)
TANPA BEBAN RANSEL
KELOMPOK VII PESISI DIKREG LIX
SESKOAD TA 2020



MENYIAPKAN STRATEGI PERANG INFORMASI MELALUI PENGUATAN FUNGSI LITBANG TNI AD

BRIGJEN TNI DRS. AGUNG ZAMANI, M.SC.

"Perangnya sekarang bukan perang fisik lagi, tapi perang budaya. Hati-hati, perangnya sudah perang informasi sehingga negara tertentu menjadi lemah karena sebuah persepsi"

Presiden Joko Widodo – pada pembekalan di SMA Taruna Nusantara Magelang Januari 2017¹

Pendahuluan.

Bahkan menurut Sun Tzu, "*The supreme art of war to subdue the enemy without fighting*",² bahwa seni perang tertinggi adalah menaklukkan musuh tanpa pertempuran. Demikianlah pemikiran mendalam terkait pentingnya Perang Informasi dalam hidup saat ini, lebih khusus lagi di lingkup militer. Jenderal Douglas MacArthur pun mengatakan bahwa kita tidak bisa berperang tanpa dukungan opini publik yang dihasilkan oleh media dan bentuk lain propaganda. Beberapa fenomena flashback bagaimana information warfare menjadi sangat krusial dapat kita saksikan pada sejumlah kampanye militer pasca Perang Dingin. Invasi militer Amerika Serikat ke Irak tahun 1990 adalah salah satu contoh nyata bagaimana pencapaian tujuan dalam suatu perang modern sangat dipengaruhi oleh keunggulan dalam penguasaan media.

Kolaborasi pemerintah AS, Militer, dan Media untuk melancarkan Perang Teluk 1990 diwujudkan dengan cara menempelkan wartawan (*embedded journalist*) pada pasukan Amerika. Media Barat menarik perhatian publik dunia dengan memberitakan setiap kemajuan pasukan Sekutu yang sangat impresif. Hasilnya, publik AS dan dunia terkesima. Minim penolakan di dalam negeri AS dan semua kanal TV di seluruh dunia yang menyiaran tentang Perang Teluk menjadi media propaganda show of force yang luar biasa bagi Amerika Serikat. Itulah kenapa Negeri Paman Sam itu tidak memerlukan upacara dengan parade militer besar-besaran yang mempertontonkan barisan rapi para tentara dengan Alutsistanya.

Gejolak politik di Tunisia tahun 2011 dan kudeta militer di Mesir yang menjadi pemicu Arab Spring juga adalah bukti dahsyatnya Perang Informasi. Musim Semi Arab yang bermula dari jatuhnya Pemerintahan Presiden Tunisia, Ben Ali yang telah berkuasa 24 tahun lalu menjalar ke Mesir, negara yang memiliki pemimpin diktator yang telah 30 tahun berkuasa, Husni Mubarak. Kedua negara dirundung kemelut akibat kegagalan pemerintahnya menangani krisis pangan, kesenjangan ekonomi, dan korupsi. Media massa dalam negeri yang dikendalikan

¹ <https://setkab.go.id/bekali-siswa-sma-taruna-nusantara-presiden=jolowi-ke-depan-perangnya-bukan-fisik-tapi-budaya/>

² <https://www.finansialku.com/kata-kata-bijak-sun-tzu/>

pemerintah bungkam akan situasi tersebut. Maka, rakyat Tunisia, juga Mesir, mengadu lewat *Facebook*, media sosial yang saat itu tengah *booming*. Dari media sosial itulah perang informasi dilancarkan. Libya, Suriah, dan Yaman merasakan sulitnya membendung Perang Informasi yang memanfaatkan media sosial dan internet. Turki sebaliknya. Tahun 2016, melalui pesan-pesan berantai di *Facebook* dan *Twitter* rakyat Turki yang simpati pada Pemerintah mampu menghadang upaya kudeta militer. Pemanfaatan *Facebook* dan *Twitter* dalam aksi-aksi massa di Timur Tengah adalah bukti empiris betapa kuatnya pengaruh media sosial dalam mengubah wajah sosial politik suatu negara.



Pesan di Facebook meng-hadang upaya kudeta militer

Kemenangan Donald Trump yang cukup mengejutkan pada Pilpres AS tahun 2016 juga bukti hebatnya Perang Informasi bahkan di negara demokrasi yang mapan seperti Amerika Serikat. Perang isu yang dilancarkan oleh Trump terhadap lawannya melalui media sosial beberapa hari menjelang hari pemilihan, mengakibatkan opini publik AS berbalik mendukung Trump dari Hillary Clinton. Contoh lain, dari dalam negeri adalah lepasnya Pulau Sipadan-Ligitan dan Timor Timur akibat kurang kuatnya penguasaan media oleh pemerintah kita dalam membangun opini internasional.

Ancaman kelompok OPM yang terus-menerus membangun opini internasional melalui Melanesian Spearhead Group juga bagian dari upaya kelompok separatis tersebut untuk mencapai tujuan politiknya, kemerdekaan Papua. Perang opini melalui media guna menyulut konflik kepentingan antar institusi/aparat negara, antar kelompok yang bernuansa SARA, antar Parpol atau kontestan Pemilu, serta berbagai konflik sosial lain, bahkan insiden rasisme di AS yang dikait-kaitkan dengan isu Papua yang tentu tidak ada relevansinya cukup menyadarkan kita bahwa Perang Informasi itu sudah menerpa bangsa Indonesia.

Deretan fenomena di atas memberi pelajaran tentang urgensi strategi perang informasi sebagai wujud peperangan jenis baru yang sama parahnya dengan perang konvensional. Wacana Perang Informasi menjadi sesuatu hal yang sangat krusial. Pertama, sejarah kelam bangsa-bangsa di dunia yang tidak memiliki strategi yang tepat dalam menghadapi Perang Informasi mengakibatkan pemerintahnya tergagap mengambil respon. Kedua, belum jelasnya wadah dan aktor yang harus disiapkan untuk menghadapi Perang Informasi akibat belum adanya konsep doktrin dan strategi yang jelas. Keduanya berawal dari upaya Penelitian dan Pengembangan di negara kita untuk menghasilkan konsep strategi dan doktrin Perang Informasi yang sejalan dengan tuntutan tugas dan perkembangan lingkungan.

Pembahasan.

Pakar Perang Informasi dari USAF Colonel Alan D. Campen, mendefinisikan Perang Informasi sebagai suatu tindakan secara langsung atau tidak langsung yang digunakan untuk memanipulasi, meniadakan, mengacaukan, atau menghancurkan informasi dan sistem informasi lawan, baik pada masa damai, pada masa krisis, atau pada masa perang yang menyentuh pada bidang sosial, ekonomi, industri atau sistem informasi elektronik militer. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan bidang informasi atas lawan serta untuk mempengaruhi perilaku,

penangkal, atau mengakhiri konflik atau jika gagal, untuk memenangkan perang dengan cepat dengan pengeluaran modal, sumber daya, dan personel yang minimum serta korban yang minimum di kedua pihak. Perang Informasi tidak mengenal dimensi waktu baik pada masa damai maupun pada masa perang, serta informasi dapat mempengaruhi perilaku dalam memenangkan peperangan tanpa biaya dan jiwa yang besar. Secara umum Perang Informasi banyak mengarah pada pengertian perang media atau opini yang menjurus pada propaganda, yang menyangkut tiga aspek, yakni Perang Komando dan Pengendalian, Perang Elektronika, dan *Psychological Warfare*.

Urgensi Perang informasi di tubuh Angkatan Darat tidak hanya digunakan untuk musuh, tetapi juga bisa digunakan oleh TNI AD untuk mereposisi diri di mata masyarakat, memenangkan hati rakyat, termasuk kiprahnya dalam bernegara. Jadi, lebih banyak mengarah pada perang informasi psikologi. Yang perlu dibenahi adalah menyangkut peran serta institusi pendidikan dan industri sebagai partner Litbang, perkembangannya sangat lambat meskipun telah didukung program modernisasi atau peningkatan anggaran latihan. Jadi, dibutuhkan Badan Litbang TNI AD yang mampu menyiapkan Strategi dalam menghadapi Perang Informasi.

Kedudukannya tidak hanya sebagai *user APBN*, tetapi lebih jauh lagi sebagai kontributor yakni dengan memberikan keamanan sebagai Tupoksinya. Sampai saat ini TNI AD belum memiliki visi yang jelas tentang Perang Informasi (*Information Warfare*). Yang terjadi adalah bahwa seharusnya informasi tidak hanya direncanakan dan dijalankan (*plan and execute*), tetapi harus ada strateginya. Ini sama halnya dengan ilmu *marketing*, tidak hanya merencanakan penjualan dan menjual barang, tetapi harus ada strategi *marketing*-nya. Apakah Perang Informasi ini akan dibiarkan sebagai wacana atau justru akan disusun dalam bentuk doktrin. Memperhatikan ruang lingkup dan karakteristik Perang Informasi TNI AD, maka analisis Kita

akan bertumpu pada 3 pilar kekuatan yakni Intelijen, Siber, dan Penerangan.



Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto saat meresmikan Siber TNI

a. Intelijen.

Intelijen erat kaitannya dengan kegiatan mencari, mengolah, dan menyajikan informasi guna mendukung operasi. Jika dikaitkan dengan dinamika masyarakat dan perkembangan media, intelijen berperan sentral dalam mengelola arus informasi yang beredar di masyarakat guna mendapatkan opini positif yang sejalan dengan operasi atau kebijakan pimpinan. Perkembangan teknologi informasi dan media sosial melahirkan berbagai kemampuan intelijen yang sangat vital dalam Perang Informasi, yaitu HUMINT (*Human Intelligence*), SIGINT (*Signal Intelligence*), dan OSINT (*Open Source Intelligence*) atau dikenal juga dengan Intelijen Media. Kemampuan-kemampuan tersebut harus menjadi *core competence* satuan-satuan intelijen dalam setiap operasi militer di era informasi ini. Namun, konsep pengembangan doktrin, SDM, Alat peralatan dan *software* yang dibutuhkan untuk mewujudkan kompetensi tersebut memerlukan riset dan pengujian.

b. Siber.

Kemampuan satuan siber TNI saat ini masih terkungkung pada monitoring media sosial dan pengamanan jaringan komputer di lingkungan Mabes dan sejumlah Balakpus. Selama ini, kemampuan siber TNI AD baru digunakan untuk melacak akun-akun

¹ <https://mardoto.com/2008/07/04/perang-informasi/>

buzzer/palsu yang menjelek-jelekkan TNI di media sosial. Sementara itu kemampuan serangan dan pertahanan siber, dua kemampuan utama satuan siber di setiap angkatan bersenjata di seluruh dunia, belum dikembangkan dengan optimal.

Memang, sejak satuan siber TNI diresmikan oleh Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto tahun 2018 lalu, belum terdengar kemampuan serangan dan pertahanan siber TNI/TNI AD dilatihkan atau disimulasikan, apalagi dipraktikkan di medan operasi. Padahal medan penggunaan kemampuan siber ini sangat terbuka lebar, apalagi di masa tahun-tahun politik di mana permainan isu politis dan SARA selalu mengemuka. Ini bukan untuk masuk ke ranah politik praktis, namun untuk memonitor pihak mana yang berencana memanfaatkan media sosial dan internet untuk menimbulkan kekacauan di masyarakat yang dampaknya membahayakan kedaulatan negara. Belum adanya kerangka kerja dan konsep strategi yang komprehensif dalam menghadapi Perang informasi menjadi alasan utama sehingga penggunaan kemampuan siber sangat minim. Pola-pola operasi informasi baru dapat dijabarkan bila strategi di tingkat kebijakan dan operasional telah disepakati oleh semua pihak/stakeholder Perang Informasi.

c. Penerangan.

Satuan penerangan TNI AD di era informasi ini berperan signifikan dalam memelihara image TNI AD dan menangkal isu-isu negatif yang marak di media massa dan media sosial. Satuan Penerangan dapat menjadi narasumber utama dalam menjawab berbagai polemik dan membangun opini positif di masyarakat. Di samping melalui konten publikasi, fungsi manajemen media juga menjadi kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap satuan Penerangan, tentunya sesuai stratanya.

Namun, sayangnya fungsi Penerangan yang sering 'dimainkan' di lingkup TNI masih terbatas pada diseminasi informasi satuan dan kegiatan pimpinan.

Pengelolaan *website* dan akun media sosial, serta kemitraan dengan media masih mengarah pada perspektif lama, dimana saluran-saluran media tersebut hanya dimanfaatkan untuk menyampaikan berita. Upaya meningkatkan traffic di website atau meningkatkan popularitas dan jumlah followers di akun media sosial resmi satuan belum tampak hasilnya. Kreativitas dalam konten publikasi dan keterpaduan dengan aksi satuan-satuan lainnya dalam rangka menghadapi ancamannya Perang Informasi juga belum terlihat nyata. Memang satuan Penerangan ibarat corong informasi TNI/TNI AD bagi masyarakat, namun fungsinya sebagai alat dalam menghadapi ancaman aktual, terutama Perang Informasi yang berbentuk perang isu, perebutan opini publik, dan operasi informasi seolah terlupakan.

Ini patut diduga karena kesadaran akan pentingnya keterpaduan strategi Perang Informasi antara ketiga pilar utama kekuatan informasi TNI belum ada atau belum diaktualisasikan. Akibatnya, konten pemberitaan dan informasi yang disampaikan di media massa dan media sosial seringkali tampak dangkal, tanpa pesan yang kuat. Disinilah diperlukan Litbang tentang arah pengembangan dan penggunaan kemampuan intelijen, siber, dan penerangan dalam Perang Informasi yang selaras dengan paradigma ancaman yang aktual.

Litbang perlu merumuskan *Grand Strategy* Perang Informasi seperti apa yang perlu dikembangkan, sehingga dapat menjadi panduan dalam penyusunan doktrin Perang Informasi TNI/TNI AD yang aktual dan benar-benar efektif.

Tantangan yang perlu dijawab segera untuk melaksanakan Litbang terkait Perang informasi ini adalah belum tersedianya basis data intelijen dan data primer lain yang akurat dan cepat saji untuk dijadikan bahan dasar pengambilan keputusan user (Pimpinan) berdasarkan masukan produsen (Badan Litbang). Demikian pula terdapat kendala berupa belum jelasnya arah kebijakan pengembangan kekuatan intelijen, siber, dan

penerangan sebagai aktor utama dalam perang informasi di era modern. Sementara itu, kerancuan dalam penggunaan ketiga satuan tersebut dalam operasi informasi yang dapat menyentuh ranah-ranah politik dan hukum serta Kamtibmas juga menjadi kendala utama sehingga penyusunan visi perang informasi di lingkup TNI belum juga rampung. Namun, bagi TNI AD kebutuhan akan strategi perang informasi semakin mendesak, terutama yang terkait keterpaduan unsur-unsur utama kekuatan informasi TNI AD serta prosedur/kerangka hukum yang menaunginya.

Permasalahan mendasar dalam pengembangan kekuatan perang informasi TNI AD saat ini adalah policy tidak dibangun atas dasar evident base karena tidak tersedianya basis data atau evidence yang cukup. Sementara itu, Lembaga Litbang yang berpotensi menghasilkan produk kajian strategis, termasuk dhi. tentang Perang informasi, yang dapat dijadikan basis pengambilan keputusan atau kebijakan kurang diberdayakan sehingga terjadi gap antara user (Pimpinan) dengan produsen kajian (Litbang). Hal ini berpotensi menjadi akar permasalahan dalam penyusunan strategi Perang informasi TNI AD, karena dibuat tanpa landasan data yang valid dan reliabel.

Solusi dan Rekomendasi

Perlunya grand strategy Perang Informasi di lingkungan TNI AD.

Pembinaan personel Litbang TNI AD pada prinsipnya mengikuti arah kebijakan Pembinaan Personel TNI AD, yang mendudukkan orang-orang sesuai kompetensi jabatannya dan sejalan dengan kebijakan pembangunan kekuatan TNI AD. Namun, kebutuhan SDM personel Litbang TNI AD semestinya mendapat perhatian khusus, karena erat kaitannya dengan aspek akademis dan tugas-tugas riset yang membutuhkan waktu serta perhatian luar biasa demi mencapai hasil Litbang yang reliabel.

Penempatan jabatan-jabatan fungsional yang lebih luas dan spesifik serta penggunaan sumber daya dari luar (outsourcing) terutama dari akademisi perlu menjadi pertimbangan utama.

Pengembangan karier, kesejahteraan, hingga penyaluran personel Litbang dapat menjadi aspek yang dikaji selanjutnya. Selanjutnya, mekanisme pengujian hasil Litbang terkait konsep strategi perlu dibenahi, tidak hanya melalui uji kualitatif dan kuantitatif, namun menggunakan simulasi dalam lingkungan terkontrol bahkan uji dalam operasi nyata. Hal ini diperlukan sebagai bukti/evidence yang kuat tentang efektivitas konsep yang dihasilkan. Karena itu perlu adanya suatu reformasi atau pemberian sistemik dalam Litbang konsep strategi perang informasi, serta strategi perang lain pada umumnya, guna mewadahi kebutuhan organisasi serta perkembangan lingkungan yang dinamis seperti saat ini.

Upaya sebagai Rekomendasi yang perlu dilakukan.

Beberapa upaya yang perlu direkomendasikan untuk mendapatkan peningkatan dan penguatan bidang SDM dan organisasi Litbang adalah sebagai berikut.

Pertama, perlunya *knowledge outsourcing* yang dibutuhkan untuk peningkatan kualitas SDM sebagai bahan pertimbangan mengingat rendahnya literasi di ketiga aspek literasi baru sementara desakan waktu akan kebutuhan organisasi maka diperlukan transfer pengetahuan dari luar baik Kementerian/Lembaga ataupun badan instansi kompeten melalui pendidikan dan pelatihan, workshop, seminar, dan kegiatan asistensi secara proporsional.

Kedua, diperlukan rekrutmen khusus prajurit bertalenta dan memiliki kompetensi khusus komputer/IT, dan berkemampuan khusus di teknologi digital, dan AI, baik kelompok Perwira PK maupun Caba PK Talenta, sehingga selain kemampuan menjadi prioritas, mereka tetap dalam status prajurit yang diikat dengan Sumpah Prajurit dan Saptamarga.

Ketiga, bila dipandang perlu dan mendesak maka kita dapat mengangkat tenaga PPPK khususnya bidang pendidikan IT/AI yaitu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat berdasarkan PP No. 11 Tahun

| 2017 tentang Manajemen PNS dan PP No. 49
| Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai
| Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Per
| BKN tentang Juknis Pengadaan PPPK, khususnya
| bagi mengisi jabatan khusus Artificial Intelligen,
| komputasi awan, hacker, dan berkemampuan luar biasa di bidang
| IT/digital, dengan persyaratan melalui litpers
| khusus sesuai ketentuan/regulasi di organisasi
| TNI AD.

Keempat, memberdayakan fungsi/badan Litbang TNI AD dengan membesarkan organisasi Dislitbangad menjadi Puslitbangad dan diisi personel profesional, serta unggul sesuai kompetensi jabatan yang dipersyaratkan khususnya bidang sains dengan posisi tawar yang tinggi karena aspek kelebihan dalam binkar dan kesejahteraan personel ahlinya. Tentu saja harus dipersyaratkan adanya akreditasi dan bagi mereka yang memiliki persyaratan khusus peneliti dan berkualifikasi psikologi Litbang pada tingkatan tertentu. Dispsiad dan Srenad dapat melakukan validasi secara proporsional sehingga sebagai badan suplai ke user (Pimpinan) TNI AD akan senantiasa memberikan pertimbangan akurat dan profesional bagi pengambilan keputusannya.

Untuk mewadahi kebutuhan akan pengembangan unsur-unsur Intelijen, Siber, dan Penerangan dalam perang informasi, maka perlu disusun suatu kerangka aturan tentang penggunaan personel dan satuan-satuan yang diperlukan dalam pengujian hasil Litbang.

Sementara itu, personel Litbang dan para Peneliti yang terlibat di dalam program Litbang menjadi pengendali/controller dan pengamat/observer dalam pengujian. Pada tahap pengujian ini pula para user dan pemegang kebijakan tentang Perang Informasi perlu dihadirkan, sehingga dapat menyempurnakan konsep dan menjamin langkah yang diambil tidak keluar dari ranah-ranah yang bukan kewenangannya.

Penutup.

Rekomendasi dan upaya yang disampaikan di atas diharapkan dapat menjawab upaya

penguatan Litbang TNI AD dalam Perang informasi, khususnya yang menyangkut penggunaan SDM dan mekanisme pengujian. Ketajaman analisis dan metodologi uji terhadap konsep strategi perang informasi yang dihasilkan oleh Litbang TNI AD dapat menjadi jalan bagi pembangunan kekuatan TNI AD dan TNI pada umumnya di era revolusi Industri 4.0 saat ini dan di masa depan.

Kita menyadari bahwa profesionalisme, keterpaduan antar elemen organisasi, dan fleksibilitas dalam beradaptasi dengan tantangan yang aktual adalah kunci kemajuan organisasi modern dalam persaingan di dunia yang sangat dinamis. TNI AD dengan tekad menjadi *world class army* tidak boleh bertahan pada budaya atau pola kerja yang lama dan terlambat beradaptasi. Kemajuan Alutsista yang demikian pesat harus diimbangi dengan perubahan paradigma terkait strategi penggunaan Alutsista tersebut. Hal tersebut dapat dimulai dari penguatan Badan Litbang TNI AD.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnaldo Pellini, dkk. Knowledge Based Policy Making, 2019 (Buku Digital).
Doug Laney (th 2000) analis industri dalam Nur Saputro
<https://www.nesabamedia.com/pengertian-big-data/> 27 November 2019.
<https://m.detik.com/news/kolom/3926626/menyikapi-era-disrupsi>, 20 Maret 2018 14.00.
<https://www.finansialku.com/kata-kata-bijak-sun-tzu/>
Samuel P. Huntington dalam Muhadjir Effendy, Jati Diri dan Profesi TNI, (Malang: 2009).

Catatan: Tulisan ini telah dimuat pada Buletin Litbang TNI AD Edisi 65 Tahun 2020.

BRIGJEN TNI. DRS. AGUNG ZAMANI,
M.SC. ADALAH ABITUREN SEPA WAMIL
1990 DAN SAATINI MENJABAT SEBAGAI
WIDY AISWARA BIDANG STRATEGI DAN
KAWASAN SESKOAD



ANALISIS PERMENHAN RI NO 31 TAHUN 2018 DIHADAPKAN DENGAN SATKER ORGANISASI TNI AD

TIM KAJIAN SESKOAD

Sumber.Google.com

Pengantar.

Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara adalah satu kesatuan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan dan TNI sebagai unsur penyelenggara pertahanan negara. Perencanaan pembangunan pertahanan negara mencakup penyelenggaraan perencanaan pembangunan kekuatan, kemampuan, dan gelar Hanneg sebagai upaya meningkatkan daya tangkal bangsa yang tangguh dalam mengatasi segala ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta keselamatan segenap bangsa, yang diatur dalam Permenhan RI No. 31 tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018.

Dalam membahas pembangunan pertahanan negara saat ini, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih luas dihadapkan pada regulasi yang ada dengan pelaku-pelaku regulasi, yaitu dengan Landasan Teori dari Anthony Giddens. Teori strukturasi Anthony Giddens (structuration), yang berarti menunjukkan hubungan pelaku dengan struktur sebagai relasi dualitas.

Konsep "Relasi Dualitas" Giddens, yaitu konsep yang menguraikan hubungan pelaku/agen dan struktur. Kedua hubungan ini saling terkait dan membentuk pola hubungan dalam praktik pelaksanaan operasional.

Urgensi dan Permasalahan yang Terjadi.

Kelemahan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini adalah dalam melakukan perubahan administrasi atau dengan kata lain memodernisasi administrasi. Secara tidak langsung kegagalan memodernisasi administrasi menyebabkan lambatnya pembangunan organisasi TNI, salah satunya adalah kurang operasionalnya produk regulasi perencanaan pembangunan yang disusun. Dengan demikian, dapat kita lihat bahwa terjadinya masalah pada tingkat tataran kewenangan pelaku regulasi sangat berpengaruh terhadap organisasi.

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 tahun 2018 yang dikeluarkan tanggal 31 Desember 2018 menuntut kewajiban seluruh satker pengelola anggaran untuk melakukan rangkaian perencanaan lima tahunan dan perencanaan satu tahunan tanpa memandang posisi, tugas, fungsi organisasi, dan tingkat kewenangan dalam perencanaan pertahanan negara. Adapun pengertian Satker adalah unit organisasi lini Kementerian Pertahanan/TNI

yang melaksanakan kegiatan Kementerian Pertahanan/TNI dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran (PMK 143/2018, pasal 1 Ayat 12).

Saat ini organisasi TNI AD telah membentuk 312 Satker dengan penerapan Dipa Daerah atau yang lebih familiar Dipa selaku otorisasi, dengan jenis dan bentuk organisasi yang beragam menyesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban, mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Di sini fungsi Satker lebih melekat pada peran dan fungsi pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan. Namun, pada Permenhan 31 tahun 2018 dituntut juga melaksanakan perencanaan lima tahunan dan perencanaan tahunan yang melekat pada tataran atau tingkat kebijakan.

Bagian permasalahan yang menonjol dalam rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan pembangunan lima tahun ke depan untuk dipedomani oleh satuan di bawahnya. Namun, dengan adanya SPP Hanneg sesuai Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 tahun 2018 tersebut, maka semua satker memiliki tingkatan yang sama tanpa memandang batasan tataran kewenangan. Padahal tidak semua Satker diawaki pejabat yang memiliki kemampuan dan kewenangan menyusun Renstra. Akan tetapi, dalam SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) menuntut setiap Satker yang menerima dan mengelola anggaran wajib melaporkan melalui LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang mengacu pada Renstra (Rencana Lima Tahunan).

SAKIP berasal dari Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang di dalamnya disebutkan mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah. Sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaianya dengan ketentuan yang berlaku.

SAKIP merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan melaksanakan misi organisasi. Sistem AKIP terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja. Oleh karena itu, setiap lembaga termasuk di dalamnya Kemhan/TNI wajib mengomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam LAKIP. Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan kebijakan serta peranannya dalam pengelolaan anggaran yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Adapun untuk Organisasi TNI AD disusun berdasarkan pada sistem pengorganisasian (Jukmin Manajemen Perencanaan TNI AD Keputusan Kasad Nomor KEP/534/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015), yang meliputi :

- a. Kesatuan Komando. Kesatuan komando menghendaki adanya tingkat-tingkat komando dan jalur perintah.
 - b. Kemampuan Mengawasi. Organisasi disusun bertingkat sehingga dapat mengawasi secara efektif terhadap organisasi di bawahnya..
 - c. Penentuan Tugas yang Homogen. Merupakan rincian serta pengelompokan aktivitas yang semacam atau erat hubungannya satu sama lain, untuk mencapai tujuan.
 - d. Delegasi Wewenang. Penyerahan sebagian kekuasaan dan pekerjaan dari seorang pejabat kepada pejabat bawahnya, untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik.
 - e. Rantai Komando.
- 1) Merupakan saluran pemberian perintah/

- instruksi secara hierarki dari tingkat tertinggi sampai terbawah.
2. Membentuk kelangsungan kekuasaan dari komando atas terhadap komando bawah dan penyaluran jalannya instruksi yang sah serta menjamin terwujudnya kesatuan komando.
 3. Saling berhubungan secara tegak lurus dan bertingkat, sehingga merupakan suatu mata rantai secara hierarki.
 4. Sebagai pedoman dalam penindakan atau penyelenggaraan yang ditujukan secara khusus terhadap seorang pejabat secara hierarki.
 5. Setiap penyimpangan yang terjadi di komando bawah segera diluruskan, dilaporkan atau diberitahukan kepada pejabat di atasnya, secara hierarki.
- f. Kesederhanaan. Setiap organisasi/satuan disusun secara sederhana sehingga memungkinkan semua anggota dapat melaksanakan segala kegiatan dari kesatuannya.
- g. Mudah digerakkan. Organisasi/satuan dilengkapi perlengkapan serta personel yang dilatih secara teratur dan sistematis, sehingga dapat digerakkan dalam berbagai keadaan medan dan cuaca untuk menyelesaikan tugas pokoknya.

Dalam penataan dan penyusunan organisasi TNI AD disusun secara bertingkat sesuai dengan hierarki mulai dari tingkat Mabesad (Pusat) sampai dengan tingkat terendah (Regu atau Tim). Dalam tingkatan tersebut sudah diatur/ditata batasan kewenangan serta tingkat tanggung jawabnya, sehingga dalam pembuatan Renstra oleh organisasi jajaran TNI AD juga dipengaruhi batas kewenangan. Demikian pula dengan penyusunan, personel yang mengawaki pun selalu disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dihadapkan dengan tuntutan setiap Satker untuk membuat Renstra sebagai amanah yang dituntut dalam SPP Haneg dan SAKIP sudah tentu menjadikan kendala dan masalah bagi Satker/organisasi tertentu sebagai permasalahan yang terjadi.. Karena pada dasarnya :

- a. Organisasi militer tidak sama dengan organisasi umum/usaha, dimana organisasi umum/usaha berorientasi pada keuntungan atau pelayanan publik yang dapat diukur capaianya. Namun, ini berbeda dengan organisasi militer dibentuk secara khusus untuk mewaspadai risiko, sehingga peranan, tugas, tujuan, dan fungsi disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang dihadapi maka bentuk dan struktur tidak pernah sama.
- b. Alur Kodal disusun tidak sama dengan alur anggaran. Dimana alur Kodal disusun berdasar pada rantai Komando yang tegas, delegasi wewenang yang memberikan ketegasan, serta tingkatan Komando yang mampu memberikan pengawasan serta diduduki oleh personel dengan jabatan organik. Sementara alur anggaran diduduki oleh personel dengan jabatan Ex Officio dikarenakan organisasi bentukan yang berorientasi pada kinerja.

Dengan demikian, setiap Satker pengelola anggaran belum tentu organisasi yang mampu menyusun Renstra seperti yang diamanatkan dalam SPP Hanneg dan SAKIP.

Analisis.

Dalam hal ini, Giddens berupaya menengahi 2 kutub yang berbeda. Sebelumnya telah disinggung perihal kata kunci dalam teori strukturalis: "struktur dan agen/pelaku/ modernis". Menurut Anthony Giddens yang dimaksud dengan "struktur" adalah "rule/tegulasi (SPP Hanneg)" yang dipakai pada sistem. Sedangkan "agenzi" (terjemahan harfiah Inggris: agen/pelaku yang dikelompokkan sebagai modernis) adalah Pelaku atau Organisasi yang melaksanakan rule/regulasi. Giddens dipandang sebagai orang pertama yang berhasil menghasilkan teori yang menghubungkan struktur dan agen/pelaku. Dalam teori ini, struktur dan agen/pelaku tidak dipandang sebagai dua hal yang terpisah, karena jika demikian akan muncul dualisme struktur-agen/modernis. Hubungan antara keduanya bersifat dialektik, dalam arti struktur dan modernis saling mempengaruhi dan hal ini berlangsung terus

- menerus, tanpa henti. (Giddens,1984 dalam Hidayat, 2000:440).

Struktur mempengaruhi agen/modernis dalam dua arti: memampukan (enabling) dan menghambat (constraining). Dalam pengertian Giddens, agen/modernis dapat meninggalkan struktur, Agen/Pelaku tidak selalu tunduk pada struktur. Ia dapat mencari kesempatan maupun kemungkinan untuk keluar dari peraturan dan ketentuan yang ada. Agen/Modernis dapat melawan struktur, maka dalam teori strukturalis yang menjadi pusat perhatian bukan struktur, bukan pula agensi, melainkan apa yang oleh Giddens disebut "social practices". Memang orang tidak boleh melupakan struktur dan agensi, bahkan seharusnya memahami secara detil struktur dan agen. Namun, fokus utama harus diletakkan pada social practice, yaitu bagaimana Pelaku/Agen melaksanakan regulasi ala kadarnya.

Sehingga dihadapkan dengan Regulasi Permenhan RI Nomor 31 tahun 2018 maka :

a. Modernis. Pusat/Centrum berada pada Agen/Pelaku dalam hal ini Organisasi TNI AD. Regulasi dalam bentuk produk Renstra tidak berjalan optimal dikarenakan ada keterbatasan, sbb.:

- 1) Struktur Orgas TNI AD menganut Rantai Komando dan jalur Perintah.
- 2) Orgas TNI AD memiliki tanggung jawab yang jelas dan memiliki tingkat kewenangan yang tegas.

b. Strukturalis. Pusat/Centrum berada pada Regulasi atau aturan. Kelemahan terjadi disebabkan :

- 1) Regulasi yang sepihak memandang Satker yang berada di organisasi TNI AD merupakan Orgas yang sama dan setingkat.
- 2) Lemah membaca organisasi (Alur Kodal tidak sama dengan alur Penganggaran).

Peluang Sinergi dari kedua Kutub memberikan jalan tengah karena Regulasi (Permenhan RI Nomor 31 tahun 2018) dibuat tentunya menghasilkan Peluang dan Kendala. Pelaku/Agen memanfaatkan peluang dengan pengetahuan dan motivasinya mengatasi kendala.

Rekomendasi.

Rekomendasi yang disarankan, sebagai berikut :

a. Strukturalis.

1) Menata tingkatan Satker sesuai kewenangan. Penataan organisasi Militer yang disesuaikan dengan tataran kewenangan kebijakan dan dinamika administrasi. Pembentahan organisasi dan pembangunan pertahanan yang terarah dan diharapkan memberikan dukungan dan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan pertahanan negara yang lebih rasional.

2) Menyarankan merevisi Permenhan RI Nomor 31 tahun 2018. Ketidakjelasan dan ketidaklengkapan peraturan merupakan kendala yang dapat menghambat organisasi tertentu. Kaitannya dengan hal ini, maka perlu adanya tindakan yang nyata dalam melakukan review terhadap regulasi/peraturan agar tidak terjadi multi-interpretasi (ambiguitas). Selanjutnya perbaikan atas regulasi/peraturan tersebut dapat terdistribusi dan dipahami oleh seluruh personel yang mengawaki organisasi.

b. Modernis

1) Menyiapkan Personel yang mengawaki organisasi. Organisasi tersebut harus minim struktur, namun kaya fungsi dan harus diawaki oleh personel yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik, sehingga organisasi dapat berjalan sesuai dengan arah dan tujuan dalam mencapai tugas pokok.

2) Menata organisasi dan melengkapi jabatan yang sesuai. Untuk mewujudkan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran maka validasi organisasi menjadi prioritas utama yang diharapkan akan meningkatkan produktivitas dan kinerja organisasi.

TIM KAJIAN SESKOAD

KEPEMIMPINAN KREATIF



KOLONEL INF PAIMAN

Pendahuluan

Kepemimpinan merupakan titik sentral dari suatu keberhasilan dan sekaligus unsur penggerak utama jalannya roda organisasi. Kepemimpinan menjadi hal yang sangat penting, bahkan yang terpenting dalam kehidupan organisasi kemiliteran, lebih utama lagi dalam kehidupan Perwira. Karena sebagai pemimpin, perwira adalah motivator dan inspirator bagi seluruh anggota yang dipimpinnya dalam mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Sekelompok domba yang dipimpin seekor singa akan lebih disegani dibandingkan sekelompok singa yang dipimpin seekor domba. Pepatah ini menandai bahwa keberadaan pemimpin dalam suatu organisasi atau satuan menempati posisi yang penting, dominan, dan strategis. Eksistensi, baik buruknya, berhasil tidaknya dan warna suatu organisasi sangat ditentukan dan dipengaruhi oleh kepemimpinan pemimpinnya.

Dalam posisinya sebagai Pemimpin, perwira memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Semakin tinggi posisi Pemimpin, semakin besar pula tuntutan tugas, kewajiban dan tanggung jawab yang diembannya. Oleh karena itu, sebagai seorang pemimpin, perwira harus kuat secara mental, cerdas, militan, kreatif, mampu berkreasi dan melahirkan inovasi serta menjadikan kendala, kekurangan dan

keterbatasan yang ada sebagai peluang untuk mencapai keberhasilan.

Urgensi kepemimpinan kepemimpinan adalah sebagai seni dan ilmu untuk mempengaruhi dan membimbing bawahan, sehingga timbul kemauan, kepercayaan, dan respek yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas yang dipikulkan padanya. Dengan demikian, kepemimpinan identik dengan seni mempengaruhi, atau seni mengendalikan dan mengarahkan orang lain untuk melakukan hal yang terbaik bagi kepentingan organisasi. Kepemimpinan sejatinya adalah suatu sikap atau attitude dan perilaku atau behavior, bukan status atau kedudukan. Pemimpin dituntut memiliki kreativitas, inovasi, dan cara bagaimana mengarahkan atau mengajak dan mempengaruhi anggotanya, agar mau melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan organisasi demi keberhasilan misi yang diembannya.

KEPEMIMPINAN PUTUS ASA VS KEPEMIMPINAN KREATIF

Walaupun tujuan kepemimpinan pada dasarnya sama, namun dari cara dan gaya dalam memimpin akan diketahui, bagaimakah kepemimpinan seseorang, apakah masuk kategori pemimpin yang putus asa atau pemimpin yang kreatif.

Kategori pemimpin yang mudah putus asa, antara lain adalah mudah mengeluh, pesimis dan pasrah dengan kondisi yang dihadapi, serta bersikap status quo. Sebaliknya, pemimpin kategori kreatif adalah pemimpin yang selalu berkreasi, energik dan mampu melahirkan inovasi serta menjadikan kendala, kekurangan dan keterbatasan sebagai peluang dan kesempatan untuk mencapai keberhasilan.

Salah satu cara untuk mengetahuinya adalah melalui respon atau reaksi yang dilakukan pemimpin dalam menghadapi suatu permasalahan. Respon pemimpin yang putus asa biasanya mudah panik, gopoh, emosi dan bahkan sampai melakukan kekerasan fisik. Model pemimpin seperti ini, sudah tidak zamannya lagi. Terlebih bila dihadapkan era globalisasi, demokrasi dan upaya menjunjung tinggi penghormatan Hak Azazi Manusia (HAM), seorang pemimpin tidak boleh lagi melakukan kekerasan fisik kepada orang yang dipimpinnya atau bawahannya, seperti memukul, menampar, menendang, dan bentuk-bentuk kekerasan fisik lainnya. Pemimpin juga tidak boleh melakukan dehumanisasi (memperlakukan secara tidak manusiawi) terhadap anggotanya. Pemimpin yang sampai melakukan kekerasan fisik kepada anggotanya, menandakan bahwa pemimpin tersebut mudah putus asa, masih kolot, bukan pemimpin yang bijak, pemimpin yang tidak memiliki kemampuan untuk memimpin dengan hati nurani dan logika, serta tidak memiliki kreativitas.

Sebenarnya, banyak cara dan seni yang dapat dilakukan, untuk membuat anggota mau melakukan apa yang dikehendaki seorang pimpinan, tanpa harus melakukan intimidasi dan kekerasan. Bila terpaksa harus memberikan punishment berupa hukuman fisik, banyak cara yang lebih mendidik, lebih elegan, lebih terhormat dan lebih manusiawi, seperti lari, push up, dan lain-lain, tetapi harus tetap terukur dan tidak berlebihan. Anggota harus tetap diperlakukan sesuai kodratnya sebagai manusia atau manusiawi. Punishment yang diberikan tidak boleh menimbulkan trauma, apalagi sampai menimbulkan bekas luka yang permanen.

Esensi punishment haruslah mampu membangun kesadaran dalam diri anggota dan memberikan efek jera, akan kesalahan yang dilakukan dan kesadaran untuk tidak mengulanginya kembali.

Dalam kaitan ini, pemimpin harus mampu menerapkan reward and punishment secara proporsional, profesional, dan terukur. Artinya mampu memberikan apresiasi, perhatian atau hadiah bagi yang berprestasi dan sebaliknya memberikan sanksi atau hukuman bagi yang tidak berhasil atau melakukan pelanggaran. Dengan adanya reward and punishment ini diharapkan akan memacu adrenalin prajurit maupun satuan yang dipimpinnya untuk menjadi yang terbaik, terdepan dan terhormat serta berupaya menghindarkan diri dari pelanggaran atau kesalahan. Aktivitas dan kreativitas yang diciptakan pemimpin dengan sendirinya akan menumbuhkan kesadaran, keinginan dan kemauan dalam diri setiap individu anggota untuk menampilkan yang terbaik. Bahkan tanpa disuruh atau dipaksa, anggota dengan sendirinya secara kesadaran akan berupaya untuk berbuat dan bekerja secara maksimal serta berupaya memberikan kontribusi terbaiknya bagi satuan.

Bila kondisi ini, sudah terbentuk, maka dengan sendirinya akan tumbuh rasa malu pada diri anggota, malu bila tidak mampu, malu bila tidak berdisiplin, malu bila tidak terampil.

Mengenali Tipe Anak Buah

Pemimpin kreatif dituntut untuk mampu memahami sifat dan karakteristik anggota yang dipimpinnya, agar mampu menerapkan pola kepemimpinan dengan tepat.



Ada beberapa tipe anggota/anak buah, yakni tipe anggota yang (1) mampu dan mau, (2) mampu, tetapi tidak mau, (3) mau tetapi tidak mampu, dan (4) tipe anggota yang tidak mampu dan tidak mau.

Terhadap anggota yang mampu dan mau, maka tugas pemimpin adalah mengarahkan dan mengawasi secukupnya. Bahkan tanpa harus diperintah dan diawasi, tugas-tugas tipe anggota seperti ini biasanya sudah jalan. Sedangkan tipe anggota yang mampu tetapi tidak mau, maka pemimpin diharapkan dapat memberikan arahan secukupnya, namun harus lebih banyak memberikan motivasi dan dorongan serta membangun kesadaran. Tipe anggota seperti ini, harus terus dipacu dan bila perlu dengan sedikit dipaksa dan ditekan. Terhadap anggota yang mau tetapi tidak mampu, maka seorang pemimpin harus mengarahkan lebih jelas dan mendalam, bila perlu melakukan pendampingan dan pengawasan secara terus-menerus, dengan sedikit dorongan saja. Di sini keberadaan seorang pemimpin lebih banyak bertindak sebagai seorang guru, yakni mengajar, mendidik, dan melatih anggotanya agar memiliki kemampuan dan ketrampilan sesuai standar yang diharapkan. Dan terakhir yang paling berat adalah tipe anggota yang tidak mampu dan tidak mau. Menghadapi anggota tipe ini, maka seorang pemimpin harus memiliki ekstra kesabaran, harus kreatif dan harus lebih banyak memberikan arahan, motivasi dan dorongan secara terus-menerus.

Jangan Biarkan Anggota Tanpa Aktivitas

Untuk mewujudkan pemimpin yang kreatif, maka perlu diterapkan prinsip "jangan dibiarkan anggota tanpa pekerjaan dan aktivitas". Membiarakan anggota tanpa aktivitas yang positif sama saja dengan memberikan peluang terjadinya kemalasan atau bahkan pelanggaran. Seorang pemimpin harus selalu berkreasi supaya anggota mau belajar, mau berlatih, dan mau bekerja, anggota mau belajar untuk meningkatkan kemampuannya, anggotanya mampu mengeksplorasi potensi dan kemampuan yang dimiliki bagi keberhasilan pencapaian tugas.

Pemimpin dituntut memiliki cara-cara kreatif dan inovatif, agar anggota merasa terikat dan diikat oleh satunya, sehingga akan mampu meminimalisir anggota keluyuran atau melakukan hal-hal yang tidak sepastasnya dilakukan oleh seorang prajurit.

Banyak cara dan kreasi yang dapat dilakukan oleh seorang pemimpin agar anggota merasa terikat dan diikat oleh satuan, khususnya di satuan tempur dan satuan bantuan tempur yang biasanya memiliki jumlah anggota yang cukup besar. Salah satunya adalah menciptakan kegiatan ataupun aktivitas di satuan yang mampu mendukung keberhasilan tugas satuan, mampu memupuk jiwa korsa, kebersamaan, kekompakan, soliditas, disiplin dan kebanggaan, mulai dari kegiatan olahraga, bakti sosial, berkebun, silaturahmi, kegiatan keagamaan, permainan, dan sebagainya.



Hal lain yang dapat dilakukan adalah menciptakan dan menghidupkan budaya kompetisi secara sehat dan terukur di lingkungan satuan yang dipimpinnya. Di sini pemimpin harus kreatif melakukan kegiatan yang mampu memacu kreativitas, jiwa kompetisi yang sehat dan dorongan untuk menjadi yang terbaik. Caranya dengan melaksanakan kompetisi, lomba ataupun pertandingan, seperti lomba ataupun pertandingan olahraga umum maupun olahraga militer, lomba kebersihan lingkungan asrama atau markas, ketertiban, kerapian, kedisiplinan, ketangkasan, dan sebagainya.

Banyak Jalan Menuju Roma

Pemimpin yang kreatif dengan ilmu dan seni kepemimpinannya, harus mampu menciptakan 1001 cara untuk mencapai tujuan dan keberhasilan bagi kepentingan organisasi yang dipimpinnya. Tidak zamannya lagi pemimpin bisanya hanya marah-marah, menggerutu, dan mengeluh dalam menghadapi permasalahan dan tuntutan tugas yang luar biasa banyak dan beratnya. Pemimpin yang hanya marah-marah, diibaratkan mencari pemecahan masalah tanpa solusi. Justru sebaliknya pemimpin harus menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Pemimpin harus mampu memecahkan masalah tanpa masalah. Jenderal Colin Powell pernah mengatakan bahwa "Pemimpin yang hebat selalu dapat menyederhanakan semua permasalahan dengan mengatasi argumentasi, diskusi, dan kegagalan untuk memberikan solusi dengan cara yang mudah dipahami kepada setiap orang".

Pepratah mengatakan: banyak jalan menuju Roma, banyak cara untuk menyelesaikan masalah. Seorang motivator, Andrie Wongso mengatakan bahwa orang yang sukses selalu kelebihan satu cara, sementara orang yang gagal selalu kelebihan satu alasan. Maknanya adalah orang gagal, jika dihantam kesulitan, mereka selalu bisa membuat 1001 alasan mengapa gagal. Sebaliknya, pemenang jika dihadapkan pada rintangan, halangan, kesulitan, bahkan kegagalan, akan melihat ke dalam terlebih dahulu, melakukan introspeksi diri, kemudian mencari penyebabnya dari dalam, menilai, dan mencari kekurangan/kesalahan dari apa yang menjadi penyebab timbulnya masalah dan kegagalan serta berupaya mencari cara untuk memperbaikinya.

Tidak kalah pentingnya lagi seorang pemimpin harus mampu memberi dan menjadi contoh tauladan yang baik bagi anggota yang dipimpinnya. Tauladan merupakan implementasi kepemimpinan yang paling mujarab.

Pemimpin tidak hanya sekadar memerintah anggotanya, atau istilahnya "Jarkoni" (bisa mengajar, tetapi tidak bisa nglakoni/melaksanakan), tetapi pemimpin harus ikut bersama-sama dengan anggota melakukan apa yang diperintahkan. Di lingkungan militer, unsur Pimpinan, khususnya di tingkat Regu sampai dengan Batalyon perlu menghidupkan kembali, waktu-waktu bersama dengan anggotanya, termasuk keluarganya, satuan-nya, kesatriannya, kegiatan sehari-harinya, seperti main gapple, ibadah, main bola, dan sebagainya.

Pemimpin yang kreatif, tidak boleh hanya berdiam diri dan statis, tetapi harus selalu dinamis dan energik, harus terus bergerak maju, terus melahirkan kreativitas, karya, dan prestasi. Pemimpin harus mampu memberi warna, nilai dan energi yang positif bagi anggota dan satuan yang dipimpinnya, sehingga kehadiran Perwira mampu membuat dan menjadikan satuan lebih hidup, lebih maju dan lebih berprestasi. Pemimpin tidak boleh mengenal istilah mundur atau menyerah, tetapi harus maju terus pantang mundur, pemimpin harus memiliki kapasitas, kapabilitas, percaya dan keyakinan diri bahwa Tuhan pasti membuka/memberi jalan untuk tugas yang dilakukan. Ibaratnya, bila pintu satu tertutup pasti ada pintu lain yang terbuka, bila cara atau solusi yang satu tidak bisa, pasti ada alternatif solusi yang lain.

PEMIMPIN BAGAIMANA SEHARUSNYA MEMIMPIN

Disadari bahwa kepemimpinan menjadi prasyarat mutlak bagi keberhasilan tugas satuan di lingkungan TNI AD. Masih banyaknya kasus pelanggaran di lingkungan satuan jajaran TNI AD, seperti desersi, THTI, Laka lain, kriminalitas dan tindakan indisipliner lainnya, mengindikasikan bahwa kepemimpinan lapangan para unsur pimpinan di satuan belum efektif. Tingkat kepedulian, ketanggapsegeraan dan kepekaan terhadap aspirasi dan permasalahan satuan maupun anggota masih rendah, belum direspon

sebagaimana mestinya. Akibatnya, pelanggaran demi pelanggaran terus bermunculan. Seorang pimpinan tentunya tidak bisa lepas tangan apalagi menyalahkan orang lain dan mencari pemberian sendiri.

Di sinilah pentingnya Pimpinan untuk selalu memacu dan mengasah diri dengan menggunakan segenap kemampuan dan kreativitas dalam menyiapkan satunya menjadi lebih baik dan selalu siap dalam tugas. Disinilah pentingnya para pimpinan satuan benar-benar memahami tugas pokok, peran dan fungsinya. Tugas pokok pimpinan atau Dansat pada dasarnya adalah membina satuan dengan sebaik-baiknya sehingga satuan yang dipimpinnya siap melaksanakan dan mampu menyelesaikan tugas pokok dengan tuntas dan berhasil. Para pimpinan merupakan ujung tombak kekuatan TNI AD. Peran dan fungsi pimpinan atau harus dapat dirasakan secara signifikan dan nyata oleh anggotanya, sehingga kemampuan dan kesiapan satuan dapat diwujudkan, dipelihara serta terus ditingkatkan dari waktu ke waktu.

Pemimpin yang Berkarakter

Dalam diri pemimpin kreatif harus melekat karakter yang proaktif, konstruktif, dan kreatif. Karakter proaktif, artinya memiliki visi yang jelas dan memiliki pengaruh yang besar di lingkungannya, mampu memengaruhi lingkungannya. Pemimpin yang proaktif selalu melakukan langkah antisipasi dan ramalan pelibatan, selalu ada alternatif lain, selalu ada jalan keluar dan solusi. Karakter konstruktif, adalah membangun orang lain untuk bergerak menuju sasaran yang pasti dan tidak merugikan/menghancurkan sekelilingnya, pemimpin yang mampu mendorong dan membuat anggotanya maju dan berprestasi. Pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang mampu menciptakan para pemimpin yang hebat dibawah komando atau kepemimpinannya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien. pemimpin harus berusaha untuk mencari alternatif yang lain dengan konsep-konsep baru untuk meneruskan rencananya, sehingga mampu mencapai sasaran dengan terobosan-terobosan baru.

Sifat-sifat yang harus dimiliki pemimpin kreatif

Selanjutnya, untuk menjadi pemimpin yang berhasil, maka dalam diri seorang pemimpin kreatif harus memiliki sifat jujur, integritas, spiritualitas, dan militansi: Pertama, Sifat Jujur. Kejujuran merupakan perilaku yang sangat berharga karena seorang pemimpin yang jujur akan mencerminkan kepribadiannya dan kejujuran akan menjadikan seorang pemimpin yang disegani. Tanpa memiliki kejujuran seorang pemimpin bisa saja ditakuti oleh bawahannya, namun tidak akan disegani. Pemimpin yang jujur akan memberikan tauladan bagi para bawahan. Kedua, Integritas. Bagi seorang pemimpin, yang paling penting adalah integritas, yakni tidak bersikap berpura-pura, konsisten antara perkataan dan perbuatan. Integritas bukan menunjukkan apa yang dilakukan, akan tetapi lebih kepada jati dirinya. Anak buah atau bawahan bila melihat pemimpinnya konsisten dalam perkataan dan tindakannya, maka mereka akan menunjukkan loyalitasnya.

Selanjutnya, ketiga spiritualitas. Ketaatan dalam melaksanakan ajaran agama yang dianut, menunjukkan kualitas akhlak dan keimanan yang kuat, sehingga mampu mengendalikan diri untuk tidak melakukan perbuatan tercela. Keempat, Militansi. Seorang pemimpin harus memiliki keunggulan moral, sikap pantang menyerah, serta dapat diterima oleh masyarakat, sehingga mampu menjawab setiap embanan tugas.

Seorang pemimpin tidak boleh putus asa dalam menghadapi segala permasalahan yang dihadapi. Pemimpin tidak boleh banyak mengeluh dan menyalahkan keadaan, justru sebaliknya harus kreatif, mampu menjadikan keterbatasan dan kendala sebagai peluang dan pendorong semangat untuk berbuat yang terbaik. Pemimpin harus berani mengambil keputusan, dengan perhitungan yang cermat, tidak boleh ragu dan takut bertindak.

UPAYA PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN KOMPONEN CADANGAN GUNA MENDUKUNG SISTEM PERTAHANAN DAN KEAMANAN RAKYAT SEMESTA



Pendahuluan

Menurut Kurt M. Cambell dan Michael E. O'Hanlon dalam bukunya: " Hard Power-The New Politics of National Security ", yang terbit tahun 2006 menjelaskan bahwa dampak dari globalisasi akan membentuk beberapa ancaman terhadap timbulnya konflik yang terjadi antar satu Negara dengan Negara lain dalam bentuk *hard power* yang akan mempengaruhi keamanan nasional suatu Negara.

Beberapa ancaman nyata ada 3 (tiga) hal yang dihadapi oleh suatu Negara yang berpotensi menimbulkan konflik antar Negara, meliputi: kelangkaan energi, pengaruh atau perubahan iklim global dan bentuk ancaman terror, disamping bentuk ancaman lain seperti; bencana alam, peledakan jumlah penduduk, pencurian sumber daya alam, perdagangan manusia, pelanggaran terhadap wilayah perbatasan hingga munculnya pandemik penyakit baru seperti virus corona yang saat ini menjadi perbincangan dunia internasional.

Ancaman-ancaman tersebut tentunya berdampak kepada kedaulatan Negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Keadaan ini menuntut setiap Negara harus memiliki strategi dalam menyikapi dan menghadapi segala bentuk ancaman yang terjadi.

Strategi dalam rangka menghadapi ancaman, baik ancaman militer, ancaman hibrida dan ancaman non-militer yang dapat membahayakan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa sangat penting. Strategi yang digunakan dalam menghadapi ancaman adalah strategi pertahanan negara yang bersifat semesta sesuai dengan amanat dalam UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 1 ayat 2: " sistem pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga Negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman ".

Kesemestaan dalam sistem pertahanan Negara memiliki pengertian bahwa seluruh warga Negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya terikat kedalam proses transformatif dalam sistem pertahanan Negara yang bersifat semesta. Proses transformatif terhadap warga Negara melalui hak dan kewajiban warga Negara Indonesia menjadi anggota Komponen Cadangan yang merupakan bentuk dari implementasi dari kesadaran Bela Negara.

Keikutsertaan warga Negara dalam usaha Bela Negara diselenggarakan melalui: pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi, sebagaimana amanat UU RI Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) Pasal 6 ayat (2). Anggota Komponen Cadangan yang dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib sesuai dengan amanat perundang-undangan yang berlaku.

Namun dalam proses rekrutmen terhadap anggota Komponen Cadangan masih bersifat sukarela sesuai amanat UU RI Nomor 23 Tahun 2019 tentang PSDN Pasal 28 ayat (2) yang mengamanatkan bahwa: "Komponen Cadangan merupakan pengabdian dalam usaha pertahanan Negara yang bersifat sukarela ". Pembentukan anggota Komponen Cadangan dalam jangka pendek adalah untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama dalam menghadapi ancaman bersenjata atau perang yang diselenggarakan melalui mobilisasi.

Sehingga upaya pembentukan anggota Komponen Cadangan oleh pemerintah secara yuridis-formalnya sudah terpenuhi. Namun di era demokrasi ini, pembentukan anggota Komponen Cadangan menimbulkan pendapat yang berbeda antara yang mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan Komponen Cadangan dan pendapat yang bertentangan dengan upaya pemerintah. Pendapat yang bertentangan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan Komponen Cadangan bahwa: Pertama, upaya pemerintah dalam membentuk anggota Komponen Cadangan akan mempengaruhi anggaran Negara; Kedua, kemungkinan terjadinya konflik bersenjata atau perang kecil kemungkinan terjadi; dan Ketiga, rekrutmen terhadap anggota Komponen Cadangan diselenggarakan secara wajib. Sedangkan pendapat yang mendukung pemerintah dalam upaya membentuk anggota Komponen Cadangan adalah bahwa kekuatan militer atau postur TNI saat ini sangat memerlukan sumber daya nasional untuk

mendukung kekuatan dan kemampuan militer dalam menghadapi segala bentuk ancaman, baik ancaman militer, ancaman hibrida maupun ancaman non-militer yang dapat membahayakan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa.

Dari latar belakang terhadap upaya pemerintah dalam mewujudkan Komponen Cadangan, maka dapat diambil identifikasi masalah sebagai berikut: Pertama, munculnya militarism phobia di masyarakat yang mengartikan bahwa pembentukkan anggota Komponen Cadangan identik dengan menjadikan militer secara wajib; Kedua, bahwa pembentukkan anggota Komponen Cadangan telah terpenuhi secara yuridis-formal, namun belum ada peraturan pemerintah (PP) yang merupakan penjabaran dan turunan dari UU RI Nomor 23 Tahun 2019 tentang PSDN terkait dengan pasal yang membahas Komponen Cadangan (pada pasal 28 s.d pasal 50); dan Ketiga, alokasi anggaran Negara dalam upaya pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan RI belum terpenuhi. Dengan demikian, maka dapat dirumuskan masalah dalam tulisan essay adalah sebagai berikut: " Bagaimana upaya pemerintah dalam mewujudkan Komponen Cadangan guna mendukung sistem pertahanan rakyat semesta ?".

Pembahasan

Tinjauan upaya Pemerintah mewujudkan anggota Komponen Cadangan.

a. Tinjauan Aspek Dokrin Pertahanan Negara. Sebagaimana tertuang dalam Permenhan RI Nomor 38 Tahun 2015 bahwa penyelenggaraan pertahanan Negara merupakan suatu usaha untuk membangun dan membina kemampuan serta menanggulangi berbagai ancaman. Dalam menghadapi ancaman militer pada sistem pertahanan Negara menempatkan TNI sebagai Komponen Utama didukung Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung. Sedangkan dalam menghadapi ancaman non-militer, menempatkan K/L diluar bidang pertahanan sebagai Komponen Utama dibantu oleh unsur kekuatan bangsa lainnya.

Pertahanan Negara Indonesia diselenggarakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Kesemestaan dalam sistem pertahanan Negara melibatkan seluruh warga Negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya dan sarana prasana nasional yang dipersiapkan secara dini oleh Pemerintah, serta diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Sistem pertahanan Negara yang bersifat semesta adalah merupakan perpaduan antara kekuatan militer dan kekuatan nirmiliter, melalui usaha membangun kekuatan dan kemampuan pertahanan yang disegani serta memiliki daya tangkal (*deterrence effect*) yang tinggi dalam menghadapi kemungkinan ancaman yang mungkin terjadi, baik ancaman militer, ancaman hibrida maupun ancaman non-militer.

Pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan Negara yang bersifat semesta diselenggarakan pada masa damai yang membutuhkan waktu lama dan pada masa perang yang dapat terjadi setiap saat. Berdasarkan Dokrin Pertahanan Negara tersebut, maka kebijakan dalam upaya pemerintah dalam mewujudkan anggota Komponen Cadangan adalah merupakan bagian dari sistem pertahanan Negara dalam kedudukannya sebagai subsistem dari sistem nasional untuk berkontribusi dalam rangka mewujudkan visi kebangsaan. Upaya pembentukan anggota Komponen Cadangan dalam sistem pertahanan Negara yang bersifat semesta digerakkan oleh kesadaran Bela Negara warga Negara. Keikutsertaan Warga Negara dalam usaha Bela Negara diselenggarakan melalui: pertama, pendidikan kewarganegaraan; kedua, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib; ketiga pengabdian sebagai prajurit TNI secara wajib dan sukarela; dan keempat, pengabdian sesuai dengan profesi.

Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib diberikan kepada warga Negara yang telah memenuhi persyaratan sebagai anggota

Komponen Cadangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Kesiapan warga Negara dalam membangun kekuatan dan kemampuan secara professional untuk mengangkat senjata, salah satunya adalah dengan menjadi anggota Komponen Cadangan yang juga merupakan pengejawantahan dalam hak dan kewajiban Bela Negara warga Negara sesuai dengan UUD RI 1945 Pasal 30 ayat (2).

Dengan terbitnya revisi terhadap Dokrin Pertahanan Negara Tahun 2015, segenap penyelenggara pemerintah dan khususnya penyelenggara pertahanan Negara maupun seluruh rakyat Indonesia hendaknya dapat menghayati dan mempedomani isinya untuk diwujudkan dalam pola pikir, pola sikap dan pola tindak dalam menjamin tegaknya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Dokrin Pertahanan Negara memiliki arti penting, yakni sebagai penuntun dalam pengelolaan sistem dan penyelenggaraan pertahanan Negara.

Pada tataran strategis, Dokrin Pertahanan Negara berfungsi untuk mewujudkan sistem pertahanan Negara yang bersifat semesta, baik pada masa damai maupun pada keadaan perang. Esensi dari Dokrin Pertahanan Negara adalah sebagai acuan bagi setiap penyelenggara pertahanan dalam mensinergikan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter secara terpadu, terarah dan berlanjut sebagai satu kesatuan pertahanan Negara yang utuh dan integral.

Pada masa damai, Dokrin Pertahanan Negara dijadikan pedoman bagi penyelenggara pertahanan untuk membangun kekuatan pertahanan Negara dalam kerangka kesiapsiagaan dan kekuatan penangkal yang mampu mencegah dan meniadakan setiap hakekat ancaman, baik yang berasal dari luar maupun ancaman yang terjadi di dalam negeri. Pada keadaan perang, Dokrin Pertahanan Negara digunakan sebagai pedoman dalam mendayagunakan segenap kekuatan nasional dalam upaya pertahanan negara guna menyelamatkan Negara dan bangsa dari ancaman yang sedang dihadapi (Dokrin Pertahanan Negara, hal 7).

Kondisi saat ini dengan dihadapkan dengan Doktrin Pertahanan Negara dalam upaya pemerintah guna mewujudkan anggota Komponen Cadangan, belum dapat dipahami secara menyeluruh oleh setiap warga Negara Indonesia terhadap perlunya unsur kekuatan bangsa yang dapat mendukung kekuatan militer dalam menghadapi ancaman militer yaitu Komponen Cadangan dalam rangka mendukung sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Sehingga diharapkan dengan adanya pemahaman yang menyeluruh terhadap pentingnya sistem pertahanan Negara yang bersifat semesta, maka setiap warga Negara Indonesia secara sadar memiliki kesadaran dalam upaya Bela Negara melalui keikutsertaannya sebagai anggota Komponen Cadangan.

b. Tinjauan Aspek Sejarah. Upaya Pemerintah dalam mewujudkan anggota Komponen Cadangan ditinjau dari aspek sejarah. Komponen Cadangan ditinjau dari sudut pandang sejarah diawali masa penjajahan Belanda. Pada perang dunia I Belanda membentuk wajib militer (Hulpleger) bagi kaum pribumi, tapi pada Tahun 1927 pembentukan wajib militer ditangguhkan, karena: tidak cukup dana; kekhawatiran pihak Belanda terhadap bumi putera untuk mengadakan perlawanan bersenjata; dan adanya pemunculan kekuatan militer Jepang di Asia Timur dan kekuatan militer Jerman untuk membalas kekuatan militer Negara-negara Eropa pada Tahun 1927. Dalam pembuatan UU dalam wajib militer yang dibentuk oleh Belanda berdasarkan kepada UU Defensif Grondslag yang bertujuan untuk: memantapkan kekuatan pertahanan; dan memperteguh kekuatan tempur yang dimiliki. Implementasi UU tersebut memiliki konsekuensi logis bagi bumi putera yang tergabung dalam kekuatan militer Belanda. Konsekuensi logis tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, bagi bumi putera yang dinyatakan lulus di jalur kekuatan pertahanan terikat masa dinas 1,5 tahun dan masa kerja 16 tahun; dan Kedua, bagi bumi putera yang dinyatakan lulus di jalur kekuatan tempur

terikat masa dinas 3 tahun dan bermasa cadangan selama 12 tahun. Wajib militer pada jaman penjajahan Belanda tergabung dalam KNIL (Koninklijke Nederlands Indiesche Leger). Peralihan kekuasaan penjajahan Belanda kepada Jepang terjadi pada Tahun 1942.

Jepang dalam hal ini lebih aktif untuk merekrut bumi putera ke dalam barisan militer. Barisan militer yang dibentuk oleh Jepang adalah sebagai berikut: PETA (Pembela Tanah Air) atau Gyugun merupakan kekuatan militer yang dibentuk sebagai angkatan darat, yang semula bernama " Pasukan Sukarela Pembela Tanah Djawa " ; Heiho dan Kaigun merupakan kekuatan militer bagian laut ; dan Rikugun dan Koku Butai bagian dari angkatan udara. Pembentukan kekuatan militer tersebut bertujuan untuk menghadapi serangan dari Negara sekutu. Pembentukan PETA oleh Jepang adalah merupakan latar belakang dalam pembentukan " Komponen Cadangan " bagi kekuatan militer Jepang.

Dalam menjaga dan mempersiapkan kewaspadaan rakyatnya, pemerintah melalui Dewan Pertahanan Negara (DPN) mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan DPN Nomor 13/1946 berisi kewajiban tiap-tiap warga Negara, baik laki maupun perempuan yang berusia 16 tahun sampai dengan 50 tahun turut serta mempertahankan tanah air dalam barisan cadangan (BARISAN). Pada saat terjadinya agresi Belanda II dibentuk pemerintah militer, secara spesifik dibentuk Kader Desa dan Kader Dukuh melalui Maklumat Markas Komando Djawa (MBKD) Nomor 2 MBKD tanggal 22 Desember 1948. Kader Desa dan Kader Dukuh ini secara terminologi sama dengan BARISAN. Dalam kharakteristik kemampuannya dalam melakukan taktik militer, sesungguhnya BARISAN sudah merepresentasikan Komponen Cadangan secara formal. Demikian juga dalam memobilisasi dari setiap kekuatan rakyat yang dibentuk dalam Kader Desa dan Kader Dusun maupun BARISAN kedalam pertempuran dengan pihak Belanda, MBKD mengeluarkan instruksi MBKD Nomor 11/MBKD/1949 tanggal 25 Januari 1949 yang mengatur

pembentukan Pasukan Gerilya Desa. Seperti halnya di Sumatera Barat pada tingkat kampung dibentuk Badan Pengawal Negeri dan Kota (BPNK) dengan tugas mendukung perbekalan dan logistik pasukan yang secara bergotong royong dikumpulkan dari rakyat. Sebagian anggota BPNK bergabung membentuk Pasukan Mobil Teras (PMT) dan aktif membantu tentara di medan tempur sebagai kurir untuk menyampaikan pesan-pesan penting. Dengan karakteristik struktur dan tugas Pasukan Gerilya Desa (Pager Desa), BPNK dan PMT secara substantif merupakan bentuk dari mobilisasi sesuai dengan instruksi MBKD yang merupakan bagian dari sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Budi Susilo Soepandji, 2010 dalam bukunya yang berjudul: " Bangga Indonesia menjadi Komponen Cadangan Tanah Air").

c. Tinjauan aspek Peraturan Perundang-undangan. Secara yuris-formal upaya pemerintah dalam mewujudkan anggota Komponen Cadangan ditinjau dari aspek perundang-undangan yang mendukung proses mewujudkan anggota Komponen Cadangan adalah sebagai berikut: pertama, UUD NRI 1945 Pasal 30 ayat (1) mengamanatkan bahwa: " Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan ", menjelaskan bahwa setiap warga Negara memiliki hak dan kewajiban melaksanakan upaya Bela Negara.

Untuk mewadahi hak dan kewajiban warga negara-nya dalam bela Negara dapat diselenggarakan secara lunak (soft) melalui pendidikan Bela Negara meliputi; menanamkan rasa kecintaan terhadap Tanah Air, menanamkan rasa disiplin, rela berkorban, rasa persatuan dan pantang menyerah yang dapat diberikan melalui seluruh lembaga pendidikan pada tingkat usia dini sampai dengan Perguruan Tinggi melalui kurikulum pendidikan sesuai dengan sistem pendidikan nasional, sedangkan secara keras (hard) dapat dilaksanakan melalui pengabdianya sebagai prajurit TNI, baik secara wajib maupun secara sukarela serta mengikuti pengabdian masuk kedalam keanggotaannya sebagai anggota

Komponen Cadangan melalui latihan pendidikan dasar kemiliteran.

Pada Pasal 30 ayat (2) mengamanatkan: " Usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung", menjelaskan bahwa strategi yang digunakan dalam usaha mewujudkan pertahanan dan keamanan diselenggarakan secara semesta. Kesemestaan dalam hal ini melibatkan setiap warga Negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya serta sarana prasana nasional yang di-transformasikan menjadi kekuatan pertahanan Negara dalam rangka menegakkan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dari segala bentuk ancaman, baik ancaman militer, hibrida dan ancaman non-militer; kedua, UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 1 ayat (2) mengamanatkan bahwa: " Sistem pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga Negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh Pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman ". Dalam sistem pertahanan Negara yang bersifat semesta itu dipersiapkan secara dini oleh Pemerintah seluruh warga Negara, wilayah, dan sumber daya nasional serta sarana prasarana untuk di-transformasi-kan menjadi kekuatan komponen pertahanan Negara, salah satunya adalah Komponen Cadangan.

Pelibatan warga Negara dalam Komponen Cadangan adalah merupakan penjabaran dari persiapan secara dini oleh pemerintah dalam kekuatan sistem pertahanan guna mewujudkan kembali jiwa patriotisme, dengan kesiapan dan keanggotaannya sebagai Komponen Cadangan menjadikan warga Negara memiliki kepekaan dan keterampilan untuk mengimplementasikan perilaku patriot (Budi Susilo Soepandji, 2010 dalam bukunya

yang berjudul: " Bangga Indonesia, Menjadi Komponen Cadangan Tanah Air."); ketiga, UU RI Nomor 34 Tahun 2002 tentang TNI Pasal 17 ayat (2) huruf a. mengamanatkan: " Tugas pokok TNI dilakukan melalui operasi militer untuk perang ". Definisi Komponen Cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar kekuatan dan kemampuan Komponen Utama.

Dalam situasi perang, penyiapan dan penggerahan segenap potensi bangsa adalah bersifat mutlak, dan kekuatan militer adalah salah satunya. Jika ternyata kekuatan militer masih dipenuhi kelemahan dalam pemenuhan Alutsista, maka pilihan yang diambil sambil terus melengkapi alutsista adalah besaran sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya nasional (SDN) lainnya serta sarana prasarana nasional dalam memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama melalui transformasi sumber daya nasional (SDN) yang dimiliki menjadi kekuatan pertahanan.

Dengan pemikiran tersebut, maka upaya pemerintah dalam mewujudkan anggota Komponen Cadangan adalah merupakan bagian penting dalam pembangunan kekuatan pertahanan Negara; dan keempat, UU RI Nomor 23 Tahun 2019 tentang PSDN untuk Pertahanan Negara. Dengan disahkannya undang-undang tersebut pada tanggal 24 Oktober 2019 oleh Presiden, maka UU RI Nomor 23 Tahun 2019 tentang PSDN adalah merupakan legalitas formal Kementerian Pertahanan RI dan TNI dalam upaya mewujudkan anggota Komponen Cadangan dalam rangka memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama dalam menghadapi ancaman militer yang dapat mengganggu kedaulatan Negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa.

Kondisi saat ini, dengan adanya peraturan perundang-undangan yang ada khususnya UU RI Nomor 23 Tahun 2019 tentang PSDN adalah merupakan legalitas formal hukum bagi pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan RI dalam rangka mewujudkan anggota Komponen Cadangan, namun pemahaman terhadap legalitas formal hukum

yang dimiliki belum dapat dipahami oleh warga Negara Indonesia dalam mendukung sistem pertahanan Negara yang bersifat semesta. Diharapkan dengan adanya UU tersebut, setiap warga Negara dengan kesadaran Bela Negaranya yang juga merupakan hak dan kewajiban dalam upaya mendukung pertahanan Negara untuk bergabung dalam keanggotaannya sebagai anggota Komponen Cadangan.

d. Tinjauan Aspek Kekuatan Militer. Upaya pembentukan anggota Komponen Cadangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ditinjau dari aspek kekuatan militer, dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut: pertama, dilihat dari kapasitas personil kekuatan militer (TNI), bahwa kapasitas dari personil TNI belum mencapai rasio minimal kuantitas dari satu persen jumlah dari populasi penduduk. Bila populasi jumlah penduduk Indonesia saat ini berjumlah 276 juta, maka satu persen dari jumlah populasi penduduk adalah 2,7 juta kuantitas personil kekuatan militer (TNI) harus dipenuhi. Namun dari data atau fakta, bahwa kekuatan personil TNI saat ini kurang lebih hanya 500 ribu personil kekuatan TNI. Dengan demikian, maka diperlukan upaya pemerintah dalam mewujudkan anggota Komponen Cadangan untuk mendukung perkuatan kekuatan dan kemampuan Komponen Utama dalam rangka menghadapi segala bentuk ancaman, yang diselenggarakan melalui mobilisasi; kedua, kekurangan pada aspek alat utama sistem persenjataan. Tidak hanya secara kuantitas saja, tapi juga secara kualitas alutsista yang dimiliki TNI saat ini, khususnya pada penyediaan persenjataan berat yang dapat digunakan untuk pemantauan, logistik maupun tempur (radar, pesawat pembom, pesawat angkut, tank, arteleri pertahanan, kapal selam, kapal perang, pesawat tempur, torpedo, rudal dan sebagainya); ketiga, ketidakmandirian dan ketidakmampuan industri pertahanan yang memproduksi alutsista bagi TNI. Kemampuan industri pertahanan yang dimiliki saat ini masih mandiri dalam produksi senjata ringan,

sebagian senjata sedang serta sedikit sekali untuk produksi senjata berat dan hampir seluruh senjata berat yang dimiliki oleh TNI masih didatangkan dari luar negeri.

Upaya pemerintah dalam mewujudkan anggota Komponen Cadangan bukan hanya meningkatkan man power saja dalam sistem pertahanan Negara, tetapi juga mewujudkan human capital yang akan membangun kesadaran setiap warga Negara tentang hak dan kewajiban dalam upaya Bela Negara, sehingga dengan terbangunnya kesadaran tentang hak dan kewajibannya dalam upaya Bela Negara akan berdampak kepada efek penangkalan (*deterrence effect*). Efek penangkalan sangat efektif dan strategis dalam menghadapi perang generasi ke-empat yang tidak mengenal medan pertempuran. Seperti yang dijelaskan oleh William S. Lind dalam bukunya yang berjudul “*The Changing Face of War ; Marine Corps Gazette*” yang terbit pada bulan Oktober 1989 bahwa bentuk perang generasi ke-empat atau The Fourth Generation of War adalah bentuk perang yang memanfaatkan kelemahan musuh untuk keuntungan taktis dan bentuk perang yang mendayagunakan non state actors untuk melakukan operasi rahasia, terror dan melaksanakan insurgensi tanpa mengenal medan pertempuran (*battlefield*).

Perang ini merupakan bentuk perang yang tersebar frontnya dan tanpa bentuk yang jelas serta terjadi pada seluruh aspek kehidupan bangsa (battlespace). Untuk menghadapi ancaman perang dari generasi ke-empat ini maka diperlukan strategi pertahanan Negara yaitu strategi pertahanan dan keamanan rakyat semesta dengan memberdayakan seluruh komponen pertahanan kekuatan militer dan kekuatan nirmiliter secara total, terarah, terpadu dan berlanjut.

Pembentukkan anggota Komponen Cadangan adalah merupakan bentuk dari momentum dan daya Bela Negara dalam rangka memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama guna menghadapi segala bentuk ancaman yang dapat membahayakan kedaulatan

Negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa yang diselenggarakan melalui mobilisasi. Jadi pembentukkan anggota Komponen Cadangan merupakan upaya pemerintah dalam

hal ini Kementerian Pertahanan RI dalam men-transformasi-kan warga Negara Indonesia menjadi combatan yang tergabung sebagai anggota Komponen Cadangan dalam rangka mendukung kekuatan dan kemampuan Komponen Utama.

Salah satu persyaratan yang mutlak yang harus dimiliki kekuatan militer dan anggota Komponen Cadangan adalah militansi yang tinggi dalam upaya Bela Negara guna menghadapi segala bentuk ancaman. Dengan demikian, diharapkan dengan adanya upaya pemerintah dalam mewujudkan anggota Komponen Cadangan akan berdampak sebagai berikut: pertama, militansi Bela Negara adalah merupakan media yang strategis untuk dapat menyebar di masyarakat; kedua, sumber daya kekuatan nirmiliter yang merupakan subbagian dari sistem pertahanan Negara harus dilibatkan secara terus menerus dan sistematis dalam upaya pertahanan Negara yang bersifat semesta; dan ketiga, dengan memiliki militansi Bela Negara akan berdampak kepada kewaspadaan dan efek tangkal terhadap setiap bentuk ancaman.

Adapun upaya dalam mewujudkan anggota Komponen Cadangan adalah sebagai berikut: Pertama, menyiapkan piranti lunak berupa perumusan dan penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) yang merupakan turunan dari UU RI Nomor 23 Tahun 2019 tentang PSDN untuk Pertahanan Negara terkait dengan Komponen Cadangan pada Pasal 28 sampai dengan Pasal 50 dan piranti keras berupa kesiapan lembaga pendidikan yang disiapkan untuk menyelenggarakan latihan dasar kemiliteran bagi warga Negara yang memenuhi persyaratan sebagai anggota Komponen Cadangan melalui kerjasama dan koordinasi dengan lembaga-lembaga pendidikan yang dimiliki oleh TNI; Kedua, melaksanakan koordinasi dan kerjasama antara Kementerian Pertahanan RI dengan K/L di luar bidang pertahanan negara untuk menyelenggarakan kegiatan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pertahanan Negara, tugas pokok TNI dan Komponen Cadangan, sehingga dalam kegiatan sosialisasi tersebut diharapkan mendapatkan pemahaman dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia tentang perlunya diwujudkan

kan anggota Komponen Cadangan dalam rangka mendukung kekuatan dan kemampuan Komponen Utama (TNI) guna menghadapi segala bentuk ancaman terutama ancaman yang bersifat ancaman militer; dan Ketiga, merumuskan dan mengalokasikan kebutuhan anggaran dalam upaya pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan RI dalam mewujudkan anggota Komponen Cadangan.

Penutup

a. Kesimpulan. Sistem Pertahanan Negara yang bersifat semesta merupakan perpaduan antara kekuatan militer dan kekuatan nirmiliter sebagai bentuk pengejawantahan dari bela Negara. Implementasi Bela Negara dilaksanakan dalam bentuk lunak (soft) dengan menanamkan rasa kebangsaan yang meliputi; cinta tanah air, disiplin, rela berkorban, rasa persatuan dan kesatuan yang harus dimiliki setiap warga Negara Indonesia, maupun dalam bentuk keras (hard) melalui pendidikan dasar kemiliteran bagi warga Negara yang telah memenuhi persyaratan menjadi anggota Komponen Cadangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saat ini Komponen Cadangan di Indonesia belum dapat diwujudkan karena terdapat pro dan kontra terhadap upaya pemerintah dalam mewujudkan Komponen Cadangan guna mendukung sistem pertahanan rakyat semesta.

Pro dan kontra terhadap upaya pemerintah tersebut di era demokrasi adalah hal yang wajar, maka dengan adanya latar belakang dan pembahasan sebelumnya dalam tulisan essay dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Pertama, pemahaman masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam mewujudkan anggota Komponen Cadangan adalah merupakan bentuk wajib militer bagi warga negara; Kedua, belum adanya peraturan perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang merupakan penjabaran dan turunan dari UU RI Nomor 23 Tahun 2019 tentang PSDN untuk kepentingan Pertahanan Negara terkait dengan Komponen Cadangan; dan Ketiga, kebutuhan dalam pembentukan anggota Komponen Cadangan memerlukan anggaran Negara yang besar.

b. Saran. Guna mewujudkan anggota Komponen Cadangan sebagai bagian dari

subsistem dari sistem pertahanan Negara rakyat semesta, maka kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sebagai perwakilan Pemerintah Pusat disarankan hal-hal sebagai berikut: Pertama, melaksanakan kegiatan sosialisasi maupun FGD dengan instansi pemerintahan atau K/L di luar bidang pertahanan, Dewan Perwakilan Rakyat pusat maupun daerah, akademisi dan Perguruan Tinggi serta masyarakat terkait dengan perlunya dibangun dan disiapkan kekuatan anggota Komponen Cadangan dalam rangka mendukung sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dihadapkan dengan perundangan-undangan yang telah disahkan. Kedua, Kementerian Pertahanan RI yang memiliki fungsi, peran dan tugas dalam merumuskan dan menyusun kebijakan bagi kepentingan pertahanan Negara dengan melaksanakan kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan berupa peraturan pemerintah (PP) yang merupakan penjabaran atau turunan dari UU RI nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, UU RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan UU RI Nomor 23 Tahun 2019 tentang PSDN sebagai bentuk yuridis-formal Kemhan dan TNI dalam membentuk anggota Komponen Cadangan guna mendukung sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta; Ketiga, memberdayakan dan menggunakan lembaga-lembaga pendidikan yang dimiliki TNI (AD,AL,AU) dalam menyiapkan dan menyelenggarakan pendidikan atau latihan dasar kemiliteran bagi warga Negara yang telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Komponen Cadangan; Keempat, merumuskan dan mengusulkan serta mengalokasikan kebutuhan anggaran yang dalam rangka mendukung upaya pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk membentuk anggota Komponen Cadangan; dan Kelima, dibentuknya kekuatan 100 Batalyon Komponen Cadangan.

KOLONEL INF RADEN IMMANUEL TJANDRA
M.S.E.,M.SI ADALAH ABITUREN AKMIL 1993 NRP
11930073721269 JABATAN BELIAU SEKARANG
SEBAGAI WIDYAI SWARA MADYA PUSJEMEN
BADIKLAT KEMHAN RI



Lt Kol Inf ZUSNAN HADI HUDAHA, S.I.P.

Pendahuluan

Dinamika kehidupan masyarakat modern saat ini menuntut setiap individu untuk siap bersaing dengan individu lainnya dalam setiap peluang profesi lapangan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tuntutan persaingan ini membawa dampak salah satunya adalah kecenderungan masyarakat bersifat individualis, sehingga toleransi dan kepekaan sosial masyarakat cenderung menurun. Akibatnya muncullah berbagai permasalahan sosial di masyarakat yang sebenarnya dapat diatasi dengan kebersamaan/gotong-royong dan memberdayakan berbagai potensi yang ada. Permasalahan sosial yang banyak dijumpai diantaranya adalah kemiskinan, kelaparan, putus sekolah, buta huruf, kekurangan sandang dan papan, dan sebagainya.

Dalam sistem pertahanan negara Indonesia yang menganut sistem pertahanan semesta menuntut adanya peran aktif seluruh komponen bangsa untuk turut mempertahankan negara dari setiap ancaman kedaulatan dan keutuhan bangsa. Untuk dapat mewujudkan peran aktif seluruh komponen bangsa tersebut maka diperlukan suatu metode persuasif dan perbuatan nyata yang dapat menggugah semangat nasionalisme masyarakat.

Oleh karenanya, perlu adanya suatu kondisi menyatunya jiwa dan semangat kebangsaan antara TNI dengan rakyat dalam usaha pertahanan negara. Menyikapi hal tersebut, TNI terpanggil untuk berkontribusi secara aktif dalam mengatasi permasalahan sosial di masyarakat diantaranya berupa pengentasan kemiskinan, pemberantasan buta huruf dan perbaikan/pembangunan sarana-prasarana umum sehingga kesejahteraan masyarakat dan kemanungan TNI dengan rakyat meningkat.

Upaya memperkokoh kemanungan TNI Rakyat sangat penting dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, membentengi rakyat dari pengaruh negatif dan merupakan syarat mutlak terwujudnya kekuatan pertahanan bangsa Indonesia. Dalam rangka mewujudkan kemanungan TNI Rakyat secara masif, TNI melaksanakan kegiatan serbuan teritorial. Kegiatan serbuan teritorial ini sangat strategis nilainya dihadapkan pada indikasi adanya upaya menghancurkan bangsa Indonesia melalui kekuatan fisik dan nonfisik yang dilaksanakan dari luar negeri maupun dalam negeri. Namun, harus disadari bahwa serbuan teritorial TNI yang dilaksanakan saat ini belum maksimal terlebih dengan adanya pandemi covid-19 sehingga perlu dioptimalkan dengan memberdayakan berbagai potensi yang ada.

Dalam melaksanakan kegiatan serbuan teritorial dibutuhkan keterpaduan antara TNI dengan semua komponen bangsa. TNI tergelar mulai dari kota sampai pelosok desa sehingga keberadaan TNI memang bersama di tengah-tengah rakyat. Dengan gelar satuan TNI dan komando kewilayahan TNI AD seperti saat ini tentu memudahkan prajurit untuk mengetahui dan memahami kondisi sosial masyarakat secara langsung. Dengan mengetahui kondisi sosial masyarakat maka akan memudahkan menentukan jenis kegiatan apa yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kemanungan TNI Rakyat melalui kegiatan serbuan teritorial. Selama ini kegiatan serbuan teritorial telah terlaksana dengan baik. Seluruh satuan TNI telah melaksanakan pembinaan teritorial sesuai wilayah binaannya. Pelaksanaan serbuan teritorial agar mencapai hasil yang maksimal maka perlu didukung anggaran yang memadai. Oleh karena itu serbuan teritorial dilaksanakan secara kerjasama dengan pihak lain yang memiliki dana maupun oleh satuan sendiri. Kerjasama dengan pihak lain dilaksanakan melalui beberapa MoU yang saat ini sudah berjalan. Demikian pula serbuan teritorial yang dilaksanakan secara mandiri/ swadaya satuan kepada masyarakat/ wilayah yang membutuhkan.

Tanpa mengesampingkan keunggulan berbagai kerja sama dengan pihak lain, perlu kiranya kita bahas bagaimana memaksimalkan serbuan teritorial satuan TNI yang dilaksanakan secara mandiri dengan didukung oleh dana dari internal satuan/ pihak sendiri. Meskipun pada saat pelaksanaannya dapat saja digabungkan dengan partisipasi pihak lain. Bagaimanakah cara melaksanakan serbuan teritorial yang didukung oleh dana pihak sendiri?

Pembahasan.

Untuk menjawab persoalan di atas maka kita perlu memberdayakan beberapa potensi yang ada di satuan jajaran TNI. Satuan jajaran TNI pada umumnya memiliki badan usaha seperti koperasi yang memiliki alokasi dana untuk kegiatan sosial baik untuk kepentingan anggota sendiri maupun untuk masyarakat.

Dana sosial koperasi tersebut dapat digunakan untuk kegiatan sosial dengan jenis sasaran kegiatan sesuai kesepakatan anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) koperasi.



Selain dana sosial dari koperasi, perlu kita bahas sumber dana lainnya dalam rangka serbuan teritorial di wilayah. Dalam pembahasan ini penulis mengambil pedoman dari pandangan agama Islam. Setiap prajurit dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada di satuan jajaran TNI memiliki penghasilan tetap setiap bulannya. Prajurit dan ASN yang beragama Islam memiliki kewajiban mengeluarkan zakat dari penghasilan rutin (*a'thoyat*) atau penghasilan atas hasil jenis zakat sekaligus (*Qiyas Shabah*) yaitu nisab dan saat pembayaran sama dengan zakat pertanian, sedangkan kadarnya sama dengan zakat emas. Zakat penghasilan wajib dikeluarkan saat penghasilan sudah mencapai nisab yaitu 653 kg gabah atau 520 kg beras atau setara Rp 4.680.000,- per bulan (asumsi harga beras Rp 9.000,- /kg (relatif)) dengan kadar 2,5 % dari penghasilan yang diterima, dibayarkan saat seseorang menerima penghasilan tersebut. Bisa juga setelah mempertimbangkan berbagai pengeluaran yang harus dibayarkan terlebih dulu. Atau mungkin pula seseorang tetap ingin mengeluarkan zakat penghasilan-nya setiap bulan meskipun penghasilan bulannya dibawah nilai di atas, itu semua tentu atas panggilan nurani berdasarkan keimanan masing-masing individu.

Potensi berikutnya adalah dana maupun barang/materi hasil pengumpulan infak, sedekah dan sumbangan sosial jajaran TNI (prajurit dan ASN). Seluruh potensi tersebut yang berasal dari personel yang beragama Islam dan umat beragama lainnya yang turut berpartisipasi tentu sangat luar biasa jumlah maupun bentuknya.



Dana dan materi inilah yang dapat digunakan sebagai pendanaan/ materi bahan kontak dalam serbuan teritorial sesuai kriteria penggunaannya untuk para mustahik (penerima zakat) dan sasaran sosial lainnya. Apabila zakat penghasilan, infaq, sedekah dan sumbangan sosial ini terkumpul di setiap satuan dan disalurkan melalui kegiatan serbuan teritorial satuan tersebut ataupun bersama satuan lain (gabungan) maka serbuan teritorial TNI akan terlaksana dengan lebih maksimal karena : Pertama, Memiliki dana dan bahan kontak serbuan teritorial sendiri yang mandiri yang selalu tetap ada setiap bulannya dan dimungkinkan bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah prajurit dan ASN yang memiliki kesadaran untuk mengeluarkan kewajiban zakat penghasilannya dan juga dari sumber dana tambahan lain dari prajurit dan ASN yaitu infak, sedekah dan sumbangan sosial yang tidak ditentukan bentuk atau besarannya.



Kedua, Prajurit TNI secara umum dan khususnya Satkowil lebih mengetahui kondisi nyata masyarakat di sekitar pangkalan maupun daerah binaannya sehingga penggunaan/ penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah serta sumbangan sosial akan lebih tepat sasaran. Ketiga, Kegiatan serbuan teritorial yang didanai/ bersumber dari zakat penghasilan, infaq, sedekah dan sumbangan sosial prajurit dan ASN akan memancing partisipasi pihak lain untuk turut membantu bersama-sama melaksanakan kegiatan sosial ke masyarakat.



Keempat, Secara psikologis akan lebih menyentuh hati masyarakat apabila masyarakat mengetahui bahwa kegiatan sosial di wilayahnya didanai/bersumber dari zakat penghasilan, infaq, sedekah dan sumbangan sosial prajurit dan ASN jajaran TNI yang berbeda-beda agama, sehingga makin memperkuat kerukunan antar umat beragama serta kemanunggalan TNI Rakyat.

Kelima, Prajurit akan lebih semangat melaksanakan serbuan teritorial karena turut memastikan penyaluran zakat penghasilan, infaq, sedekah dan sumbangan sosialnya digunakan tepat sasaran dan mengharapkan pahala lebih daripada sekedar mengeluarkan / menunaikan kewajiban zakat atau berderma tetapi juga turut menyalurkan langsung untuk mewujudkan dana tersebut kepada hal-hal yang berguna bagi masyarakat secara nyata.

Dalam kehidupan bernegara di Indonesia, zakat diatur melalui: 1). Undang- Undang nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 4 ayat (2), bahwa zakat penghasilan telah ditetapkan sebagai salah

satu sumber zakat. 2). Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2010 tentang zakat sebagai pengurang penghasilan bruto. 3). Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2014 tentang Optimalisasi pengumpulan zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal, Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional.

Covid-19 telah menimbulkan dampak ekonomi yang mengkhawatirkan dimana banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan atau sumber nafkah akibat pemutusan hubungan kerja dalam rangka efisiensi produksi ataupun penutupan usaha. Satuan jajaran TNI diharapkan memiliki kepekaan dan kepedulian mengatasi hal tersebut. Seskoad sebagai salah satu satuan jajaran TNI AD telah menggiatkan kepedulian sosial melalui program Jumat Berkah yang mewadahi partisipasi seluruh keluarga besar Seskoad untuk menolong masyarakat yang membutuhkan bantuan.

Di setiap unit kerja dalam lingkungan Seskoad setiap hari disediakan kotak amal untuk diisi sumbangan dana dan setiap hari Jumat dana yang terkumpul disalurkan kepada yang berhak. Serbuan teritorial satuan jajaran TNI dalam masa pandemi Covid 19 dilaksanakan melalui metode binter yaitu bakti TNI, pembinaan ketahanan wilayah dan komunikasi sosial. Penyaluran dana zakat penghasilan, infaq, sedekah dan sumbangan sosial dalam serbuan teritorial secara umum lebih tepat dilaksanakan melalui metode bakti TNI dan komunikasi sosial. Adapun bentuk sasarannya dapat berupa: 1). Bantuan habis pakai seperti pemberian sembako, pakaian dan dana santunan. 2). Bantuan barang/modal seperti pemberian modal usaha kecil, hewan ternak, bangunan sarana prasarana, kitab suci, buku buku, alat sekolah dan lain-lain. Pemberian bantuan habis pakai memang sangat bermanfaat namun kurang mendidik untuk mandiri. Pemberian bantuan barang/modal dinilai penting karena akan memberikan kemampuan untuk mandiri bagi penerima bantuan di masa mendatang.

Bukan memberi ikan, tapi memberi kail. Bantuan lainnya seperti pembangunan/rehab rumah/panti asuhan tidak layak huni, rumah ibadah dan sarana umum lainnya seperti perbaikan/pembangunan jalan, penerangan/listrik, pembangunan saluran air bersih, pembuatan sumur akan lebih bernilai jangka panjang baik dari segi manfaat maupun pahalanya (amal jariyah). Terdapat beberapa badan pengumpul zakat yang sudah cukup dikenal diantaranya BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan LAZIS (Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sodaqoh). Baznas umumnya digunakan oleh instansi pemerintah sedangkan Lazis oleh beberapa istansi dan umum.

Keduanya memiliki kelebihan dalam pengumpulan dan penyaluran dana zakatnya. Di daerah dikenal adanya BAZDA sebagai kepanjangan BAZNAS. Dana zakat dikumpulkan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yaitu instansi/ dinas yang ditetapkan sebagai UPZ. Penyaluran dana zakat juga harus melalui UPZ tersebut dan dalam lingkup wilayah BAZDA. Secara lebih jelas dapat dipahami dalam peraturan BAZNAS/ BAZDA. Sedangkan LAZIS merupakan lembaga pengumpul dana zakat, infaq dan sedekah yang lebih fleksibel dalam penyaluran dananya dimana tidak dibatasi menurut wilayah penyetor zakat.

Jadi bisa saja dana zakat, infaq dan sedekah prajurit dan ASN disalurkan kapanpun baik di dalam maupun di luar wilayah binaan satuan masing-masing berdasarkan laporan yang valid dari masyarakat atau prajurit/ASN kepada komandan satuan atau ketua LAZIS satuan. Untuk pengumpulan dana zakat infaq dan sedekah dalam LAZIS ini prinsipnya hampir sama dengan BAZNAS. Para prajurit dan ASN yang mau membayar zakat penghasilan harus mengajukan permohonan tertulis melalui surat kepada komandan satuan dan membuat surat pernyataan kesediaan membayar zakat penghasilan dengan cara dipotong langsung dari gaji bulanan setiap bulannya.

Hal ini untuk menjamin keamanan dan kelancaran dalam pengumpulan zakat penghasilan serta untuk mempermudah para

wajib zakat membayar zakat penghasilannya (otomatis terpotong dari gaji bulanan oleh juru bayar satuan selanjutnya ditransfer ke rekening zakat satuan). Sedangkan infak dan sedekah merupakan kerelaan individu yang tidak terikat waktu dan besarnya/jumlahnya yang dapat dipotong langsung dari gaji atau diserahkan tunai langsung oleh prajurit dan ASN kepada bendahara atau melalui komandan satuan bawah dan selanjutnya disetor ke rekening zakat satuan.

Pengumpulan zakat penghasilan di lingkungan TNI sudah ditekankan dan diatur berdasarkan:

- 1) Surat Edaran Panglima TNI Nomor SE / 6 / IX / 2014 tanggal 1 September 2014 tentang Pengumpulan Zakat Penghasilan anggota TNI dan PNS melalui Badan Amil Zakat Nasional.
- 2) Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST / 1052 / 2014 tanggal 11 September 2014 tentang Pemberitahuan Pemotongan Zakat 2,5 % dari penghasilan bruto bagi yang memenuhi nishab zakat.
- 3) Secara khusus di lingkungan TNI AD, KASAD telah mengeluarkan surat edaran yang mengatur ketentuan pembayaran zakat penghasilan dan penyalurannya melalui Surat Edaran Nomor: SE / 2 / III / 2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Pengumpulan Zakat Penghasilan di Lingkungan TNI AD melalui Badan Amil Zakat Nasional.

Dalam surat edaran tersebut dijelaskan ketentuan siapa saja yang termasuk wajib zakat, organisasi / pejabat pengumpul zakat, penanggung jawab, pengawas, sekretaris, bendahara, tim evaluasi, rekening zakat, mekanisme pengumpulan dan penyalurannya, dan lain-lain. Meski disebut wajib zakat namun dalam pelaksanaannya selalu mengedepankan himbauan dalam rangka menggugah kesadaran seluruh prajurit dan ASN untuk menunaikan kewajiban mengeluarkan zakat penghasilannya demi membantu pihak-pihak yang berhak menerima zakat. Sedangkan dana / materiil hasil infak, sedekah dan sumbangan sosial

dapat disalurkan dalam bentuk bantuan social berupa pemberian bantuan materi langsung maupun pembangunan sarana prasarana yang berguna bagi masyarakat. Alangkah dasyatnya apabila himbauan tersebut terlaksana di seluruh angkatan jajaran TNI, tentu akan lebih masif dampaknya bagi kesejahteraan rakyat dan kemanunggalan TNI Rakyat.

Kesimpulan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat penghasilan, infak, sedekah, sumbangan sosial dari prajurit dan ASN serta dana sosial koperasi satuan memiliki nilai strategis dalam penanganan permasalahan sosial di sekitar satuan, meningkatkan kerukunan antar umat beragama serta kemanunggalan TNI Rakyat dalam masa pandemi Covid -19.

Penulis berharap semoga kesadaran para wajib zakat semakin meningkat jumlahnya dan zakat penghasilan, infak, sedekah serta sumbangan sosial prajurit dan ASN jajaran TNI dapat terkumpul secara berkesinambungan dalam suatu wadah tertentu baik itu Badan Amil Zakat satuan, Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah satuan atau apapun nama badan sosial di satuan masing - masing dan disalurkan tepat sasaran di wilayah sehingga berbagai permasalahan sosial di lingkungan sekitar satuan / wilayah binaan dapat teratasi, kerukunan antar umat beragama dan kesatuan jiwa antara TNI dengan Rakyat makin kokoh.

Semoga tulisan ini makin menggugah kesadaran kita untuk menunaikan kewajiban mengeluarkan zakat dan berderma serta meningkatkan partisipasi seluruh elemen bangsa demi mengatasi permasalahan sosial di sekeliling kita dan lebih memperkokoh kerukunan antar umat beragama serta memperkokoh kemanunggalan TNI Rakyat.

LETKOL INF ZUSNAN HADI HUDAYA, S.I.P
ADALAH ABITUREN AKMIL 1997 DAN
LULUSAN SESKOAD 2012, SAAT INI
MENJABAT SEBAGAI DOSEN MUDA
SESKOAD.



MAYOR INF F.X RENOTEN YANUARIYANTO,S.A.P

Pendahuluan.

Periode antara Perang Dunia I (PD I) dan Perang Dunia II (PD II) dikenal sebagai sebuah masa yang penting bagi dunia, dimana pada masa ini bermunculan kekuatan-kekuatan baru di Eropa. Pada masa tersebut, dunia terutama di bagian benua Eropa mengalami krisis ekonomi hebat akibat PD I yang menyebabkan hancurnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam pembangunan. Kerugian yang sangat besar ini disebabkan sebagian besar perang yang berlangsung pada PD I terjadi di Eropa. Selain sarana dan prasarana hancur, perang ini mengakibatkan banyaknya korban jiwa serta tergoncangnya moral dan spiritual masyarakat Eropa¹. Kerugian yang dialami Eropa menjadi suatu bukti betapa besar dampak dari perpecahan antara kekuatan-kekuatan besar di Eropa terhadap berbagai aspek kehidupan.

Berakhirnya PD I ditandai dengan adanya Perjanjian Versailles. Perjanjian *Versailles* ini merupakan ajang perselisihan di antara negara-negara pemenang perang. Bagi pihak yang kalah perang, khususnya Jerman, memandang Perjanjian *Versailles* merupakan suatu perjanjian yang sangat menyakitkan.

Hal ini dikarenakan perjanjian ini adalah perjanjian yang didiktekan oleh negara-negara pemenang perang, bukan hasil perundingan².

Jerman memasuki periode di antara perang (interwar) dengan kondisi yang memalukan. Kondisi memalukan tersebut, selain dikarenakan kekalahan militer Jerman dalam PD I juga akibat lemahnya pemerintahan dalam menghadapi berbagai krisis setelah perang. Dengan ceroboh, pemerintahan ini mengeluarkan kebijakan yang berujung pada hiperinflasi di awal tahun 1920-an³. Pada November 1923 inflasi mencapai puncaknya dengan perbandingan satu US Dollar mampu membeli 4 triliun Mark.

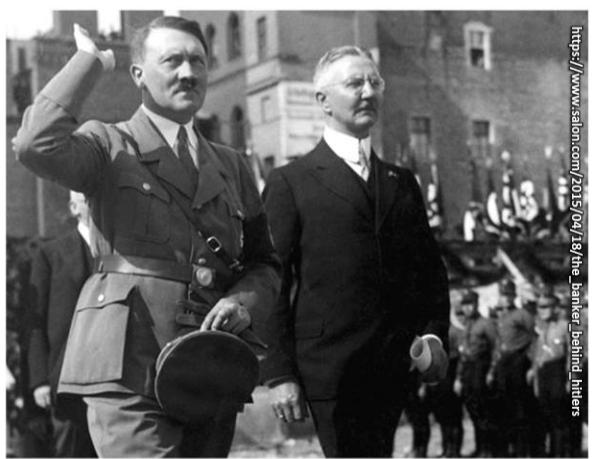
Belum teratasinya sepenuhnya krisis pada tahun 1923 tersebut, muncul krisis ekonomi dunia yang terkenal sebagai ‘Depresi Hebat’ dan melanda hampir seluruh bangsa di Eropa (kecuali Uni Soviet) dan Amerika Serikat. Krisis ini pada mulanya melanda bursa saham di New York. Dalam rangka menopang perekonomiannya sendiri, Amerika Serikat mengubah kebijakan pinjaman luar negerinya dan mulai menarik kembali berbagai pinjaman dan utang terhadap negara-negara lain. Dampak dari krisis ini terhadap Jerman tidak hanya berefek

¹ Pegg, C. H. *Contemporary Europe in World Focus*. (New York: Henry Holt and Company, 1956) h.3

² Julius Siboro. *Sejarah Eropa: Dari Masa Menjelang Perang Dunia Sampai Masa Antar Belum*. (Yogyakarta: Ombak, 2012) h. 85

³ Persson, K. G. (2010). *An Economic History of Europe; Knowledge, Institutions and Growth, 600 to the Present*. (New York: Cambridge University Press. 2010) h. 188

pada aspek ekonomi saja, namun juga terhadap situasi sosial dan politik.



Adolf Hitler and Hjalmar Schacht in Berlin, May 5, 1934

muncul sebagai penguasa. Selain peranannya dalam menanggulangi permasalahan ekonomi yang muncul pasca PD I dan dukungannya terhadap Nazi, kehadiran Schacht juga sangat menentukan kebijakan-kebijakan perekonomian yang akan dilaksana-kan di awal-awal kepemimpinan Hitler di Jerman sebagaimana yang sebelumnya telah diungkapkan oleh Shirer.

Berdasarkan hal tersebut, permasalahan utama dalam essay ini adalah “Bagaimana kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Hjalmar Schacht dalam membangun perekonomian Jerman tahun 1933-1939?”.

Pembahasan

Terlibatnya Hjalmar Schacht dalam perekonomian Jerman tidak lepas dari kondisi Eropa yang hancur akibat terjadinya PD I. Dampak yang disebabkan PD I ini menjadi titik tolak suatu perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Eropa.

Kerugian material dan nonmaterial menjadi permasalahan utama yang muncul sejak berakhirnya perang. Kekayaan negara yang telah lama berkembang, musnah, hutang-hutang melambung tinggi, produksi industri dan pertanian menurun drastis, hancurnya sebagian besar wilayah Perancis dan Belgia, investasi luar negeri berkurang secara drastis, serta perdagangan yang hancur berantakan⁵.

Dasar pemikiran Schacht dalam mengatasi perbaikan ekonomi Jerman ini dipengaruhi besar oleh teori ekonomi Keynes. Keterhubungan perbaikan ekonomi Jerman dan Keynes ini diungkapkan oleh Giatrakis (2012, hlm. 259) yang menyatakan bahwa secara historis, pemikiran Schacht dipengaruhi oleh dua pilar utama teori Keynes mengenai permasalahan reparasi dan permasalahan pengangguran.

Lebih lanjut Grein II menyatakan bahwa dalam mengatasi permasalahan ekonomi, peranan Pemerintah sangat diperlukan, terutama dalam mengeluarkan kebijakan anggaran defisit.⁵ Kebijakan anggaran defisit ini ditujukan untuk membuka lapangan pekerjaan

Krisis ini membuka jalan bagi *Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter Partei* (NSDAP) atau dikenal dengan nama NAZI yang dipimpin oleh Hitler untuk menguasai Jerman. Hitler sebagai salah satu pemegang kekuasaan besar di Jerman, menginginkan Jerman bangkit kembali dari keterpurukan ekonomi akibat krisis yang melanda semenjak PD I berakhir. Gagasan ekonomi Hitler ialah dengan menitikberatkan kepada tanggung jawab Pemerintah untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi kehidupannya dengan satu poin utama yakni menjamin ketersediaan makanan bagi masyarakat.

Dalam membangun kembali perekonomian Jerman yang sempat hancur akibat perang, Hitler menunjuk Hjalmar Schacht sebagai Menteri Ekonomi untuk mengatasi krisis tersebut. Selama ini anggapan berhasilnya Jerman dalam menghadapi berbagai krisis ekonomi yang terjadi pasca PD I karena adanya Hitler sebagai penguasa di Jerman.⁴ Padahal Hitler sendiri merupakan seseorang yang kurang peduli terhadap proses perekonomian Jerman dan khalayak umum kurang mengetahui adanya seseorang yang berperan penting, di balik kesuksesan Jerman mengatasi permasalahan-permasalahan ekonomi yang terjadi. Tokoh Schacht merupakan seseorang yang peranannya sangat penting dalam perekonomian Jerman semenjak Hitler

⁴ Ibid. h.81

⁵ Julius Siboro. Sejarah Eropa: Dari Masa Menjelang Perang Dunia Sampai Masa Antar Belum. (Yogyakarta: Ombak, 2012) h. 96-97

⁶ Treue, W. Germany since 1848. (Bonn: Inter Nations, 1969) h. 77

dan diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Lebih lanjut Grein II menyatakan bahwa Schacht juga terpengaruh kebijakan New Deal yang diusung oleh Roosevelt dan konsepsi dalam membangun suatu negara melalui projek konstruksi massa dan pekerjaan publik. Maka, dengan dijalankannya anggaran defisit ini bertujuan untuk membuka lapangan pekerjaan dapat mengatasi permasalahan reparasi dan pengangguran pasca krisis ekonomi yang melanda sejak berakhirnya PD I.

Pengaruh dari kebijakan New Deal terhadap Schacht ini terlihat dari kesamaan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dalam mengatasi depresi ekonomi. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Garraty yang menyatakan bahwa dalam mengatasi permasalahan ekonomi yang muncul, Nazi dan para pengusung kebijakan New Deal menerapkan suatu siasat yang sangat intensif dengan mendahului kesejahteraan perekonomian masyarakat mereka daripada menunggu perekonomian dunia kembali stabil dan memiliki pandangan yang optimis terhadap apa yang mampu dilakukan oleh Pemerintah. Kedua negara sangat membatasi kebebasan individu dalam meraih keuntungan ekonomis. Di samping itu, Nazi dan para pengusung kebijakan New Deal bersikeras bahwa perbaikan ekonomi tidak dapat dilakukan tanpa adanya usaha dalam menata kembali struktur sosial, lebih jauh tanpa menimbulkan suatu konflik antar kelas. Untuk menghindari konflik ini, kedua negara tersebut mengatur sedemikian rupa agar tercapai tujuan ekonomi dan sosialnya demi mencapai sasaran politiknya.⁷

Salah satu kebijakan Schacht dalam membangun kembali perekonomian Jerman ialah dengan mengurangi tingginya tingkat pengangguran. Tingginya angka pengangguran ini tidak lain merupakan dampak dari krisis ekonomi pada tahun 1930-an yang melanda dunia. Terjadinya peristiwa Wall Street Crash pada tahun 1929, membuat Amerika Serikat

menarik kembali investasi dan hutang-hutang luar negeri yang telah dikeluarkannya, terutama kepada Eropa. Ketergantungan perekonomian Jerman terhadap investasi asing dari Amerika Serikat membuat Jerman menjadi salah satu negara yang terkena dampak terparah dari krisis ini. Jerman dan negara-negara lainnya mulai terkena dampak dari krisis ini, salah satunya antara lain angka pengangguran yang melonjak tinggi. Krisis ini semakin memperburuk kelangsungan per-ekonomian Jerman yang belum pulih dari krisis ekonomi yang dialaminya selepas perang berakhir.

Di bulan Maret tahun 1932, angka pengangguran di Jerman mencapai puncaknya. Berdasarkan statistik, terdapat lebih dari 6 juta orang pengangguran.⁸ Pada bulan September 1933, telah dimulai suatu program untuk membangun Autobahnen atau jalan raya. Pembangunan jalan raya ini sekaligus menjadi suatu kebutuhan militer, dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap tumbuhnya perekonomian dari krisis ekonomi sebelumnya, bangkitnya optimisme bisnis, dan rendahnya tingkat rata-rata upah yang diperoleh dapat dipertimbangkan sebagai usaha dalam mengurangi jumlah pengangguran. Di penghujung tahun hanya terdapat 4 juta orang pengangguran yang tersisa jika dibandingkan dengan bulan Januari di tahun yang sama.⁹ Permasalahan pengangguran dapat teratas oleh Jerman.



Adolf Hitler and Hjalmar Schacht in Berlin, July 12, 1934

⁷ Holborn, H. A History of Modern Germany, 1840-1945 Volume 3. (New York: Alfred A Knopf Inc. 1969) h. 750-751

⁸ Carr, W. Arms, Autarky, and Aggression; A Study in German Foreign Policy, 1933-1939. (New York: Norton & Company, Inc. 1973) h.39

⁹ Jackson, R. H. Nazi Conspiracy and Aggression Volume II. (Washington: United States Government Printing Office. 1946) h. 744-745

Lalu demi memenuhi kebutuhan militer akan bahan-bahan baku industri perang, Schacht mengeluarkan suatu kebijakan baru. Pertama, ia mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan permanen pembayaran hutang untuk menghentikan mengalirnya komoditi perdagangan yang berharga sebagai pengganti hutang. Kedua, ia mengenalkan kebijakan *New Plan* yang memperluas dan memperkuat kontrol negara terhadap perdagangan luar negeri dan impor.

Di dalam kebijakan *New Plan* ini terdapat tiga fitur utama yang direncanakan Schacht, antara lain; (1) Larangan terhadap perdagangan luar negeri yang bertentangan dengan tujuan program pengembangan militer Jerman, (2) Ditingkatkannya persediaan barang-barang impor yang esensial atau dibutuhkan di dalam perdagangan luar negeri, (3) Dihapuskannya perjanjian-perjanjian yang dapat mengganggu hubungan antar negara di dalam perdagangan luar negeri. Di bawah kebijakan *New Plan*, transaksi ekonomi antara Jerman dan negara-negara lainnya tidak lagi diatur oleh mekanisme harga, namun ditentukan oleh banyaknya agensi Pemerintah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi militer Jerman.



Hjalmar Schacht

Penutup

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Hjalmar Schacht tidak semata-mata hanya untuk memperbaiki perekonomian saja, namun telah direncanakan sebelumnya bahwa aspek perekonomian juga harus dibangun beriringan dengan perkembangan politik dan militer Jerman.

Dampak yang dihasilkan terhadap perekonomian Jerman ialah teratasnya masalah pengangguran, dan diterapkannya kebijakan *The New Plan* yang mengubah sistem perdagangan antar negara menjadi sistem bilateral dalam rangka memenuhi kebutuhan makanan dan bahan-bahan baku keperluan perang.

Dengan diterapkannya *The New Plan* pada tahun 1934, perdagangan internasional yang dilakukan Jerman beralih ke negara-negara yang perkembangan industrinya lebih lambat daripada negara-negara Eropa lainnya, seperti negara-negara di Eropa Timur, Balkan, dan Amerika Latin. Selain dampak terhadap ekonomi, sosial, dan regional, kebijakan-kebijakan Schacht juga tentu saja berpengaruh terhadap perkembangan politik dan militer Jerman.

Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Schacht ini lebih kepada meletakkan pondasi dasar bagi Jerman dalam mengembangkan militer Jerman yang sempat disusutkan dalam Perjanjian Versailles.

Dari esai tersebut Lesson learned yang dapat diambil yaitu strategi yang digunakan oleh Schact sangat tepat, berani mengambil resiko yang sangat besar dan berhasil mengembalikan perekonomian Jerman melalui kebijakan-kebijakannya yang sangat bagus dan tepat.

**MAYOR INF F.X RENOTEN YANUARIYANTO,
S.A.P ADALAH ABITUREN AKMIL 2006 DAN
LULUSAN SESKOAD DIKREG LIX TA. 2020,
SAAT INI MENJABAT SEBAGAI WADANYON
31 GRUP 3 KOPASSUS.**



PREDIKSI INTERVENSI MILITER CHINA DI WILAYAH NATUNA

TIM KAJIAN SESKOAD BID. STUDI KAWASAN

Sumber:Google.com

"All warfare is based on deception"
Sun Tzu

Pendahuluan.

Kemungkinan terjadinya intervensi militer di wilayah Natuna dapat ditinjau dari beberapa landasan teori antara lain teori Konflik Karl Marx : *"Conflict theory is a theory that society is in a state of perpetual conflict because of competition for limited resources. Conflict theory holds that social order is maintained by domination and power (rather than consensus and conformity)"*.

Selain itu, penjelasan tentang Powell Doctrine dapat diperoleh dari seperangkat pertanyaan yang akan dijadikan dasar bagi penggunaan kekuatan militer dalam suatu formulasi grand strategy antara lain sebagai berikut: *Is a vital national security interest threatened?; Do we have a clear attainable objective?; Have the risks and costs been fully and frankly analyzed?; Have all other non-violent policy means been fully exhausted?; Is there a plausible exit strategy to avoid endless entanglement?; Have the consequences of our action been fully considered?; Is the action supported by the American people?; dan Do we have genuine broad international support?*

Fakta historis.

a. Krisis Selat Taiwan II (23 Agustus-22 September 1958).

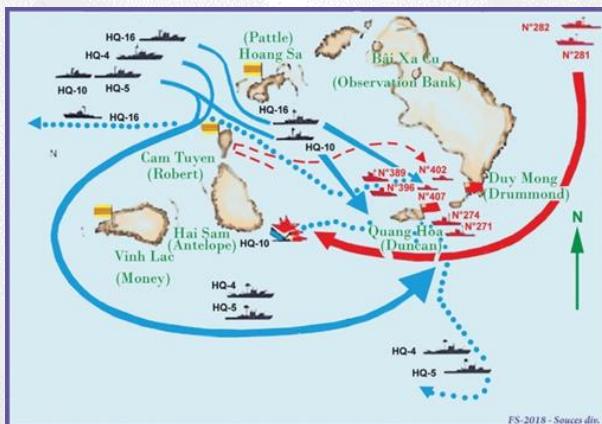
Dalam episode perebutan hegemoni Mainland China antara China Nasionalis Kuomintang dengan China Komunis Mao Tse Tung, terjadi upaya untuk menghancurkan kekuatan militer China Nasionalis melalui pelaksanaan operasi militer gabungan dengan tema reunifikasi China. Pelaksanaan kampanye militer China Komunis diawali dengan aksi bombardemen terhadap gelar pasukan China Nasionalis di Pulau Kinmen dan Kepulauan Matsu dilanjutkan dengan operasi amfibi untuk merebut dan menduduki wilayah tersebut untuk selanjutnya dijadikan springboard bagi tahapan operasi berikutnya, yaitu serbuan amfibi ke Pulau Formosa.



Visualisasi mandala
perang Krisis Selat Taiwan II

b. Battle of the Paracel islands 1974.

Pada tahun 1974, di tengah berkecamuknya Perang Vietnam, China melakukan aneksasi terhadap gugus Kepulauan Paracel yang pada saat itu diduduki oleh RVN (Republic of Vietnam Navy). Seiring dengan semakin gencarnya serangan NVA yang mengarah ke Ibukota Vietnam Selatan di Saigon, maka RVN memutuskan untuk mengurangi kekuatan yang mengamankan Kepulauan Paracel untuk direlokasi dalam pertahanan Ibukota. Serangan China diawali dengan serangan terhadap kapal patrol RVN dilanjutkan dengan serbuan amfibi untuk menghancurkan pasukan bertahan RVN dan menduduki Kepulauan Paracel secara fisik.



Visualisasi pertempuran
Kep Paracel antara RVN dengan PLAN

Hipotesis dan pertanyaan.

a. **Hipotesis.** Sikap politik China yang semakin agresif akan terus berlanjut dalam rangka menguasai wilayah laut, termasuk SDA yang terkandung di dalamnya, sebagai bagian dari tahap awal perebutan hegemoni China di wilayah LCS.

b. Pertanyaan.

1. Apakah China akan melakukan aneksasi secara militer terhadap Kepulauan Natuna dan sekitarnya dalam rangka memenuhi grand strategy hegemoni China di dunia?
2. Mengapa China harus atau perlu menguasai Kepulauan Natuna dan sekitarnya?
3. Bagaimana China akan melakukan aneksasi militer terhadap Kepulauan Natuna dan sekitarnya?

Pembahasan

a. Lingkup Global.

Dengan telah dilanggarnya berbagai keputusan International Court of Justice yang menengahi permasalahan klaim di wilayah Laut China Selatan, maka secara de facto China telah menjalankan strategi kolonialisasi melalui pendudukan paksa beberapa gugus Kepulauan antara lain Kep. Paracel dan Kep. Spratly untuk selanjutnya dimilitarisasi. Tidak adanya coercive power untuk melaksanakan amanat hukum ICJ menjadikan negara-negara yang mengajukan klaim ‘tidak percaya diri’ terhadap sistem hukum laut internasional dan merumuskan sendiri strategi militernya untuk menghadapi ekspansi China terhadap wilayah kedaulatannya.

Militarisasi Kep. Paracel dan Kep. Spratly merupakan intermediate target China dalam implementasi strategi anti access area denial (A2AD) guna menghindarkan terjadinya pertempuran di mainland China sebagaimana inline dengan strategi shock and awe Amerika Serikat dan sekutunya. China menjadikan pendudukan di Kep. Paracel dan Kep. Spratly sebagai buffer zone yang memaksa AS dan sekutunya untuk bertempur di wilayah lautan LCS serta mengupayakan buying time bagi penyiapan kemampuan proyeksi lanjutan melalui pengerahan Kapal Induk kelas Liaoning (saat ini masih sedang dalam tahapan *sea trial*).

Reunifikasi China Taiwan ke dalam bingkai kedaulatan RRC merupakan sasaran jarak dekat yang harus segera diwujudkan sebagaimana telah diamanatkan oleh Presiden China Xi Jinping dalam inaugurasi kemerdekaan China ke-70 pada tanggal 1 Oktober 2019 yang lalu. Indikasi-indikasi taktis menuju ke arah terjadinya aneksasi Taiwan sudah sangat jelas dan tinggal menunggu momentum pelaksanaan yang kemungkinan akan dilaksanakan melalui kampanye militer dengan pengerahan kekuatan modern.

b. Lingkup Regional.

Dengan telah siap operasionalnya militerisasi tiga Pulau utama di gugusan Kep. Spratly (Pulau Fiery Cross, Pulau Mischief dan

Pulau Subi) sejak pertengahan tahun 2017, maka China sudah mengamankan lambung selatan dari poros gerakan yang akan dilaksanakan ke arah utara untuk menduduki Pulau Formosa (China Taiwan) sekaligus Pulau Senkaku/Diaoyu (saat ini diduduki oleh Jepang) sebagai *follow-on* target.

<https://www.bing.com/images/formosa>



Pulau Formosa

Negara yang mengklaim Kep. Spratly (*Spratly claimant states*) yaitu Malaysia, Brunei, dan Filipina tidak dapat melakukan reprisal action secara militer karena secara ratio komparatif, kekuatan militernya tidak sebanding dengan China dan untuk menghindarkan dari terjadinya perang terbuka yang merugikan negara-negara tersebut. Atas dasar itulah, maka sikap politik ketiga negara tersebut cenderung *wait and see* terhadap dinamika yang terjadi di wilayah Utara dari LCS (menunggu terjadinya krisis Taiwan).

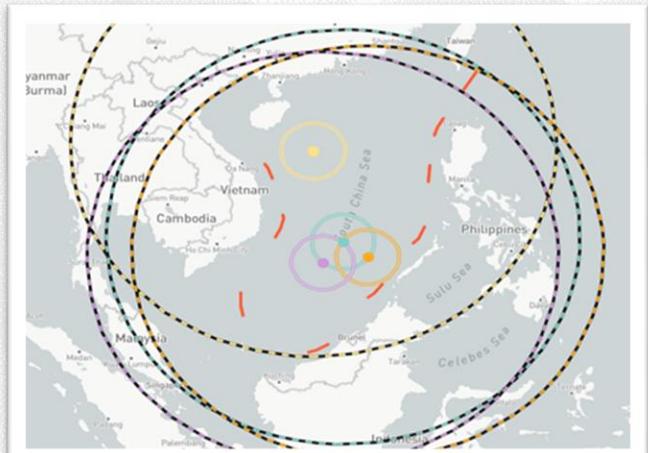
Kedudukan pangkalan militer China di Kep Spratly yang berjarak sekitar 700 km dari Pulau Natuna Besar masih berada dalam jangkauan efektif pesawat tempur China (baik jenis fighter J-11 maupun bomber H-6). Atas dasar itulah, maka opsi aneksasi militer terhadap Kep. Natuna dan sekitarnya adalah masuk akal dan dapat dilaksanakan berdasarkan sejarah konflik sebelumnya maupun kemampuan teknologi militer China saat ini.

Posisi tawar Indonesia di kawasan LCS sebagai salah satu non claimant states sudah menegaskan tentang tidak dibukanya peluang untuk renegosiasi terhadap perundingan batas wilayah terkait dengan klaim China dalam narasi nine dashed-lines, meskipun sebagian wilayah laut ZEE Indonesia juga dilanggar oleh line 3 dari klaim China tersebut. Atas dasar inilah, maka dapat diasumsikan bahwa Indonesia sudah tidak lagi bisa bersandar dengan mengatasnamakan ASEAN karena

sejak awal Indonesia sudah menyatakan diri bukan sebagai claimant state meskipun terdapat 4 negara ASEAN lainnya yang mengajukan klaim (Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Filipina).



Visualisasi antara jarak Kep. Natuna dengan pangkalan militer cina di kep Splatly



Aksi radius pesawat tempur dan pembom China apabila diproyeksikan dari Kep Spratly



Aksi radius pesawat tempur TNI AU apabila diproyeksikan menuju ke Kep Natuna

c. Lingkup Nasional.

Pembangunan pangkalan militer terintegrasi TNI di Kep Natuna sudah dilaksanakan sejak tahun 2017 hingga saat ini, termasuk adanya berbagai peningkatan fasilitas dan infrastruktur pertahanan

dihadapkan dengan proyeksi ancaman di LCS. Gelar kekuatan TNI yang sudah tergelar saat ini di Pulau Natuna Besar antara lain :

- 1) Yon Komposit Gardapati terdiri dari :
 - a) 2 Kompi Senapan.
 - b) 1 Rai Arhanud Rudal Starstreak. (point air defense).
 - c) 1 Rai Armed Roket ASTROS. (multiple rocket launcher system)
 - d) 1 Kompi Zipur.
 - e) 1 Kompi Markas.
- 2) Kodim 0318/Natuna terdiri dari 8 Koramil dan diawaki 170 personel yang tersebar di Kep. Natuna Besar, Kep. Anambas, P. Serasan, P. Midai, P. Laut
- 3) Satgas Pam Puter TNI di Pulau Sekatung terdiri dari 20 personel (10 orang Marinir dan 10 orang Yon Komposit)
- 4) Satrad 212 Natuna yang mengoperasikan Radar Webel dan radar Hanud pasif (sebelumnya menggunakan Radar Thomson).
- 5) Lanal Ranai yang mengoperasikan 1 KAL dan BKO KRI.
- 6) Lanud Raden Sajad
- 7) Satgas Marinir kekuatan 180 orang yang mengoperasikan roket RM 70 Vampire MLRS.

Penutup.

a. **Kesimpulan.** Guna menjawab pertanyaan yang diajukan, maka dapat diperoleh kesimpulan yang dihasilkan dari pendalaman masalah yang sudah dikemukakan antara lain sebagai berikut:

- 1) Kemungkinan munculnya ancaman militer China terhadap wilayah kedaulatan NKRI di Kep Natuna dan sekitarnya sudah sangat imminent dengan adanya intention and military capabilities yang sudah terbangun dan siap operasional di Kep Spratly. Momentum menuju terjadinya aneksasi militer terhadap wilayah NKRI dilakukan setelah kampanye militer dalam rangka reunifikasi Taiwan berhasil dilakukan dan sudah siapnya

armada Kapal Induk beserta pendukungnya sebagai force projection capability untuk melanjutkan ekspansi ke wilayah selatan LCS.

- 2) Pendudukan secara fisik terhadap Kep Natuna dan sekitarnya melalui aneksasi militer bertujuan untuk menguasai cadangan gas alam LNG yang ada di wilayah laut Kep Natuna. Hal ini akan dilakukan apabila Pemerintah RI tidak tunduk terhadap kemauan politik China untuk melakukan joint production LNG yang dimilikinya sehingga opsi militer harus ditempuh. Apabila opsi militer ditempuh, maka pendudukan Kep Natuna akan berlanjut terhadap penguasaan Kep. Anambas (sebelah barat Natuna) dan beberapa pulau kecil di sekitarnya karena memiliki proximity region sebagai buffer zone penguasaan teritorial China sekaligus pulau-pulau tersebut juga memiliki SDA energy dan perikanan yang melimpah.



Prediksi sasaran aneksasi militer China terhadap wilayah kedaulatan NKRI



Pengembangan kemampuan proyeksi PLAN dalam operasi amfibi ofensif

3) Kemungkinan mekanisme kampanye militer China terhadap wilayah Kep Natuna dan sekitarnya akan dilakukan melalui operasi Intelijen strategis (pendahuluan) dilanjutkan dengan bombardemen udara (dari arah Kep Spratly) dan blokade laut serta diakhiri dengan serbuan amfibi secara leapfrogging didukung dengan proyeksi Kapal Induk sebagai floating base terhadap proyeksi kekuatan ke arah Kepulauan Natuna dan Kep Anambas. Pendudukan akan dilakukan dengan cepat, massif, dan akurat (sesuai dengan catatan kampanye militer China di tahun 1958 dan 1974 serta pendudukan Kep Spratly) dengan disertai narasi historis LCS sebagai wilayah historis China. Sebagai negara Non Blok, maka Indonesia harus menghadapi aneksasi militer China secara berdiri sendiri sesuai kemampuan pertahanan yang dimilikinya.

b. Rekomendasi.

- 1) Memenuhi kelengkapan gelar kekuatan TNI AD yang saat ini sudah ada di Pulau Natuna dengan fasilitas pendukung dan infrastruktur pertahanan. Saat ini kesulitan utama dari penggerahan satuan TNI AD adalah minimnya ketersediaan BBM Solar Dex sebagai BBM Alutsista Roket ASTROS dan Rudal Starstreak. Disamping itu pula, hingga saat ini penggelaran Flight Helly Penerbad belum terealisasi sehingga gelar tidak memiliki kemampuan mobilitas udara. Belum siapnya fasilitas pergudangan munisi Roket ASTROS menjadi kendala tersendiri sehingga Alutsista yang saat ini tergelar tidak siap operasional.
- 2) Melakukan penyiapan integrasi kemampuan dengan gelar TNI AL dan TNI AU. Hingga saat ini, kekuatan gelar Alutsista TNI AU yang permanen masih belum ada karena dukungan pesawat tempur masih didatangkan dari Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru (*F16 block C*)

dan Lanud Soepadio, Pontianak (Hawk Mk 200). Kehadiran unsur KRI TNI AL masih bersifat rotasional dengan minimal menyiagakan 1 KRI jenis PKR (perusak kawal rudal) di Pulau Natuna dan 1 KAL untuk operasional rutin. Kehadiran Satgas Marinir dengan Alutsista Roket RM 70 Vampire dapat memperkuat daya tembak pertahanan Natuna.

- 3) Merencanakan dan menyiapkan gelar kekuatan TNI AD di Kep Anambas sebagai back up terhadap gelar kekuatan TNI AD di Natuna. Hal ini perlu disiapkan mengingat jarak antara Natuna dengan Anambas saling berdekatan dan dapat menopang pertahanan di Kep Natuna.
- 4) Alih Kodal gelar kekuatan di Kep. Natuna dari Kodam I/Bb kepada Kodam XII/Tpr. Apabila disimulasikan berdasarkan jarak jangkauan, maka letak geografis Kep Natuna dan beberapa Pulau kecil di sekitarnya lebih dekat jaraknya kepada wilayah tanggung jawab Kodam XII/Tpr. Demi kemudahan Kodal dan pembinaan, maka disarankan adanya alih Kodal sehingga penyiapan pertahanan dapat lebih berkesinambungan di masa yang akan datang.
- 5) Apabila operasi laut gabungan yang didukung dengan operasi udara gagal dalam membendung gerak maju Armada Kapal Induk China, maka operasi darat gabungan akan menjadi tulang punggung pertahanan Kep Natuna dalam melawan terjadinya kemungkinan aneksasi militer China melalui pendudukan secara fisik yang nantinya akan diawali dengan operasi bombardemen strategis dilanjutkan dengan operasi Amfibi secara pararel terhadap Kep Natuna dan Kep Anambas. Atas dasar itulah pentingnya penyiapan sejak awal dilakukan oleh TNI AD guna mengantisipasi worst case scenario yang dapat saja terjadi dalam waktu dekat di masa depan, terlepas apapun outcome yang nantinya akan diperoleh dari upaya pertahanan darat tersebut.

pengadaan, sedangkan untuk mempercepat pengadaan melalui KE dilaksanakan melalui G to G (*Government to Government*).

Diharapkan, dengan modernisasi alutsista, perubahan kebijakan militer, prioritas penempatan pasukan di wilayah timur Indonesia, tidak ada lagi aksi-aksi negara tetangga yang akan melecehkan bangsa ini. Termasuk Gerakan Papua Merdeka yang seolah terlindungi dengan keberadaan ribuan anggota pasukan marinir AS di Australia. Sehingga, OPM semakin berani mempublikasikan aksi-aksi mereka. Dalam pengadaan alutsista itu, agar prosedur pembelian dapat dipertanggungjawabkan, tidak menyimpang dan tidak mengalami kebocoran.

Pembangunan kekuatan TNI dilaksanakan atas dasar konsep pertahanan berbasis kemampuan (based defence capabilities), kekuatan dan gelar satuan sehingga pembangunan kekuatan TNI utamanya diarahkan agar dapat melaksanakan tugas pokoknya yaitu menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah darat dan menyelamatkan segenap Bangsa Indonesia yang dalam pelaksanaannya diarahkan kepada tercapainya kekuatan pokok minimum (Minimum Essential Force), dengan sasaran tingkat kekuatan yang cukup mampu menjamin kepentingan strategis pertahanan aspek darat.

Untuk dapat mewujudkan pembangunan kekuatan TNI, maka perlu adanya dukungan anggaran dari pemerintah guna tercapainya pemantapan satuan yang diharapkan dengan memiliki daya tangkal yang mampu mengatasi setiap bentuk ancaman yang mungkin timbul dalam kurun waktu lebih kurang lima sampai dua puluh tahun ke depan. Adapun modernisasi Alutsista yang diharapkan secara bertahap dilaksanakan penggantian dan pengadaan senjata yang baru sesuai dengan perkembangan teknologi dan melaksanakan pembentukan satuan baru di setiap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah perbatasan dengan negara lain, daerah rawan konflik, pulau-pulau terluar

serta seluruh wilayah sesuai dengan luas wilayah dan ancaman yang mungkin timbul baik dari dalam maupun dari luar.

Modernisasi dipandang sudah sangat mendesak, karena dengan meningkatnya intensitas dan eskalasi ancaman, akibat perkembangan lingkungan strategis, menuntut profesionalisme TNI dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Untuk dapat meningkatkan profesionalitas itu, prioritas kita antara lain adalah memenuhi dan melengkapi Alutsista TNI Angkatan Darat dengan peralatan modern, bukan dengan Alutsista yang sudah tua dan usang.



Penutup.

a. Anggaran Alutsista TNI AD. Menurut data yang dikeluarkan Kementerian Pertahanan RI bahwa tingginya kebutuhan akan anggaran dalam setiap tahunnya ternyata belum diikuti oleh keinginan (political will) pemerintah untuk memenuhinya. Kesenjangan antara keduanya terkadang mencapai 400 persen. Sejak tahun 2005 hingga 2010, usulan yang diajukan Dephan terus mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut tidaklah signifikan, terutama berkaitan dengan belanja alutsista TNI.

Namun di tengah-tengah minimnya anggaran tersebut, kita masih melihat bagaimana alokasi anggaran yang disusun belum mencerminkan kebutuhan utama dalam penyelenggaraan sistem pertahanan Indonesia dimana pembiayaan terhadap Koter (TNI AD) menyerap lebih dari 50% anggaran pertahanan.

Sementara itu pengadaan alutsista terutama kapal dan pesawat tempur bagi TNI AL dan TNI AU terkesan dikesampingkan, belum lagi berbagai praktik penggunaan anggaran yang tidak efisien dan korupsi yang masih terjadi di lingkungan internal TNI. Selain itu, ketiadaan dana dalam APBN tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan pembiayaan pembangunan pertahanan.

b. Perawatan dan Pemeliharaan Alutsista. Berdasarkan data yang dirilis oleh pihak Markas Besar Tentara Nasional Indonesia tahun 2010, 70% alutsista kita berada dalam kondisi yang sudah tua atau minimal berusia 20 tahun. Kendala lainnya ada pada pemeliharaan dan perawatan yang kadang kala terbentur pada ketersedian suku cadang walaupun anggarannya sudah ada dalam perencanaan. Bila pemeliharaan dan perawatan alutsista mengikuti sistem pemeliharaan yang telah ada maka resiko kemungkinan untuk penyusutan fungsi dapat ditekan seminimal mungkin. Kelangkaan suku cadang ini sangat bergantung pada negara pembuat alutsista sebagai penyedia tunggal yang banyak dipengaruhi oleh suhu politik. Selain masalah teknis dari perawatan dan pemeliharaan alutsista, juga terdapat masalah finansial. Masalah finansial biasanya bukan karena alokasi dana dari negara kurang memadai dengan kebutuhan dana untuk perawatan, akan tetapi masalah finansial itu dikarenakan penyelewengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang masih terjadi.

c. Peran Industri Dalam Negeri. Masalah pengadaan Alutsista TNI AD yaitu: 1) masalah anggaran yang terbatas, 2) masih ada yang bermain untuk mengambil keuntungan dari pengadaan Alutsista, yaitu broker, dari kalangan internal atau kalangan eksternal, 3) ketidakpahaman DPR terkait spesifikasi produk yang akan dibeli pemerintah, 4) masalah bagaimana politik Luar Negeri pemerintah terhadap negara lain, dan 5) masalah ancaman di kawasan. Maka dari itu diperlukan peranan industri pertahanan dalam negeri untuk memasok persenjataan TNI AD. Pengembangan industri pertahanan bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan kondisi alat

utama sistem persenjataan yang modern. Dalam rangka menciptakan kemandirian sekaligus memperkecil ketergantungan di bidang pertahanan terhadap negara lain, telah dilakukan pemberdayaan industri nasional melalui forum diskusi bidang industri pertahanan dan keamanan yang pesertanya terdiri atas institusi pertahanan, perguruan tinggi, serta pemerhati di bidang industri pertahanan.

d. Dampak Modernisasi Alutsista TNI AD. Adapun beberapa pertimbangan strategis pentingnya modernisasi Alutsista TNI AD antara lain, pertama untuk mewujudkan kekuatan dan kemampuan Pertahanan Negara yang memiliki perbandingan daya tempur strategis, baik skala teknologi militer maupun skala penangkalan. Kedua, merupakan perimbangan kekuatan strategis suatu negara yang memiliki prasyarat kekuatan politik-ekonomi dan pertahanan militer. Ketiga, realisasi Revolution in Military Affairs (RMA) bagi suatu negara termasuk Indonesia untuk mewujudkan kekuatan minimal (MEF) sebagai instrumen negara untuk melaksanakan fungsi negara berdasarkan keputusan politik.

Setelah mengetahui alasan modernisasi alutsista TNI AD, maka selanjutnya kita akan mengetahui akibat atau dampak modernisasi alutsista tersebut. Pertama, dengan semakin modernisasi alutsista TNI AD yaitu semakin kuatnya pertahanan Indonesia. Kedua, kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman (milter dan non milter) akan terjaga dan terlindungi. Ketiga, modernisasi alutsista dapat menaikkan posisi dan peran Indonesia di kawasan Asia Tenggara dan Internasional.

Saran. Peran pemerintah sebagai Policy Planners dan Investor perlu ditingkatkan untuk mencapai tujuan pemberdayaan industri nasional yang berbasis kompetensi yang melibatkan BUMN dan Industri swasta lainnya. Kebijakan domestic priority untuk pemenuhan kebutuhan Alutsista telah dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan untuk memberdayakan BUMN, disisi lain hal tersebut menimbulkan lambatnya inovasi dan efisiensi dari sistem industri nasional.

MASA DEPAN NEGARA REPUBLIK DEMOKRATIKA TIMOR LESTE (TINJAUAN DARI SEGI EKONOMI, POLITIK, DAN KEAMANAN)



MAYOR ARM NICOLAU PAULO DA SILVA

Pendahuluan

Negara Timor Leste secara resmi berdiri pada tanggal 20 Mei 2002 setelah mendapat pengakuan hukum dari dunia internasional dan memperoleh kemerdekaan setelah tiga tahun pelaksanaan jajak pendapat pada tahun 1999, yang dimenangkan oleh pihak pro-kemerdekaan. Pelaksanaan jajak pendapat yang diadakan oleh UNAMET (*United Nations Mission in East Timor*) untuk memutuskan masa depan Timor-Timur mendapat banyak sorotan dan protes dari pihak pro-otonomi karena dilakukan dengan kecurangan seperti pengangkatan staf berasal dari pihak pro-kemerdekaan. Fakta ini secara jelas menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan jajak pendapat di Timor Leste UNAMET dianggap gagal karena bekerja secara tidak profesional.

Di awal kemerdekaan Timor Leste mendapat dukungan dan bantuan luar biasa dari PBB maupun negara-negara pendonor yang dengan mudahnya membantu. Namun, seiring berjalannya waktu ekonomi Timor Leste mulai mengalami keguncangan akibat dari bantuan maupun sektor migas (minyak celah Timor) yang diharapkan tidak kunjung sesuai dengan yang diinginkan, dan adanya istilah bahwa ekonomi Timor Leste akan jatuh karena semua pembiayaan infrastruktur berasal dari China,

tingkat penganguran yang tinggi, minimnya lapangan kerja, sentral ekonomi hanya berada di ibu kota negara (Dili) dan sampai saat ini mata uang Timor Leste yang belum memiliki nilai sehingga dalam transaksi perdagangan menggunakan Dollar maupun Rupiah.

Bidang politik situasi perpolitikan di Timor Leste sangat tidak stabil yang mana partai-partai yang tadinya mendukung pemerintahan Perdana Menteri Taur Matan Ruak jelas tidak menunjukkan sikap mendukung pemerintah, hal ini dilakukan karena banyaknya korupsi yang dilakukan oleh pemimpin partai yang hanya memikirkan diri dan partainya tanpa memedulikan nasib rakyat yang dari hari ke hari semakin terhimpit oleh kondisi situasi yang ada, seperti pembahasan keuangan negara yang sampai saat ini tidak mendapat persetujuan dari parlemen.

Di bidang keamanan dalam negeri Timor Leste kurang menunjukkan kestabilan karena isu kedaerahan kelompok Lorosae dan Loromonu yang masih menghiasi kesenjangan dan tugas fungsi, wewenang tanggung jawab antara FDTL dan PNTL yang masih tumpang tindih. Timor Leste yang mayoritas beragama Katolik perlahan mulai meninggalkan budaya ketimuran karena penerapan kebebasan dalam peraturan yang telah memberikan kebebasan

bagi generasi muda tanpa memandang strata sosial yang memegang kuat adat-istiadat. Namun, setelah merdeka kebebasan ber-ekspresi yang telah kebablasan sehingga kontrol sosial dalam masyarakat sudah tidak efektif dan antara orang tua dan anak sudah tidak ada lagi batas kesopanan.

Akhir-akhir ini kita mendengar wacana atau isu bahwa Timor Leste ingin kembali menjadi bagian dari NKRI, hal ini dipicu dari situasi ekonomi, politik dan keamanan yang belum membaik. Ekonomi hanya terpusat di kota Dili sehingga masyarakat di pedesaan tidak dapat menjual hasil kebun, situasi ini berbeda di saat masih bergabung dengan NKRI, di bidang politik para elit politik masih mementingkan partai dan belum memperjuangkan hak warga masyarakat, sedangkan bidang keamanan masih terjadi gangguan sehingga aktivitas masyarakat di malam hari dibatasi.

2. Pembahasan.

Timor Leste telah menjadi negara berdaulat selama 18 tahun yang lalu, apabila dibandingkan dengan negara kita tentunya masih sangat jauh dari segala bidang. Suatu negara dikatakan dapat berdiri secara kokoh apabila situasi politik, keamanan, pertahanan dan ekonomi dalam negeri harus terlebih dahulu disiapkan secara matang karena hal ini menjadi pokok dan dasar bagi negara-negara yang merdeka. Apabila hal ini tidak tertangani dengan baik maka niscaya perjalanan pemerintahan akan mengalami pasang surut karena para elit politik semua ingin menunjukkan keberadaan dan pengakuan dari publik.

Setelah merdeka sampai saat ini Timor Leste telah mengalami berbagai situasi dalam negeri yang ditandai dengan perlawan yang dilakukan oleh Mayor Alfredo yang dengan tegas memprotes kepemimpinan pemerintahan Ramos Horta yang tidak berlaku adil terhadap kaum Loromonu (Distrik Ermera, Likuise, Maliana, Suai, Ainaru, Aileu, Dili, Same dan Oekusse). Hanya mengutamakan Lorosae (Distrik Lospalos, Viqueque, Baucau dan Manatuto) karena Lorosae dianggap paling berjasa dalam memperjuangkan kemerdekaan negara Timor Leste.



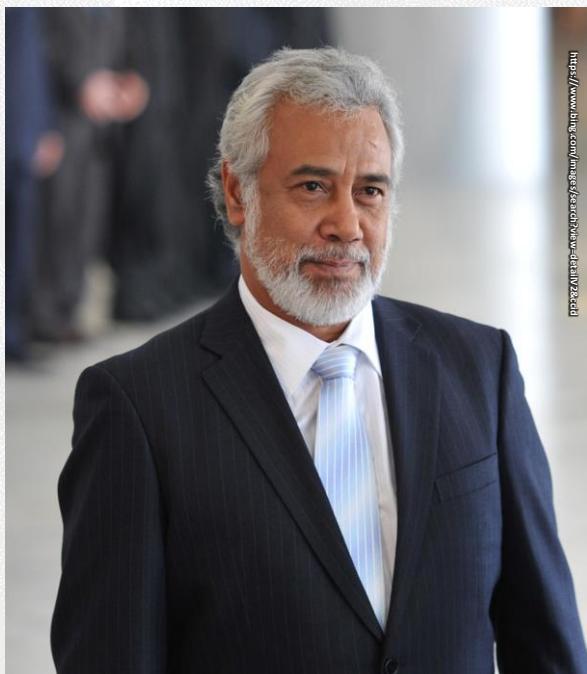
Mayor Alfredo

Partai yang berkuasa saat ini seperti partai FRETILIN (*Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente*) yang mendominasi parlemen pada Pemilihan tahun 2017 mendapat suara terbanyak di antara partai CNRT, Demokrat dan lain-lain. Walaupun menguasai parlemen, tetapi kinerja belum maksimal. Dalam suatu kesempatan Xanana menyampaikan bahwa jumlah dana permifyakan Timor Leste mencapai 18,4 miliar dolar AS yang ditabung di Bank New York, sesuai dengan laporan trisemester dari bank sentral Timor Leste. Untuk diketahui, bahwa perekonomian Timor Leste bergantung pada pengeluaran pemerintah yang diambil dari dana permifyakan. Apabila dana ini di keluarkan dan tidak dibarengi pemasukan dari pajak, pendapatan lainnya maka lama-kelamaan dana tersebut akan habis.

Sebagai seorang pendiri bangsa Xanana sering kali mengeluarkan pernyataan yang berseberangan dengan pemerintah karena menurut Xanana pengelolaan manajemen di dalam pemerintahan yang tidak kapabel sehingga kondisi perekonomian yang tidak semakin membaik dan mengarah kepada resesi. Hal ini juga dirasakan oleh seluruh dunia termasuk di Indonesia. Gejolak politik berkepanjangan di Dili sejauh ini dianggap bertanggung jawab menghambat pembangunan di Timor Leste. Korupsi yang merajalela juga mempersulit tugas pemerintah mengurangi angka kemiskinan.

Pada kesempatan lain Xanana Gusmao, tokoh penggerak kemerdekaan Timor Leste meminta kepada rakyatnya untuk segera pindah negara. Hal tersebut diakukan Xanana Gusmao karena dirinya merasa geram dengan

APBN negara tersebut yang dianggapnya berantakan. Xanana Gusmao yang merupakan salah satu motor penggerak kemerdekaan Timor Leste kala itu, tampaknya saat ini harus berjuang untuk menghadapi bangsanya sendiri. Hal ini merasa perlu dia lakukan demi memajukan Timor Leste jika tidak ingin rakyatnya hidup dalam kesengsaraan di masa depannya.



Xanana Gusmao

Menyadari akan situasi ekonomi dunia saat ini akibat pandemi Covid 19, dan keterbatasan sumber daya manusia, ekonomi, sarana-prasarana dan perlengkapan penunjang dalam penanganan Covid 19 menyebabkan pemerintahan negara Timor Leste mengambil langkah menutup negaranya dari kunjungan orang asing karena takut akan pandemi Covid 19, sehingga Timor Leste mampu mensterilkan negaranya dan menjadi salah satu negara di dunia yang dapat menekan penyebaran Covid 19. Kampanye untuk mencegah pandemi Covid 19 dapat dilaksanakan dengan tepat oleh negara Timor Leste sesuai dengan yang diharapkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) agar memprioritaskan kebersihan dengan membiasakan mencuci tangan, menjaga jarak di manapun berada dan melarang warganya untuk tidak melaksanakan kegiatan di luar rumah selama beberapa bulan belakangan ini, mampu diterapkan dengan baik.

Namun, di sisi lain keberhasilan ini tidak dapat diterapkan pada sektor ekonomi negara tersebut sehingga perekonomian negara Timor Leste lambat laun masuk dalam jurang kebangkrutan, dan roda perputaran ekonomi tidak dirasakan sampai ke pelosok-pelosok pedesaan, tetapi hanya terjadi di kota Dili sehingga warga masyarakat yang tinggal di pedesaan apabila ditanya masalah ekonomi lebih mengakui bahwa di zaman integrasi ekonomi di pedesaan lebih bergairah dan maju dibandingkan saat ini, hal ini sebagai salah satu pemicu sehingga mereka mengeluarkan keinginan untuk kembali bergabung dengan NKRI.

Ekonomi dunia diprediksi apabila sampai dengan tahun depan Pandemi Covid 19 belum dapat ditangani dengan baik maka situasi ekonomi global akan lebih memprihatinkan terutama negara-negara yang sampai saat ini hanya mengandalkan cadangan devisa negara salah satunya negara Timor Leste. Pertumbuhan ekonomi Timor Leste terbilang masih lambat dibandingkan negara-negara Asia Tenggara. Negara dengan nama resmi *República Democrática de Timor Leste* ini masih jadi salah satu negara paling miskin di dunia. Timor Leste berada di peringkat 152 negara sebagai negara termiskin di dunia dari 162 negara. Sejumlah sektor ekonomi Timor Leste sebenarnya masih sangat bergantung pada Australia dan Indonesia, terutama barang-barang impor.



Menurut Bank Dunia, pertumbuhan investasi swasta di Timor Leste itu masih saja melempem dari tahun ke tahun pasca-merdeka, ini terkait dengan stabilitas politik

dan ekonomi di negara itu yang masih bergejolak. Di sisi lain, konsumsi rumah tangga terus mengalami peningkatan. Meski investasi sektor privat yang masuk masih rendah, negara ini masih menikmati stabilitas ekonomi makro dan inflasi yang masih terkendali.

Apabila diteliti secara seksama dan informasi yang diperoleh dari berbagai informasi di Timor Leste bahwa di parlemen Timor Leste sering terjadi pertentangan bahkan bentrokan fisik antar sesama anggota dewan maupun dengan wakil dari pemerintahan akibat pembahasan tentang anggaran negara. Situasi ini timbul karena antara parlemen dan pemerintah saling menjatuhkan dan banyak intrik-intrik politik yang dijalankan oleh masing-masing partai yang ada di parlemen.



Warga Timor Leste Gelar Aksi Protes

Kekisruhan ini terjadi setelah Pemerintah Timor Leste menghadapi tantangan konstitusional dan parlemen tidak menyetujui anggaran negara. Hal ini merupakan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya setelah merdeka pada tahun 2020.

b. Upaya yang dilakukan.

1) Bidang Ekonomi.

Mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh negara Timor Leste sehingga upaya yang dilakukan adalah menggarap lahan pertanian yang dulu dikelola masyarakat pada saat masih bersama dengan Indonesia karena lahan-lahan yang tersebar di seluruh distrik/kabupaten tersebut sejak Timor Leste pisah dari Indonesia masyarakat

tidak pernah menggarap sawah dan ladangnya dengan alasan bahwa pada saat kampanye jajak pendapat yang dilakukan oleh pimpinan pro-kemerdekaan menyampaikan bahwa apabila Timor-Timur merdeka rakyat tidak perlu bekerja seperti sekarang karena semuanya akan disediakan oleh negara dari penghasilan minyak dan gas yang ada di laut celah Timor, dengan janji-janji tersebut rakyat yang ada di pelosok-pelosok daerah terhasut dan tidak memiliki keinginan untuk menggarap sawah maupun ladangnya.



Pertanian di Timor Leste

Pernyataan pimpinan prokemerdekaan tersebut sangat membekas dalam benak rakyat kecil khususnya orang tua yang sangat mudah dipengaruhi. Apabila lahan-lahan ini tidak segera dikelola dengan baik untuk mengurangi beban belanja negara maka pemerintahan sekarang akan terus mengimpor beras dari luar negeri seperti dari negara Vietnam dan Indonesia. Selain pertanian dan pariwisata pemerintah Timor Leste juga memperhatikan sumber daya kekayaan laut yang dinilai masih memiliki nilai yang strategis untuk menambah devisa negara.

Selain bidang pertanian, pariwisata dan perikanan yang perlu dibuka oleh pemerintahan Timor Leste juga harus menfokuskan diri pada pembangunan sumber daya manusia. Karena segala aspek yang akan dibangun namun SDM tidak ditingkatkan maka hasilnya tidak akan signifikan, untuk memulai peningkatan SDM perlu adanya perubahan budaya karena budaya yang telah terbiasa dengan

hidup boros dan foya-foya dibarengi dengan budaya barat yang hidup bebas sehingga terbawa sampai saat ini.

Peningkatan sumber daya manusia sangat mendesak untuk dilakukan. Ini relevan dengan teori SDM yang disampaikan oleh M.T.E. Hariandja (2002) berpendapat bahwa Sumber Daya Manusia adalah salah satu faktor yang paling utama pada suatu perusahaan dilihat dari faktor-faktor lainnya selain modal usaha. Oleh karenanya, SDM sangat diperlukan untuk dikelola dengan baik agar efektivitas dan efisiensi perusahaan semakin meningkat. Dengan kata lain SDM adalah kualitas usaha yang dilakukan seseorang dalam jangka waktu tertentu guna menghasilkan jasa atau barang. Sedangkan pengertian SDM yang kedua adalah dimana manusia mampu bekerja menghasilkan sebuah jasa atau barang dari usaha kerjanya tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan beragam kegiatan yang memiliki nilai ekonomis.



Tentara wanita Timor Leste

2) Bidang Politik.

Berdasarkan konstitusi yang dianut oleh negara Timor Leste yaitu menganut sistem semi presidensial yang terdiri dari Presiden yang menjadi kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan yang mengepalai kabinet dan menjalankan roda pemerintahan. Suhu politik di Timor Leste sangat dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai aspek, salah satunya yaitu ketidakpastian dukungan partai-partai pendukung pemerintahan dalam koalisi aliansi perubahan untuk kemajuan.

Akibat tidak mendapat dukungan dari partai pendukung menyebabkan Perdana Menteri mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Presiden. Namun, sampai akhirnya Presiden tidak menyetujui pengunduran diri tersebut. Suhu politik ini sangat mempengaruhi kondisi keamanan maupun ekonomi karena memunculkan banyak pertanyaan di antara para investor yang bertanya mengapa perdana menteri sampai ingin mengundurkan diri karena situasi ini menyebabkan goncangan di dalam pemerintahan.



Pesta Demokrasi (pemilu) di Timor Leste

Upaya agar situasi politik dalam negeri tetap kondusif dan tetap menjaga stabilitas maka upaya yang dilakukan oleh pemerintah Timor Leste agar lebih banyak mendengar masukan-masukan yang disampaikan oleh para mantan pemimpin dan merangkul semua partai yang berseberangan untuk mencari solusi yang terbaik demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan melepaskan semua egoisme individu dan kedaerahan yang hanya akan menambah permasalahan dan membuka jurang pemisah antar sesama orang Timor Leste. Situasi ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang hanya ingin membawa negara Timor Leste ke arah yang tidak baik.

3) Bidang keamanan.

Pengalaman yang pernah terjadi akibat situasi politik yang tidak kondusif sehingga berdampak pada situasi keamanan

sehingga pada saat itu presiden yang dijabat oleh Ramos Horta mendapat serangan dari kelompok bersenjata di bawah pimpinan Mayor Alfredo yang menyebabkan Alfredo tertembak di tempat kejadian.



Ramos Horta

Upaya yang dilakukan untuk mencegah hal yang sama di kemudian hari di masa yang akan datang adalah agar para pemimpin selalu melaksanakan pendekatan dengan hati nurani untuk mendengarkan setiap keluh kesah dari rakyatnya agar menghadapi situasi keamanan yang terjadi tidak melakukan kekerasan karena setiap permasalahan yang timbul di Timor Leste selalu diawali dari ketidakpuasaan kinerja pemerintah dalam memperlakukan rakyatnya. Kasus Mayor Alfredo bermula dari penempatan dan karier di tubuh FDTL (Angkatan perang Timor Leste) yang menganaktirikan prajurit FDTL yang asalnya dari Loromonu, sehingga timbul protes dan mogok kerja atau indisipliner dari prajurit FDTL Loromonu. Akibat dari ketidak patuhan tersebut pimpinan FDTL mengambil tindakan tegas memecat seluruh prajurit yang melanggar aturan yang ada dan mengambil tindakan tegas bagi yang masih tetap berseberangan.

Pada kenyataan tindakan yang diambil oleh pemerintah tersebut seharusnya tidak perlu terjadi karena bagaimanapun kelompok Alfredo juga memiliki andil dalam perjuangan Timor Leste menggapai kemerdekaan. Untuk itu agar kejadian tersebut tidak terulang kembali diharapkan pemerintah dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat maupun

terutama kepada aparat keamanannya agar senantiasa mencari solusi yang terbaik untuk diselesaikan demi terwujudnya keamanan di bumi Lorosae sesuai cita-cita mereka sebelum merdeka yaitu akan menciptakan kedamaian, kesejahteraan bagi seluruh warga Timor Leste bukan dengan mengorbankan sebagian rakyatnya yang tidak se-ide dan sejalan dengan pemerintahan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa apabila negara Timor Leste belum dapat keluar dari zona krisis ekonomi tersebut maka dapat dipastikan akan menjadi negara yang paling miskin di dunia karena pendapatan negara tidak ada dan tentunya berdampak pada bertambahnya angka pengangguran, yang berakibat meningkatnya kriminalitas.

Apabila sampai pada tahap ini kemungkinan besar seruan yang disampaikan oleh mantan presiden dan perdana menteri Xanana Gusmau akan terbukti yaitu beliau menyampaikan agar warga negara Timor Leste masing-masing memilih pindah warga negara karena pemerintahan tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan di bidang politik dan keamanan sampai saat ini juga masih terjadi perbedaan pendapat antara partai politik Fretelin dan CNRT yang masing-masing mengklaim dirinya sebagai yang paling benar di dalam melaksanakan amanat konstitusi negara, hal ini apabila berlarut-larut akan berdampak pada situasi politik dan keamanan dalam negeri yang tidak akan pernah kondusif dan dapat membuat masyarakat semakin tidak percaya kepada pemerintah dan parlemen akibat dari kedua partai saling memegang teguh pendirian masing-masing.

Untuk mencairkan situasi ini perlu adanya tokoh sentral seperti tokoh agama (Bapak Uskup) yang mampu menjalankan peran sebagai penengah yang dapat dijadikan panutan untuk bekerja demi masyarakat Timor Leste yang akhir-akhir ini kehilangan arah.

Mayor Arm Nicolau P. Da Silva, S.E., M.I.Pol, adalah Abituren Semapa PK 2000. Saat ini menjabat Pabandamin Strakamwiltasra Bid-jianbang Sdirjianbang Seskoad



MODERNISASI MATERIIL SATUAN TNI AD DALAM MENINGKATKAN KUALITAS DAN OPERASIONAL SATUAN

LETKOL CPL SYAIFUL BAHRI, S.T.

Sumber:Google.com

Pendahuluan.

Pembangunan kekuatan TNI AD dilaksanakan atas dasar konsep pertahanan berbasis kemampuan (based defence capabilities), kekuatan, dan gelar satuan sehingga pembangunan kekuatan TNI AD utamanya diarahkan agar dapat melaksanakan tugas pokoknya yaitu menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah darat, dan menyelamatkan segenap bangsa Indonesia yang dalam pelaksanaannya diarahkan kepada tercapainya kekuatan pokok minimum (Minimum Essential Force), dengan sasaran tingkat kekuatan yang cukup mampu menjamin kepentingan strategis pertahanan aspek darat.

Sejumlah keterbatasan yang dihadapi dalam pembangunan kekuatan pertahanan dan ancaman militer akan semakin jarang terjadi di depan, Indonesia perlu terus meningkatkan kemampuan pertahanan militer baik di darat, laut, maupun udara untuk memberikan jaminan keamanan nasional. Pembangunan pertahanan saat ini belum dapat mewujudkan postur pertahanan yang kuat dan disegani dilihat dari jumlah dan kualitas peralatan militer/alutsista yang dimiliki. Kondisi peralatan pertahanan saat ini sangat memprihatinkan baik dari segi usia maupun kecanggihan teknologi.

Alutsista yang dimiliki TNI rata-rata berusia lebih dari 20 tahun.Untuk kesiapan operasional alutsista dilakukan dengan repowering/retrofit dan dilakukan pembelian baru kalau dinilai sangat men-desak/dibutuhkan.

Perkembangan teknologi pertahanan Indonesia saat ini jauh ketinggalan bila dibandingkan dengan perkembangan teknologi militer dari negara-negara lain yang maju pesat dan dapat menciptakan sistem senjata baru yang memiliki daya rusak dan daya jangkau yang lebih besar dan lebih jauh serta lebih akurat. Sedangkan kebutuhan pemenuhan pemeliharaan, pengoperasian, maupun suku cadang alutsista masih bergantung pada negara-negara lain.

Dari aspek profesionalisme, kualitas sumber daya manusia dan tingkat kesejahteraan prajurit belum memenuhi kebutuhan yang diharapkan.Oleh karena itu, kondisi kekuatan pertahanan Indonesia saat ini jauh di bawah kebutuhan pokok, bahkan di bawah kekuatan pokok minimal (*Minimum Essential Force*) sekalipun.

Modernisasi dipandang sudah sangat mendesak, karena dengan meningkatnya intensitas dan eskalasi ancaman, akibat perkembangan lingkungan strategis, menuntut profesionalisme TNI Angkatan Darat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Untuk dapat meningkatkan profesionalitas itu, prioritas kita antara lain adalah memenuhi dan melengkapi Alutsista TNI Angkatan Darat dengan peralatan modern, bukan dengan Alutsista yang sudah tua dan usang.



Pembahasan.

Alutsista sebuah negara berpengaruh terhadap pertahanan suatu negara, untuk melindungi wilayah negara diperlukan sistem persenjataan yang memadai untuk mencakup seluruh wilayah negara tersebut. Alutsista bahkan bisa berpengaruh terhadap kedudukan suatu negara dalam politik internasional. Namun, dalam proses pengadaan dan pemeliharaan alutsista di Indonesia, terdapat beberapa masalah kompleks dan berlarut-larut, mulai dari masalah anggaran yang tidak tersedia sampai dengan sistem pengadaan yang bermasalah. Modernisasi dipandang sudah sangat mendesak, karena dengan meningkatnya intensitas dan eskalasi ancaman, akibat perkembangan lingkungan strategis, menuntut profesionalisme TNI dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Untuk dapat meningkatkan profesionalitas itu, prioritas kita antara lain adalah memenuhi dan melengkapi Alutsista TNI Angkatan Darat dengan peralatan modern. Sejumlah BUMN Industri Strategis dilibatkan dan ditingkatkan produktivitasnya, seperti PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI), PT. Pindad, PT. PAL dan PT. LEN. Pembangunan MEF ini akan menjadi program yang berkelanjutan, menuju terwujudnya Postur Ideal TNI.

Adapun sasaran kegiatan pembinaan Alutsista TNI Angkatan Darat yang dilaksanakan adalah : Pemeliharaan Alutsista, guna meningkatkan kesiapan operasional

satuan yang akan melaksanakan tugas operasi maupun untuk mendukung pelaksanaan pendidikan dan latihan. Pengadaan Alutsista baru untuk mengisi satuan yang baru dibentuk, mengisi kekurangan yang ada maupun untuk mengganti Alutsista yang sudah tidak layak operasional. Mempertahankan kekuatan Alutsista yang ada dengan melaksanakan repowering maupun retrofitting Alutsista serta pengadaan suku cadang guna meningkatkan kesiapan operasional.

Mencermati kondisi Alutsista saat ini, dihadapkan dengan sasaran pembinaan Alutsista TNI Angkatan Darat, Kebijakan Pembinaan Alutsista TNI Angkatan Darat ke depan adalah :Pertama pengadaan Alutsista dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia baik pada PPPA TNI Angkatan Darat maupun dana Kredit Export (KE). Hal ini berpedoman kepada rencana pembangunan kekuatan TNI Angkatan Darat jangka panjang (Postur TNI Angkatan Darat) dan jangka sedang/menengah (Renstra TNI Angkatan Darat). Kedua prioritas pengadaan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan satuan yang baru dibentuk dan mengganti materiil yang sudah tidak layak operasi.Mengingat terbatasnya anggaran yang tersedia, maka pengadaan diprioritaskan pada materiil yang sangat dibutuhkan untuk operasional satuan dan memenuhi kebutuhan minimal satuan sehingga masih memungkinkan untuk mendukung tugas pokok satuan. Ketiga Terus melakukan usaha-usaha untuk mempertahankan kondisi Alutsista yang ada, termasuk Alutsista pengadaan lama, agar tetap dapat dimanfaatkan, antara lain melalui pemeliharaan dan perbaikan.

Kondisi saat ini.

Kondisi Alutsista yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat saat ini, pada umumnya sebagian besar adalah pengadaan lama, yang dibuat antara Tahun 1940 s.d 1986. Sebagian besar Alutsista ini suku cadangnya tidak tersedia dan bahkan pabrik pembuatnya sudah tidak memproduksi lagi.

Sedangkan Alutsista TNI Angkatan Darat yang termasuk kategori pengadaan baru adalah Alutsista TNI Angkatan Darat yang dibuat antara Tahun 1993 s.d 2007. Alutsista pengadaan baru ini secara umum kondisinya baik dan siap operasional, antara lain yaitu *Panser Panhard*, *Panser VAB-NG*, *Tank Scorpion-90*, *Stomer*, *Panser APR1 Vi* dan *Panser APS2 V1* (Untuk satuan Kavaleri), Pesawat Terbang *Britten Norman* dan Pesawat Terbang *Buffalo* (untuk Satuan Penerbad). Meriam Kal 155 mm (untuk Satuan Armed), Meriam Kal 23 Zurr Giant Bow dan Rudal Grom (untuk Satuan Arhanud), Helikopter MI-35 P dan Pesawat Terbang MI-17 V-5 (untuk Satuan Penerbad).



DHC-5 Buffalo

Tentu saja permasalahan saat ini dipengaruhi oleh faktor eksternal, antara lain adanya pengaruh globalisasi, perdagangan bebas dan faktor internal berupa situasi keamanan nasional, kondisi perekonomian negara, kebijakan nasional (pemerintah), penyelenggaraan pertahanan negara. Dalam penyelenggaraan pertahanan negara, kekuatan intinya adalah angkatan bersenjata atau militer. Di Indonesia dikenal dengan istilah TNI. Kekuatan militer sejak awal memang dipersiapkan untuk menghancurkan musuh dengan kekuatan senjata. Doktrin, strategi dan postur pertahanan seringkali harus menyesuaikan dengan tuntutan perubahan.

Peluang yang ada antara lain adanya tuntutan kebutuhan untuk membangun TNI AD yang profesional sehingga menjadi kekuatan nasional yang mampu mengembangkan fungsinya di era globalisasi dengan hakikat

ancaman yang semakin kompleks, semakin banyaknya komunitas materiil yang memiliki status laik dapat memberikan manfaat bagi para pembina materiil pusat atau kotama sebagai pengguna untuk dapat membantu mengidentifikasi dan menentukan tingkat kesiapan kondisi teknis materiil yang akan dipergunakan untuk tugas operasi, pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan alokasi anggaran di sektor pertahanan yang saat ini masih belum memadai dengan memodernisasi alutsista untuk menegakkan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Indonesia. Adapun yang menjadi kendala antara lain kekuatan TNI AD dihadapkan dengan alutsista masih terbatas dan masih tertinggal dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat sementara proses regenerasi alutsista berjalan lambat.

Minimnya alutsista menjadi kendala utama dalam menegakkan kedaulatan Negara, kekuatan personel di jajaran TNI AD masih menjadi kendala saat ini terutama dalam mengawaki alutsista yang ada di satuan TNI AD sehingga perlu pembinaan yang terus-menerus dalam mempelajari teknologi yang semakin modern, alokasi anggaran untuk kebutuhan alutsista TNI AD belum memadai dibandingkan dengan tugas pokok yang harus diemban dalam menegakkan kedaulatan negara dan menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kondisi yang Diharapkan adalah modernisasi Alutsista secara bertahap dilaksanakan penggantian dan pengadaan senjata yang baru sesuai dengan perkembangan teknologi dan melaksanakan pembentukan satuan baru di setiap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah perbatasan dengan negara lain, daerah rawan konflik, pulau-pulau terluar serta seluruh wilayah sesuai dengan luas wilayah dan ancaman yang mungkin timbul baik dari dalam maupun dari luar.

Kebijakan Pembinaan Alutsista TNI Angkatan Darat.

Untuk pengadaan alutsista ini, diharapkan dengan mengutamakan produksi dalam negeri

bekerjasama dengan BUMNIS, yang dilaksanakan secara bertahap dan berlanjut sesuai prioritas kebutuhan. Diharapkan salah satu kebijakan strategis yang saat ini sedang berjalan adalah Pemerintah akan membangun kekuatan pokok minimum TNI (MEF), baik melalui pengadaan dari luar negeri maupun melalui Revitalisasi Industri Pertahanan.

Modernisasi Alutsista TNI AD dilakukan Bertahap.

Dilaksanakan penggantian dan pengadaan senjata yang baru sesuai dengan perkembangan teknologi dan melaksanakan pembentukan satuan baru di setiap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah perbatasan dengan negara lain, daerah rawan konflik, pulau-pulau terluar serta seluruh wilayah sesuai dengan luas wilayah dan ancaman yang mungkin timbul baik dari dalam maupun dari luar.

Modernisasi dipandang sudah sangat mendesak, karena dengan meningkatnya intensitas dan eskalasi ancaman, akibat perkembangan lingkungan strategis, menuntut profesionalisme TNI dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Untuk dapat meningkatkan profesionalitas itu, prioritas kita antara lain adalah memenuhi dan melengkapi Alutsista TNI dengan peralatan modern, bukan dengan Alutsista yang sudah tua dan usang.

Alokasi Anggaran Alutsista TNI AD diharapkan Meningkat.

Diharapkan anggaran dari pemerintah untuk operasional pemeliharaan alutsista terus ditingkatkan. Masalah finansial biasanya bukan karena alokasi dana dari negara kurang memadai dengan kebutuhan dana untuk perawatan, akan tetapi masalah finansial itu dikarenakan penyelewengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atas tugas dan amanah yang telah didapatkannya dari rakyat.

Penyelewengan itu dapat berupa korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut. Penyelewengan dana alutsista yang tidak sesuai sasaran anggaran, berakibat semakin parahnya kondisi alutsista Indonesia.

Upaya Meningkatkan Kemampuan Alutsista TNI AD dalam rangka Memperkuat Pertahanan Negara.

Modernisasi Alutsista TNI Angkatan Darat dilakukan melalui kegiatan pengembangan Alutsista secara bertahap yang diarahkan pada pembaharuan dengan Alutsista pengadaan baru. Alutsista pengadaan lama yang tidak efektif untuk membangun daya tangkal, perlu segera dihapuskan dari daftar inventaris, guna menghemat anggaran pemeliharaan. Untuk mewujudkan modernisasi Alutsista TNI Angkatan Darat dibutuhkan adanya kebijakan, strategi dan upaya percepatan yang dilakukan secara serasi, selaras dan berkesinambungan dalam pencapaian modernisasi Alutsista TNI Angkatan Darat.

- a. Modernisasi ini untuk mewujudkan pembangunan postur TNI AD yang meliputi kekuatan, kemampuan dan gelar, menuju MEF secara bertahap. Dalam mewujudkan kemampuan, gelar dan kekuatan menuju MEF, TNI Angkatan Darat mengacu pada MEF TNI dimana dalam penyusunan perencanaan pembangunan kekuatan untuk mencapai tingkat kekuatan tertentu (capability based planning) termasuk pentahapannya, harus sesuai dengan program pembangunan Kekuatan Pokok Minimum yang telah dicanangkan Pemerintah dan diharapkan terealisasi pada tahun 2024. Upaya mewujudkan MEF ini terbagi dalam tiga tahap perencanaan strategis (renstra) yaitu Renstra I (2010-2014), Renstra II (2015-2019), dan Renstra III (2020-2024).
- b. Dalam upaya menuju postur MEF, pengelolaan Alutsista TNI dilakukan dengan penghapusan, mempertahankan alutsista yang dimiliki, dan pengadaan. Pembangunan MEF TNI tersebut juga diikuti dengan peningkatan SDM TNI, peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung operasionalisasi Alutsista beserta pengawakannya, serta penggerahan unsur-unsur operasional yang lebih efektif. Hal ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran

- pertahanan sebaik mungkin.
- c. Untuk mewujudkan kekuatan TNI Angkatan Darat yang tangguh dan handal, salah satu aspek yang perlu dipenuhi adalah melakukan memodernisasi Alutsista TNI Angkatan Darat secara bertahap dan berkelanjutan, sejalan dengan rencana pembangunan Postur Pertahanan dan Postur TNI, serta Postur TNI Angkatan Darat 20 tahun mendatang. Hal ini disebabkan karena kebutuhan Alutsista TNI Angkatan Darat yang modern akan sangat menentukan dalam mendukung sistem pertahanan negara yang kuat.

Mencermati kondisi Alutsista saat ini, dihadapkan dengan sasaran pembinaan Alutsista TNI Angkatan Darat, Kebijakan Pembinaan Alutsista TNI Angkatan Darat ke depan adalah :Pertama pengadaan Alutsista dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia baik pada PPPA TNI Angkatan Darat maupun dana Kredit Export (KE). Hal ini berpedoman kepada rencana pembangunan kekuatan TNI Angkatan Darat jangka panjang (Postur TNI Angkatan Darat) dan jangka sedang/menengah (Renstra TNI Angkatan Darat). Kedua prioritas pengadaan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan satuan yang baru dibentuk dan mengganti materiil yang sudah tidak layak operasi. Mengingat terbatasnya anggaran yang tersedia, maka pengadaan diprioritaskan pada materiil yang sangat dibutuhkan untuk operasional satuan dan memenuhi kebutuhan minimal satuan sehingga masih memungkinkan untuk mendukung tugas pokok satuan. Ketiga Terus melakukan usaha-usaha untuk mempertahankan kondisi Alutsista yang ada, termasuk Alutsista pengadaan lama, agar tetap dapat dimanfaat-kan, antara lain melalui pemeliharaan dan perbaikan. Terbatasnya anggaran yang dialokasikan dalam APBN untuk pengadaan maupun pemeliharaan Alutsista yang ada sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan sesuai TOP/DSPP dan rencana pembangunan kekuatan TNI Angkatan Darat

yang telah ditetapkan dalam Renstra maupun Postur TNI Angkatan Darat.

Terbatasnya kemampuan BUMNIS/BUMNIP yang dimiliki Indonesia untuk memenuhi kebutuhan Alutsista TNI Angkatan Darat dengan harga yang relatif murah dan kualitas yang baik, sehingga untuk pengadaan Alutsista TNI Angkatan Darat masih ada ketergantungan dari pengadaan luar negeri yang harganya relatif mahal, membutuhkan waktu pengadaan yang relatif lama dan rawan terhadap embargo.

Program KE pelaksanaannya mencapai lebih dari 38 bulan, sehingga akan berjalan lambat bila dikaitkan dengan target waktu, sesuai MEF Tahun 2010-2014 dan Keputusan Otorisasi Menteri (KOM) untuk anggaran yang diterima melalui APBN-P diterbitkan setiap bulan September-Okttober, padahal pelaksanaan kegiatan butuh waktu cukup lama, sehingga akan terjadi keterlambatan. Sementara itu, disisi lain dari segi anggaran kita tidak lagi mengenal Anggaran Pembangunan Lanjutan (APL).

Beberapa upaya dan langkah yang bisa dilakukan oleh TNI Angkatan Darat dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain : Merevisi kebutuhan Alutsista selama 20 tahun kedepan secara cermat sesuai dengan kemampuan anggaran nyata, dikaitkan dengan evaluasi pengadaan materiil yang dapat terealisir selama kurun waktu itu, sehingga secara bertahap pengadaan Alutsista dimasa mendatang dapat sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam tiga tahapan Renstra dan Postur TNI Angkatan Darat. Mendorong kemampuan industri strategis dalam negeri, yang mampu memproduksi peralatan militer guna memenuhi kebutuhan Alutsista TNI, sehingga secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan Alutsista produksi luar negeri serta memanfaatkan suku cadang yang dapat diproduksi di dalam negeri untuk mendukung kegiatan pemeliharaan. Dan Pengadaan Alutsista tidak hanya dilaksanakan melalui Program KE, tetapi didukung dari pendanaan lain melalui Program PDN (Pinjaman Dalam Negeri) dan ON TOP dalam rangka percepatan

pengadaan, sedangkan untuk mempercepat pengadaan melalui KE dilaksanakan melalui G to G (*Government to Government*).

Diharapkan, dengan modernisasi alutsista, perubahan kebijakan militer, prioritas penempatan pasukan di wilayah timur Indonesia, tidak ada lagi aksi-aksi negara tetangga yang akan melecehkan bangsa ini. Termasuk Gerakan Papua Merdeka yang seolah terlindungi dengan keberadaan ribuan anggota pasukan marinir AS di Australia. Sehingga, OPM semakin berani mempublikasikan aksi-aksi mereka. Dalam pengadaan alutsista itu, agar prosedur pembelian dapat dipertanggungjawabkan, tidak menyimpang dan tidak mengalami kebocoran.

Pembangunan kekuatan TNI dilaksanakan atas dasar konsep pertahanan berbasis kemampuan (based defence capabilities), kekuatan dan gelar satuan sehingga pembangunan kekuatan TNI utamanya diarahkan agar dapat melaksanakan tugas pokoknya yaitu menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah darat dan menyelamatkan segenap Bangsa Indonesia yang dalam pelaksanaannya diarahkan kepada tercapainya kekuatan pokok minimum (Minimum Essential Force), dengan sasaran tingkat kekuatan yang cukup mampu menjamin kepentingan strategis pertahanan aspek darat.

Untuk dapat mewujudkan pembangunan kekuatan TNI, maka perlu adanya dukungan anggaran dari pemerintah guna tercapainya pemantapan satuan yang diharapkan dengan memiliki daya tangkal yang mampu mengatasi setiap bentuk ancaman yang mungkin timbul dalam kurun waktu lebih kurang lima sampai dua puluh tahun ke depan. Adapun modernisasi Alutsista yang diharapkan secara bertahap dilaksanakan penggantian dan pengadaan senjata yang baru sesuai dengan perkembangan teknologi dan melaksanakan pembentukan satuan baru di setiap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah perbatasan dengan negara lain, daerah rawan konflik, pulau-pulau terluar

serta seluruh wilayah sesuai dengan luas wilayah dan ancaman yang mungkin timbul baik dari dalam maupun dari luar.

Modernisasi dipandang sudah sangat mendesak, karena dengan meningkatnya intensitas dan eskalasi ancaman, akibat perkembangan lingkungan strategis, menuntut profesionalisme TNI dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Untuk dapat meningkatkan profesionalitas itu, prioritas kita antara lain adalah memenuhi dan melengkapi Alutsista TNI Angkatan Darat dengan peralatan modern, bukan dengan Alutsista yang sudah tua dan usang.



Penutup.

a. Anggaran Alutsista TNI AD. Menurut data yang dikeluarkan Kementerian Pertahanan RI bahwa tingginya kebutuhan akan anggaran dalam setiap tahunnya ternyata belum diikuti oleh keinginan (political will) pemerintah untuk memenuhinya. Kesenjangan antara keduanya terkadang mencapai 400 persen. Sejak tahun 2005 hingga 2010, usulan yang diajukan Dephan terus mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut tidaklah signifikan, terutama berkaitan dengan belanja alutsista TNI.

Namun di tengah-tengah minimnya anggaran tersebut, kita masih melihat bagaimana alokasi anggaran yang disusun belum mencerminkan kebutuhan utama dalam penyelenggaraan sistem pertahanan Indonesia dimana pembiayaan terhadap Koter (TNI AD) menyerap lebih dari 50% anggaran pertahanan.

Sementara itu pengadaan alutsista terutama kapal dan pesawat tempur bagi TNI AL dan TNI AU terkesan dikesampingkan, belum lagi berbagai praktik penggunaan anggaran yang tidak efisien dan korupsi yang masih terjadi di lingkungan internal TNI. Selain itu, ketiadaan dana dalam APBN tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan pembiayaan pembangunan pertahanan.

b. Perawatan dan Pemeliharaan Alutsista. Berdasarkan data yang dirilis oleh pihak Markas Besar Tentara Nasional Indonesia tahun 2010, 70% alutsista kita berada dalam kondisi yang sudah tua atau minimal berusia 20 tahun. Kendala lainnya ada pada pemeliharaan dan perawatan yang kadang kala terbentur pada ketersedian suku cadang walaupun anggarannya sudah ada dalam perencanaan. Bila pemeliharaan dan perawatan alutsista mengikuti sistem pemeliharaan yang telah ada maka resiko kemungkinan untuk penyusutan fungsi dapat ditekan seminimal mungkin. Kelangkaan suku cadang ini sangat bergantung pada negara pembuat alutsista sebagai penyedia tunggal yang banyak dipengaruhi oleh suhu politik. Selain masalah teknis dari perawatan dan pemeliharaan alutsista, juga terdapat masalah finansial. Masalah finansial biasanya bukan karena alokasi dana dari negara kurang memadai dengan kebutuhan dana untuk perawatan, akan tetapi masalah finansial itu dikarenakan penyelewengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang masih terjadi.

c. Peran Industri Dalam Negeri. Masalah pengadaan Alutsista TNI AD yaitu: 1) masalah anggaran yang terbatas, 2) masih ada yang bermain untuk mengambil keuntungan dari pengadaan Alutsista, yaitu broker, dari kalangan internal atau kalangan eksternal, 3) ketidakpahaman DPR terkait spesifikasi produk yang akan dibeli pemerintah, 4) masalah bagaimana politik Luar Negeri pemerintah terhadap negara lain, dan 5) masalah ancaman di kawasan. Maka dari itu diperlukan peranan industri pertahanan dalam negeri untuk memasok persenjataan TNI AD. Pengembangan industri pertahanan bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan kondisi alat utama sistem persenjataan yang modern. Dalam rangka menciptakan kemandirian sekaligus

memperkecil ketergantungan di bidang pertahanan terhadap negara lain, telah dilakukan pemberdayaan industri nasional melalui forum diskusi bidang industri pertahanan dan keamanan yang pesertanya terdiri atas institusi pertahanan, perguruan tinggi, serta pemerhati di bidang industri pertahanan.

d. Dampak Modernisasi Alutsista TNI AD.

Adapun beberapa pertimbangan strategis pentingnya modernisasi Alutsista TNI AD antara lain, pertama untuk mewujudkan kekuatan dan kemampuan Pertahanan Negara yang memiliki perbandingan daya tempur strategis, baik skala teknologi militer maupun skala penangkalan. Kedua, merupakan perimbangan kekuatan strategis suatu negara yang memiliki prasyarat kekuatan politik-ekonomi dan pertahanan militer. Ketiga, realisasi Revolution in Military Affairs (RMA) bagi suatu negara termasuk Indonesia untuk mewujudkan kekuatan minimal (MEF) sebagai instrumen negara untuk melaksanakan fungsi negara berdasarkan keputusan politik.

Setelah mengetahui alasan modernisasi alutsista TNI AD, maka selanjutnya kita akan mengetahui akibat atau dampak modernisasi alutsista tersebut. Pertama, dengan semakin modernisasi alutsista TNI AD yaitu semakin kuatnya pertahanan Indonesia. Kedua, kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman (militer dan non militer) akan terjaga dan terlindungi. Ketiga, modernisasi alutsista dapat menaikkan posisi dan peran Indonesia di kawasan Asia Tenggara dan Internasional.

Saran. Peran pemerintah sebagai *Policy Planners* dan Investor perlu ditingkatkan untuk mencapai tujuan pemberdayaan industri nasional yang berbasis kompetensi yang melibatkan BUMN dan Industri swasta lainnya. Kebijakan domestic priority untuk pemenuhan kebutuhan Alutsista telah dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan untuk memberdayakan BUMN, disisi lain hal tersebut menimbulkan lambatnya inovasi dan efisiensi dari sistem industri nasional.

LETKOL CPL SYAIFUL BAHRI ADALAH ABITUREN SEMAPA PK 1997, LULUSAN DIKREG LIX SESKOAD TA. 2020, SAAT INI MENJABAT KABENGRAH PALDAM IM, KODAM IM, BANDA ACEH



METODE LATIHAN CARDIO (LARI) TANPA BEBAN RANSEL

KELOMPOK VII PASIS DIKREG LIX SESKOAD

1. Latar Belakang

Lembaga pendidikan di lingkungan TNI AD mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan guna membentuk postur Prajurit TNI AD yang profesional, berjiwa Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu penyelenggaraan pendidikan perlu dikelola secara terencana dengan berpedoman pada Buku Petunjuk Pendidikan yang telah ditentukan oleh komando atas yang mengatur tentang pelaksanaan pendidikan tersebut sesuai tingkatannya.

Penyelenggaraan pendidikan merupakan kegiatan yang sangat mendasar dalam pencapaian tujuan pendidikan, sehingga diperlukan pengelolaan penyelenggaraan pendidikan yang disiapkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Kesiapan pelaksanaan pendidikan tersebut harus sejalan dengan kegiatan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran melalui pengelolaan manajemen pendidikan yang efektif dan efisien.

Dihadapkan kompleksitas ancaman, perlu persiapan mulai dari personel yang ideal dan kompeten, ketersediaan Alutsista, regulasi/kebijakan pertahanan negara dan sebagainya.

Tugas pokok sesuai dengan UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI adalah "Segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer serta ancaman bersenjata terhadap keutuhan bangsa dan negara". Dengan demikian, tugas TNI tidaklah ringan, sehingga diperlukan penyiapan personel secara fisik yang harus mampu menghadapi medan tugas, dengan kondisi wilayah darat Indonesia yang sangat variatif dari pegunungan, lembah, padang rumput, rawa, hutan tropis dan masih banyak lagi bentuk medan lainnya, utamanya bagi satuan tempur yang menggunakan kemampuan fisik sebagai salah satu faktor yang menentukan dalam menyelesaikan tugas yaitu mencari, mendekati dan menghancurkan musuh dengan berjalan kaki, sehingga dibutuhkan kondisi fisik atau tingkat kesegaran jasmani prajurit yang baik sesuai norma yang ditentukan oleh Institusi tersebut demi tercapainya tugas pokok.

Kesiapan personel menjadi hal yang penting dari semua aspek, karena personel memiliki peran untuk menggerakkan seluruh aspek lainnya. Pencapaian keberhasilan pelaksanaan tugas pokok tidak hanya ditentukan oleh canggihnya senjata dan

perlengkapan serta penggunaan teknik dan taktik bertempur saja, namun dipengaruhi salah satunya oleh tingkat kesegaran jasmani individu, proporsional tubuh dan fisik yang prima sangat dibutuhkan agar pencapaian tugas pokok tercapai secara optimal.

2. Permasalahan

Kesegaran jasmani merupakan salah satu persyaratan yang menentukan diterima atau tidaknya calon prajurit siswa dalam mengikuti pendidikan militer dan harus dipenuhi sesuai standar ketentuan TNI AD maupun di lembaga pendidikannya. Program latihan telah dilakukan untuk meningkatkan kemampuan siswanya, mengingat kurang optimalnya tingkat kesegaran jasmani dan skor pada penilaian akhir kesegaran jasmani merupakan salah satu sebab yang sangat menentukan lulus tidaknya seorang siswa dalam mengikuti pendidikan. Metode latihan untuk meningkatkan kesegaran jasmani yang telah dilakukan secara umum pada pendidikan militer yaitu menggunakan beban ransel PDLT, namun peneliti melihat ketika para siswa melakukan kegiatan lari menggunakan beban ransel PDLT, mereka bergerak lebih lambat lajunya dari pada yang tidak menggunakan ransel PDLT, sehingga untuk peningkatan kemampuan kesegaran jasmaninya menjadi tidak optimal, karena penggunaan ransel yang telah ditentukan berat bebannya sebagai siswa di Lembaga Pendidikan pertama ataupun Pendidikan Pembentukan.

Giriwijoyo (2010 : 205) menyatakan bahwa latihan otot untuk meningkatkan kemampuan fungsional otot perlu menggunakan beban yang berupa berat badan sendiri (berat beban internal) atau beban yang berasal dari luar (beban external). Pemberian beban harus fisiologis yaitu sesuai dengan kemampuan yang dimiliki atlet pada saat akan menjalani pelatihan sesuai dengan tujuan pelatihan dan juga harus sesuai dengan cabang olahraganya. Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa peningkatan kesegaran jasmani pada siswa memerlukan program latihan yang benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip latihan.

Latihan fisik yang menggunakan beban maupun yang tidak, keduanya memiliki peran yang penting dalam upaya meningkatkan kesegaran jasmani. Namun, pada saat ini dari kedua bentuk latihan tersebut (menggunakan beban ransel dan yang tanpa beban) pengaruhnya terhadap tingkat kesegaran jasmaninya belum diketahui secara jelas.

3. Kondisi Ideal dan Kondisi Sebenarnya.

Pimpinan TNI AD merealisasikan program Germas pemerintah dengan membentuk Prajurit TNI AD yang memiliki kondisi jasmani bugar dan prima serta memiliki kesehatan yang baik dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok satuan, maka penyelenggaraan program pembinaan jasmani prajurit yang berorientasi pada keilmuan agar tercapai tujuan pembinaan jasmani secara efektif dan efisien di seluruh satuan jajaran TNI AD. Pembinaan jasmani prajurit berpedoman kepada ketentuan yang telah diatur dalam Bujuknis TNI AD yang tertuang dalam Skep Kasad No Kep 384/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015, tentang Penyusunan Program Pembinaan Latihan Jasmani.

Adanya kebijakan Kasad terkait pola pembinaan jasmani dan frekuensi atau berapa kali latihan dalam seminggu sesuai Surat Edaran Kasad Nomor SE/2/1/2019 tentang Pelaksanaan Kebijakan Kasad Bidang Personel pada Bidang Pembinaan Jasmani yaitu “..... Pembinaan dilaksanakan setiap hari secara perorangan/mandiri dengan penuh kesadaran agar senantiasa siap setiap saat melaksanakan tugas. Kegiatan olahraga minimal berupa jalan kaki selama satu jam per hari.....”¹

Hal ini berkenaan penerapan latihan seminggu dua kali atau seminggu tiga kali perlu ditinjau ulang ternyata tidak efektif untuk melatih sistem kardiovaskuler (sistem peredaran darah dan jantung) prajurit dan tidak dapat pula memelihara kesegaran jasmani yang telah dicapai, untuk itu kebijakan pimpinan TNI AD sekarang menerapkan pola pembinaan jasmani Lima Kali dalam seminggu semata-mata untuk mencapai kesegaran prajurit yang baik.

¹ Surat Edaran Kasadan Nomor SE/2/1/2019 tentang Pelaksanaan Kebijakan Kasad Bidang Personel pada Bidang Pembinaan Jasmani

Latihan kondisi fisik yang benar sesuai dengan program dan ketentuan prinsip-prinsip latihan akan diperoleh tujuan latihan yang diharapkan sehingga ketepatan waktu saat puncak latihan dapat dicapai seperti dalam tahapannya. Seorang prajurit siswa dengan jadwal pendidikan yang padat harus tetap memiliki kondisi fisik yang prima (ditandai dengan kesegaran jasmani baik) sehingga dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan selanjutnya siap menerima rangkaian kegiatan berikutnya kembali.

Namun, pada kenyataannya saat prajurit siswa mengikuti Pendidikan dengan waktu yang relatif lama (3 - 7 bulan) kondisi mereka bisa jadi menurun, ditandai dengan banyaknya siswa yang berobat ke KSA, demam atau gejala kurang sehat lainnya. Fenomena tersebut menggugah penulis untuk melakukan penulisan mengenai konsep bimsuh latihan cardio (lari) tanpa menggunakan beban ransel guna peningkatan kesegaran jasmani di lembaga pendidikan TNI AD.

3. Pembahasan.

Konsep latihan yang selama ini di berlakukan adalah selalu menggunakan beban yaitu beban external (ransel ataupun beban tambahan yang lain) dengan anggapan dengan beban external tersebut akan mampu meningkatkan kesegaran jasmani para siswanya, hal ini tentu bisa dimaklumi dengan pandangan bahwa latihan harus memegang prinsip overload, namun tidak melihat dari sisi tujuan yang akan dicapainya di akhir pendidikan secara efektif dan efisien. Konsep yang selama ini dilakukan tidak sepenuhnya salah karena anggapan yang dijadikan dasarnya, hal ini bisa disiasati dengan penjadwalan yang disusun dan diberlakukan pada saat yang lain. Sehingga akan menjadi lebih efektif dan efisien guna peningkatan kesegaran jasmani para siswanya.

Pembinaan Kesamptaan Jasmani adalah istilah yang umum digunakan lingkungan TNI khususnya TNI AD sedangkan masyarakat menyebutnya dengan Pembinaan Kebugaran Jasmani.

Menurut Corbin dan Lindsey (2000: 5), kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk berfungsi secara efektif dan efisien. Menurut Vitale (1973: 2), kebugaran jasmani adalah kondisi jasmani yang baik dan mampu berfungsi dengan baik. R. Lutan (2001:7), mengatakan bahwa kebugaran jasmani (yang terkait dengan kesehatan) adalah kemampuan seseorang untuk melakukan tugas fisik yang memerlukan kekuatan, daya tahan dan fleksibilitas. Menurut Irianto (2004: 2), kebugaran fisik (physical fitness) yaitu kemampuan seseorang untuk dapat melakukan kerja sehari-hari secara efisien tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan sehingga masih dapat menikmati waktu luangnya.

Sedangkan kebugaran jasmani menurut Departemen Pendidikan Nasional Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani (2010:4), adalah kemampuan tubuh seseorang untuk melakukan tugas pekerjaan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti.



Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk melakukan suatu aktivitas dalam waktu tertentu tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan orang tersebut masih mempunyai cadangan tenaga untuk melakukan aktivitas lainnya.

Sehingga pembinaan kesamptaan jasmani diarahkan untuk mencapai kondisi kebugaran jasmani atau kesamptaan jasmani yang prima perlu melakukan latihan fisik yang melibatkan komponen kebugaran jasmani dengan metode latihan yang benar.

Berdasarkan uraian di atas, Tuntutan kualitas tersebut diarahkan pada sasaran agar salah satunya kebugaran jasmani Serdik mencapai tingkat yang "mantap". Akan tetapi, dihadapkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani, menurut Rusli Lutan (2001:73) dipengaruhi intensitas, kekhususan, frekuensi dan kekhasan perorangan. Dari empat faktor tersebut, tidak disinggung untuk menyertakan beban kepada pundak atau pada jasmani lain, hal ini mengisyaratkan bahwa dihadapkan pada kebugaran jasmani, Bimsuh latihan Cardio (lari) dengan menggunakan ransel kurang tepat. Untuk memahami faktor-faktor tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

a. **Intensitas.** Menurut Rusli Lutan (2001:73) bahwa "Untuk meningkatkan kebugaran jasmani seseorang harus melakukan tugas kerja yang berat dari kebiasaannya". Hal ini dapat dilakukan dengan menambah jumlah beban kerjanya atau mempersingkat waktu pelaksanaannya. Dengan beban kerja yang melebihi dari kebiasaannya sehari-hari, maka dapat memberikan dampak fisiologis dan psikologis pada seseorang. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Harsono, (1988:115) bahwa" Perubahan-perubahan fisiologis dan psikologis yang positif hanyalah mungkin dicapai apabila melalui suatu program latihan yang intensif dengan berlandaskan prinsip overload". Dalam hal ini anak bukan dilatih sebagaimana dengan atlit berprestasi, tetapi dalam aktivitas kesehariannya ada peningkatan aktivitasnya selalu bertambah berat dari sebelumnya.



b. **Kekhususan.** Menurut Rusli Lutan (2001:74) mengemukakan bahwa "Peningkatan dalam berbagai aspek kebugaran jasmani adalah bersifat spesifik, sesuai dengan jenis latihan yang ditujukan terhadap kelompok otot yang terlibat". Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Harsono (2005:119) bahwa "...manfaat maksimal yang bisa diperoleh dari rangsangan latihan hanya akan terjadi kalau rangsangan tersebut mirip atau menyerupai gerakan-gerakan yang dilakukan dalam olahraga". Jadi setiap jenis latihan ditujukan ke arah pembinaan unsur kebugaran yang lebih khusus.

c. **Frekuensi Latihan.** Menurut Rusli Lutan (2001:74) bahwa "otot-otot yang dilatih secara teratur dengan frekuensi yang cukup akan mengalami perkembangan". Selanjutnya dijelaskan bahwa latihan teratur dengan frekuensi yang cukup, serabut otot menjadi tebal, karena itu akan menjadi besar. Keadaan ini disebut hipertropi dan sebaliknya bila otot mengecil disebut atropi . Oleh karena itu, untuk menjaga tingkat kebugaran seseorang sedikitnya berlatih tiga kali dalam seminggu.

d. **Bersifat perorangan.** Menurut Rusli Lutan (2001:74) bahwa "Setiap orang mengalami peningkatan kebugaran jasmani berbeda". Selanjutnya dikatakan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani yang bersifat perorangan ini adalah : usia, bentuk tubuh, keadaan gizi, berat badan, status kesehatan dan kuat lemahnya motivasi. Faktor lingkungan sekitar dan keturunan ikut berpengaruh (Rusli Lutan 201:75).

4. Metode Tanpa Beban (external).

Pada pendidikan militer di Lemdik TNI AD upaya peningkatan kesegaran jasmani siswa melalui bimbingan dan pengasuhan jasmani dengan menggunakan metode tanpa beban

(tanpa menggunakan beban ransel dan perlengkapannya), artinya beban tubuh sendiri, belum dilaksanakan (tidak sepenuhnya).

Menurut Harsono (1988 : 178) "Beban itu bisa beban anggota tubuh kita sendiri, ataupun beban atau bobot dari luar (external resistance)". Menurut Giriwijoyo (2010 : 207) "Untuk memperoleh peningkatan daya tahan dinamis maka beban luar untuk latihan harus "cukup ringan" sehingga pengulangan kontraksi otot menjadi sebanyak mungkin" Penulis menggunakan metode tanpa beban atau beban tubuh sendiri karena apabila dilaksanakan sesuai prinsip latihan individualisasi akan dapat mencapai hasil yang terbaik, menurut Harsono (2007:6) "...bahwa training memang harus direncanakan dan disesuaikan bagi setiap individu agar dengan demikian latihan tersebut dapat menghasilkan hasil yang terbaik (*the best result*) bagi individu tersebut". Mengingat kesegaran jasmani merupakan bagian dari kekhasan setiap individu sehingga dalam penyusunan latihannya pun juga harus memperhatikan prinsip individualisasi ini.

Latihan Cardio menggunakan beban ransel dengan tanpa menggunakan beban ransel yaitu kebugaran jasmani Serdik di Lemdik TNI AD memiliki kebugaran yang prima dibandingkan dengan yang menggunakan ransel. Adapun pelaksanaan latihan dengan beban sebaiknya dilakukan tiga kali seminggu, karena untuk memberikan kesempatan bagi otot untuk berkembang dan mengadaptasikan diri pada hari istirahat tersebut. Salah satu kelemahan metode menggunakan beban ransel di militer pada pendidikan pembentukan adalah beban ransel tersebut dipakai secara terus-menerus saat bimbingan dan pengasuhan jasmani sehingga irama langkahnya lambat.

Metode dalam bimbingan dan pengasuhan jasmani ini pada dasarnya merupakan suatu alat untuk menciptakan proses berlatih lebih efektif dan bermutu. Penerapan metode sudah barang tentu harus memperhatikan prinsip-prinsip latihan, tujuan yang hendak dicapai, diantaranya adalah isi materi

bimbingan dan pengasuhan jasmani dan kegiatan yang akan diberikan kepada perwira siswa dalam pelatihan tersebut.

Sujana (2005:76) menyatakan: "Ketepatan penggunaan metode pembelajaran tersebut sangat bergantung pada tujuan, isi proses belajar mengajar dan kegiatan belajar mengajar". Pemberian atau penerapan metode pembelajaran yang tepat, dapat menumbuhkan berbagai kegiatan belajar perwira siswa yang berhubungan dengan kegiatan bimbingan dan pengasuhan oleh para pembina.

Kesimpulan

Sistem Pembinaan Jasmani dan Pola Latihan. Peningkatan pemahaman terhadap sistem pembinaan jasmani dan pola latihan harus dilakukan dengan maksud untuk mendukung kesiapan satuan dalam melaksanakan tugas pokoknya tanpa meninggalkan konsep FITT (frekuensi, intensitas, time dan tipe. Langkah-langkah untuk meningkatkan pemahaman sistem pembinaan jasmani di jajaran satuan infanteri adalah sebagai berikut:

1. Membangun kepedulian para pembina di satuan terhadap pembinaan latihan sehingga timbul kreativitas yang tinggi di bidang pembinaan jasmani di kalangan penanggung jawab pembinaan jasmani prajurit di satuannya dengan menimba ilmu atau pengalaman latihan bersama dengan pasukan lain/luar negeri dibarengi dengan pengetahuan tentang sport science.
2. Melaksanakan penataran dalam satuan tentang sistem pembinaan jasmani dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang sistem pembinaan jasmani bagi para Komandan Satuan Infanteri. Hal ini akan menciptakan kesamaan persepsi dalam pelaksanaan pembinaan jasmani dan manajemen latihan serta kebijakan latihan TNI AD.
3. Mengembangkan perangkat latihan yang ada di satuan.



SESKOAD

Terbaik, Terhormat dan Disegani

ISSN 2086-9312



9772086931295